



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

Kepada

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Probolinggo**

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2021



DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Dasar Hukum	I-1
1.2	Visi Dan Misi Kepala Daerah	I-3
1.2.1	Visi	I-3
1.2.2	Misi	I-3
1.3	Data Umum Daerah	I-4
1.3.1	Data Geografis Wilayah	I-4
1.3.2	Gambaran Umum Demografis	I-9
1.3.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	I-12
1.3.3	Kondisi Ekonomi	I-12
1.3.4	Kondisi Sosial	I-27
1.3.5	Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	I-29
1.3.6	Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja	I-30
1.3.3	Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan	I-31
2.	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	II-1
3.	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.....	III-1
3.1.1.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	III-2
3.1.2.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	III-50
3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan	III-110
3.1.4	Pelaksanaan Unsur Staf	III-123
3.1.5	Pelaksanaan Unsur Pengawasan	III-131
3.1.6	Pelaksanaan Fungsi Penunjang	III-132
3.1.7	Pelaksanaan Fungsi Koordinasi	III-150
3.2.	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-167
3.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi Dprd Tahun Anggaran Sebelumnya	III-204
3.4	Prestasi Yang Telah Diraih	III-218
3.5	Capaian Indikator Kinerja Utama	III-219
4.	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	IV-1
5.	PENUTUP	V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo	I-5
Tabel 1. 2	Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan	I-5
Tabel 1. 3	Jenis Tanah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan	I-6
Tabel 1. 4	Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo	I-7
Tabel 1. 5	Sumber Mata Air di Kota Probolinggo	I-8
Tabel 1. 6	Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan	I-9
Tabel 1. 7	Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan	I-11
Tabel 1. 8	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	I-11
Tabel 1. 9	Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020	I-12
Tabel 1. 10	Jumlah PNS Kota Probolinggo Tahun 2019-2020	I-12
Tabel 1. 11	Luas Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2020	I-13
Tabel 1. 12	Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2019-2020	I-14
Tabel 1. 13	Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2020	I-14
Tabel 1. 14	Data Produksi Peternakan Tahun 2019-2020	I-15
Tabel 1. 15	Data Produksi Perikanan Tahun 2019-2020	I-16
Tabel 1. 16	Data Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Probolinggo Tahun 2020	I-16
Tabel 1. 17	Data Profil Industri Tahun 2019 – 2020	I-17
Tabel 1. 18	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2019-2020	I-17
Tabel 1. 19	Profil Penyediaan Air Bersih Tahun 2019-2020	I-18
Tabel 1. 20	Perkembangan Pasar dan Toko di Kota Probolinggo Tahun 2019-2020	I-18
Tabel 1. 21	Jumlah UMKM Kota Probolinggo Tahun 2019-2020	I-19
Tabel 1. 22	Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2016-2020	I-19
Tabel 1. 23	Jumlah Bank Menurut Kepemilikan di Kota Probolinggo Tahun 2017-2020	I-20
Tabel 1. 24	Potensi Wisata Kota Probolinggo	I-21
Tabel 1. 25	Kunjungan Wisata Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2020	I-21
Tabel 1. 26	Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019	I-22
Tabel 1. 27	Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo (miliar rupiah) Tahun 2016-2020	I-24
Tabel 1. 28	Jumlah Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2017 – 2020	I-26
Tabel 1. 29	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2020	I-29
Tabel 1. 30	Target dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2020	I-30
Tabel 1. 31	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA. 2020	I-31
Tabel 2. 1	Target dan Realisasi Anggaran TA. 2020	II-2
Tabel 2. 2	Data Kinerja Anggaran 2019 - 2020.....	II-26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo.....	I-4
Gambar 1. 2	Peta Topografi Kota Probolinggo	I-5
Gambar 1. 3	Peta Transek Wilayah Kota Probolinggo	I-6
Gambar 1. 4	Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo	I-7
Gambar 1. 5	Peta Hidrologi Kota Probolinggo	I-8
Gambar 1. 6	Peta Kedalaman Air Tanah Kota Probolinggo	I-9
Gambar 1. 7	Kepadatan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020	I-10
Gambar 1. 8	Piramida Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020	I-11
Gambar 1. 9	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo	I-22
Gambar 1. 10	Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Atas Harga Berlaku Kota Probolinggo Tahun 2020	I-25
Gambar 1. 11	Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2020	I-26
Gambar 1. 12	Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Pendalungan Tahun 2020	I-27
Gambar 1. 13	Diagram Pertumbuhan Ekonomi dan Penduduk Miskin di Wilayah Pentalungan Tahun 2020	I-27
Gambar 1. 14	Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2017- 2020	I-28
Gambar 1. 15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2020	I-28
Gambar 1. 16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo Tahun 2014- 2020	I-29



BAB 1

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Walikota Probolinggo pada akhir tahun berkewajiban menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 serta menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 kepada DPRD ini menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran dan merupakan kewajiban konstitusional Pemerintah Kota Probolinggo terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020.

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.;
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 - 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024;
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2020 ;
26. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
27. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 ;
28. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Walikota Nomor 235 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1 VISI

Visi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD priode ke-4. Selain itu visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Probolinggo yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di Tahun berkenaan, maka Visi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang merupakan Visi Politik yang diusung Kepala Daerah terpilih yaitu :

“Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan dan Aman.”

1.2.2 MISI

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 tersebut, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

Misi Pertama : Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial

Misi Kedua : Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas

Misi Ketiga : Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi Keempat : Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik.



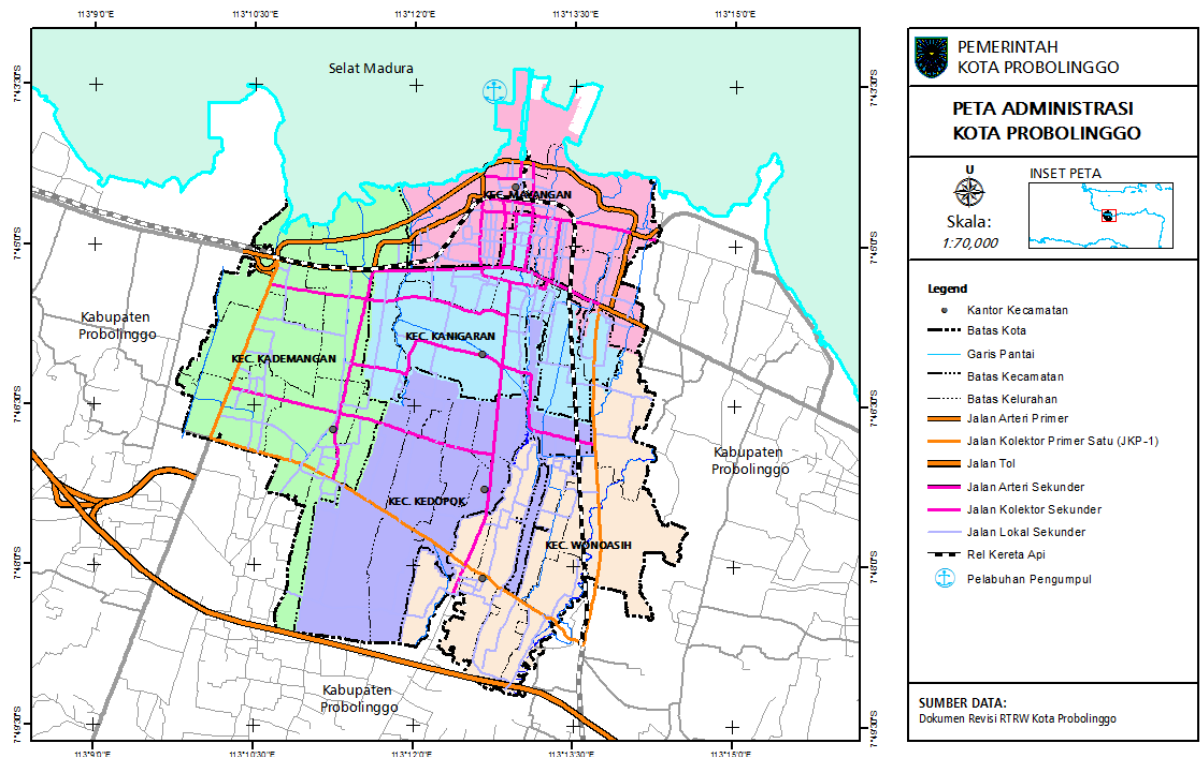
1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

A. Administrasi Wilayah

Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang berfungsi sebagai pusat dari WP Probolinggo – Lumajang dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur dan bagian dari tlatah atau kawasan kebudayaan Pendalungan yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Secara geografis Kota Probolinggo berada diantara 7°43'41" sampai 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' sampai dengan 113°15' Bujur Timur. Secara administrasi, Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan dan 29 kelurahan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara : Selat Madura
- 2. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu (Kabupaten Probolinggo)
- 3. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)
- 4. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo

Luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 km² dengan pembagian Wilayah administrasi Kota Probolinggo dalam 5 (lima) wilayah Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan). Adapun pembagian luas wilayah, jumlah Kelurahan, Jumlah RT dan RW dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH KELURAHAN	RW	RT
1. Kademangan	12,754	6	33	175
2. Kedopok	13,624	6	35	143
3. Wonoasih	10,981	6	39	189
4. Mayangan	8,655	5	42	258
5. Kanigaran	10,653	6	51	260
Jumlah	56,667	29	200	1,025

Sumber : BPS, Kota Probolinggo Dalam Angka, 2020

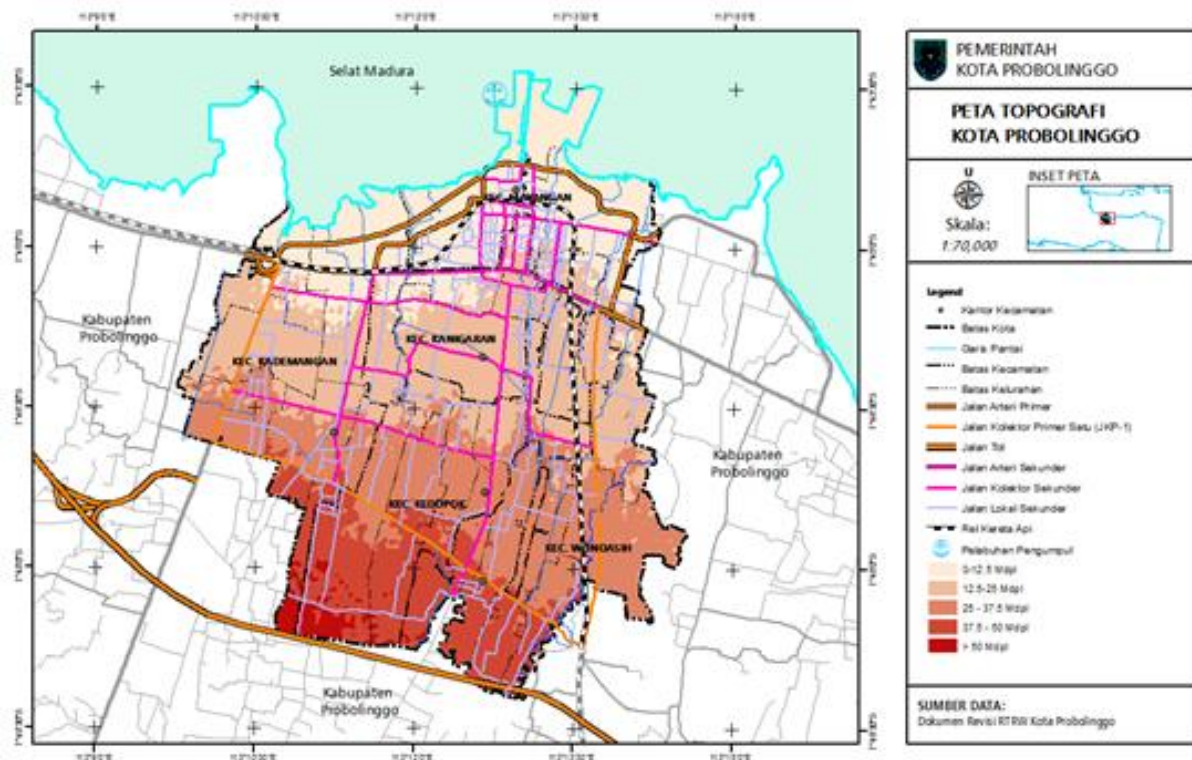
B. Topografi

Kota Probolinggo berada pada ketinggian antara 0 sampai 12,5 mdpl seluas 1.343,70 ha, ketinggian 12,5-25 mdpl seluas 1.750,50 ha, ketinggian 25-37,5 mdpl seluas 1.475,70 mdpl, ketinggian 37,5-50 mdpl seluas 838,16 mdpl, dan ketinggian >50 mdpl seluas 96,08 mdpl. Dengan keterengn 0 – 2% dapat dikatakan Kota Probolinggo memiliki wilayah yang relatif datar dan memungkinkan untuk pengembangan kawasan, khususnya kawasan budidaya. Secara kewilayahan wilayah utara yang berbatasan dengan Selat Madura memiliki ketinggian 0 – 12,5 mdpl dan beberapa kawasan di wilayah selatan memiliki ketinggian di atas 50 mdpl.

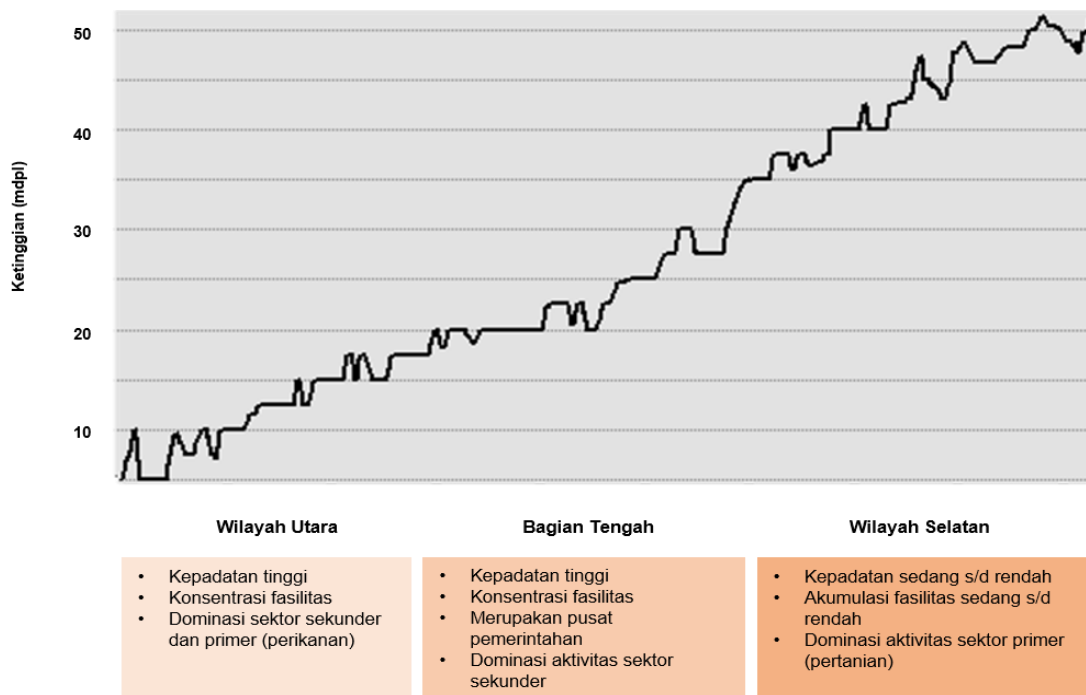
Tabel 1. 2 Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Topografi (mdpl)					Jumlah (Ha)
		0-12.5 Mdpl	12.5-25 Mdpl	25 - 37.5 Mdpl	37.5 - 50 Mdpl	> 50 Mdpl	
1	Kademangan	391,96	516,36	359,62	102,08	30,98	1.401,00
2	Wonoasih	2,63	149,12	576,64	347,79	3,06	1.079,24
3	Mayangan	830,73	147,38	0,00	0,00	0,00	978,11
4	Kanigaran	118,39	742,10	4,71	0,00	0,00	865,20
5	Kedopok	0,00	195,53	534,73	388,30	62,04	1.180,59
	Jumlah	1.343,70	1.750,50	1.475,70	838,16	96,08	5.504,14

Sumber : Revisi RTRW Kota Probolinggo, 2019



Gambar 1. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo



Gambar 1. 3 Peta Transek Wilayah Kota Probolinggo

C. Jenis Tanah

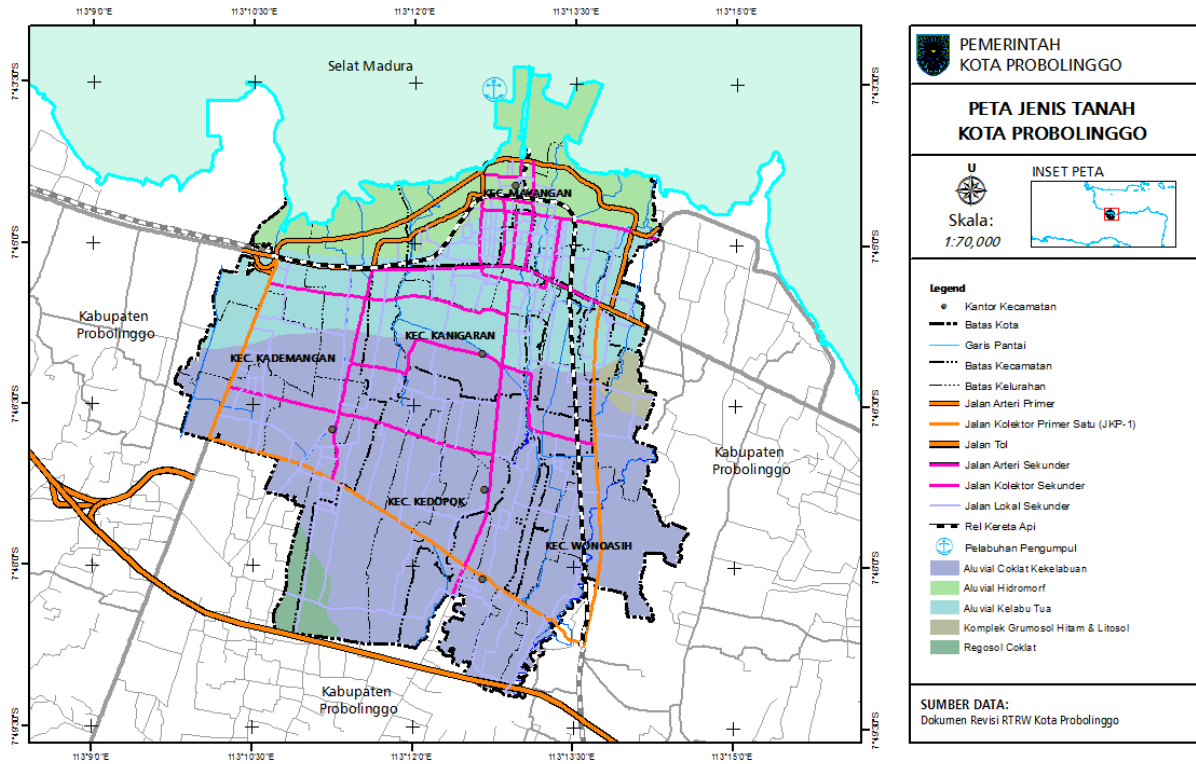
Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari Alluvial, Grumosol dan Regosol. Jenis tanah alluvial regosol terdapat pada daerah paling utara yaitu daerah pantai. Alluvial kelabu tua pada bagian tengah ke utara. Jenis tanah yang terluas pada wilayah Kota Probolinggo adalah alluvial coklat keabuan, yaitu dari bagian tengah hingga selatan kota. Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur kota, sedangkan kompleks grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya.

Jenis tanah Aluvial hidromorf seluas 787,87 ha, aluvial kelabu tua seluas 1.353,80 ha, aluvial coklat kekelabuan seluas 3.179,15 ha, kompleks grumosol Hitam dan Litosol seluas 65,45 ha, regosol coklat seluas 117,88 ha. Jenis tanah aluvial merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian, karena pada jenis ini tersedia cukup mineral yang diperlukan untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pula jika digunakan untuk bangunan, jenis tanah ini mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat.

Tabel 1. 3 Jenis Tanah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Tanah					Jumlah (Ha)
		Aluvial Hidromorf	Aluvial Kelabu Tua	Aluvial Coklat Kekelabuan	Komplek Grumosol Hitam & Litosol	Regosol Coklat	
1	Kademangan	217,81	383,87	743,66	0,00	55,67	1.401,00
2	Wonoasih	0,00	0,00	1027,84	51,40	0,00	1.079,24
3	Mayangan	570,06	408,05	0,00	0,00	0,00	978,11
4	Kanigaran	0,00	547,96	303,20	14,05	0,00	865,20
5	Kedopok	0,00	13,92	1104,46	0,00	62,21	1.180,59
	Jumlah	787,87	1.353,80	3.179,15	65,45	117,88	5.504,14

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Probolinggo, 2019



Gambar 1. 4 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo

D. Hidrologi

Kondisi hidrologi dapat menunjukkan kondisi sumber daya air yang terdapat di wilayah perencanaan. Kota Probolinggo mempunyai potensi sumber air yang cukup banyak, pada umumnya sungai-sungai yang ada mempunyai aliran yang cukup. Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai, antara lain Sungai Kedunggaleng, Umbul, Bager, Legundi, Kasbah dan Pancur. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengan wilayah.

Tabel 1. 4 Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo

NO	NAMA SUNGAI / KALI	PANJANG (Km)
1	Kedunggaleng	3,097
2	Umbul	5,138
3	Banger	2,865
4	Legundi	5,439
5	Kasbah	2,037
6	Pancor	4,239
7	Pesisir	3,693
8	Dringu	5,949
9	Tempuran	2,059
10	Afvoer Brantas	3,704
11	Afvoer Bromo	3,297
12	Pakis	3,225
13	Gladak Serang	4,392
14	Akub	3,693
15	Belo'an	5,539
16	Esan	4,137
17	Bangsingan	2,844
18	Barat TPA	2,510
19	Kedunggaleng 1	3,206

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Probolinggo, 2019

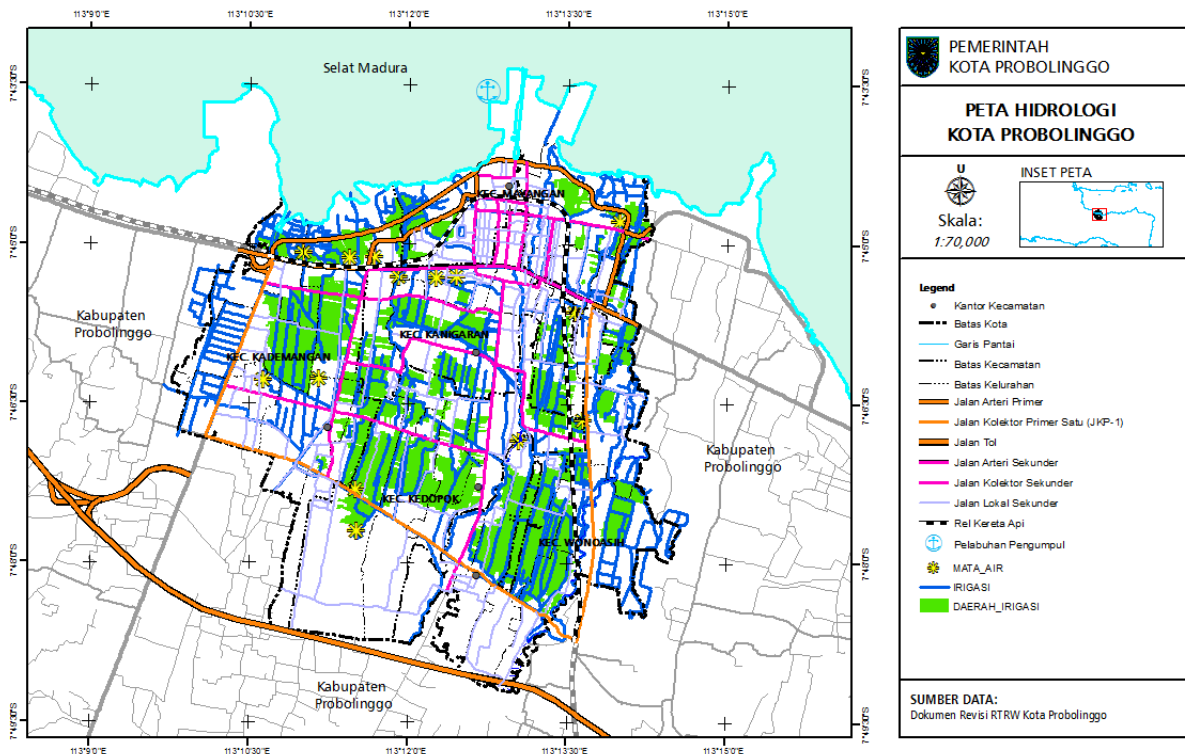


Selain memanfaatkan aliran air sungai untuk irigasi usaha di sektor pertanian, kondisi hidrologi Kota Probolinggo juga didukung oleh keberadaan sumber mata air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian serta berpotensi sebagai obyek wisata.

Tabel 1. 5 Sumber Mata Air di Kota Probolinggo

NO	SUMBER MATA AIR	LOKASI	
		KELURAHAN	KECAMATAN
1	Sumber Mata Air Langse	Triwung Lor	Kademangan
2	Sumber Mata Air Pilang Renes	Pilang	Kademangan
3	Sumber Mata Air Jalil	Ketapang	Kademangan
4	Sumber Mata Air Tiban	Pilang	Kademangan
5	Sumber Mata Air Gentong	Pilang	Kademangan
6	Sumber Mata Air Umbul	Curah Ginting	Kanigaran
7	Sumber Mata Air Pacar	Tisnonegaran	Kanigaran
8	Sumber Mata Air kekok	Tisnonegaran	Kanigaran
9	Sumber Mata Air Arum	Mangunharjo	Mayangan
10	Sumber Mata Air Jati	Jati	Mayangan
11	Sumber Mata Air Sumbertaman	Sumber Taman	Wonoasih
12	Sumber Mata Air Ardi	Wonoasih	Wonoasih
13	Sumber Mata Air Kareng	Kareng Lor	Kedopok
14	Sumber Mata Air Grinting	Sumber Wetan	Kedopok
15	Sumber Mata Air Sentong	Jrebeng Wetan	Kedopok

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Probolinggo, 2019



Gambar 1. 5 Peta Hidrologi Kota Probolinggo



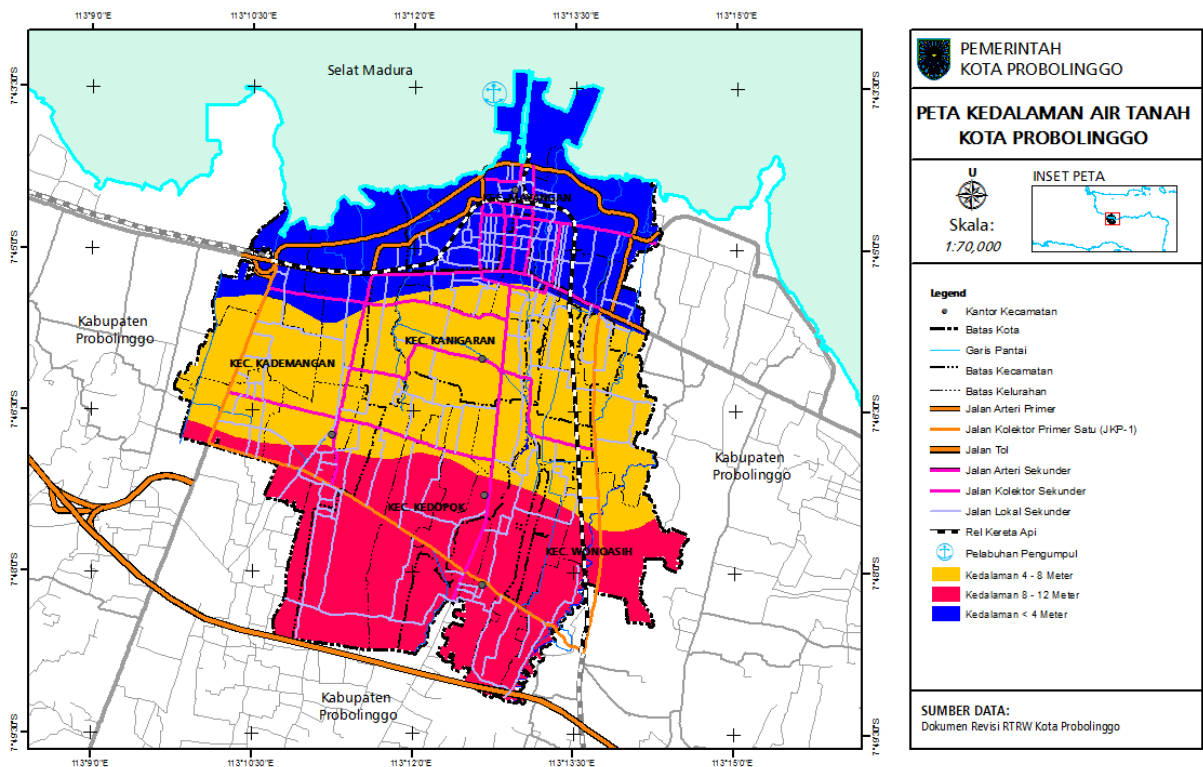
E. Kedalaman Air Tanah

Jenis kedalaman air tanah Kota Probolinggo berada pada kedalaman < 4 m seluas 1.484,61 ha, kedalaman 4-8 m seluas 2.221,69 ha, dan kedalaman 8-12 m seluas 1.797,84 ha.

Tabel 1. 6 Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kedalaman Air Tanah			Jumlah (Ha)
		Kedalaman < 4 Meter	Kedalaman 4 - 8 Meter	Kedalaman 8 - 12 Meter	
1	Kademangan	434,74	704,71	261,55	1.401,00
2	Wonoasih	0,00	315,06	764,18	1.079,24
3	Mayangan	935,28	42,83	0,00	978,11
4	Kanigaran	114,59	750,62	0,00	865,20
5	Kedopok	0,00	408,47	772,12	1.180,59
	Jumlah	1.484,61	2.221,69	1.797,84	5.504,14

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Probolinggo, 2019



Gambar 1. 6 Peta Kedalaman Air Tanah Kota Probolinggo

1.3.2 Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Probolinggo pada Tahun 2020 berdasarkan BPS (Kota Probolinggo Dalam Angka) adalah sejumlah 239.649 jiwa yang terdiri atas 118.829 jiwa penduduk laki-laki dan 120.820 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,96%. Kepadatan penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020 mencapai 4.230 jiwa/km² dengan sebaran penduduk masih terkonsentrasi di Kecamatan Mayangan dan Kanigaran. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk di tertinggi di Kecamatan Mayangan sebesar 7.133 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Kedopok sebesar 2.776 jiwa/km².

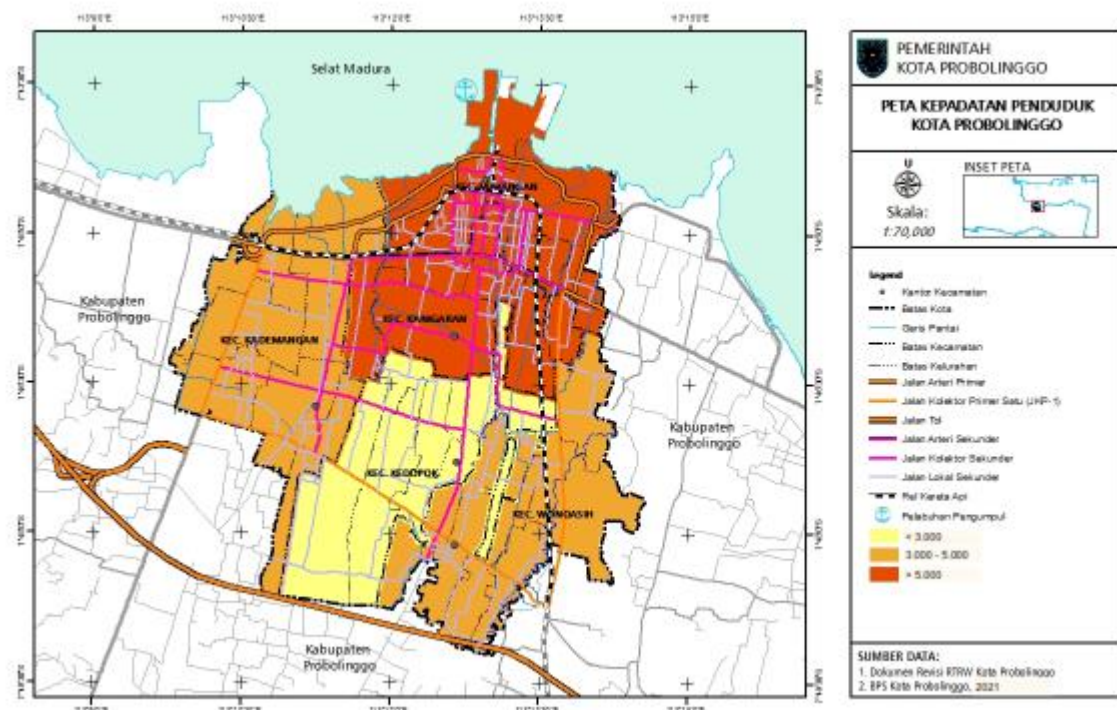


Pemusatan kepadatan penduduk di kawasan pusat kota tersebut diindikasikan karena masih terkonsentrasinya fasilitas dan aktivitas perkotaan di kedua kecamatan tersebut. Pemusatan aktivitas di pusat kota menjadikan skala pelayanan menjadi tidak efisien terutama dari pusat aktivitas untuk melayani hinterland-nya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat mendistribusikan aktivitas secara merata ke seluruh wilayah kota guna mengurangi beban kawasan pusat kota serta secara spasial dapat menjadikan struktur kota lebih kompak.

Tabel 1. 7 Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk (ribu jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk per km ²	Sex Ratio
1	Kademangan	44,62	18,62	3.500	97,58
2	Kedopok	37,82	15,78	2.776	99,46
3	Wonoasih	35,21	14,69	3.207	100,40
4	Mayangan	61,77	25,77	7.133	98,06
5	Kanigaran	60,23	25,13	5.655	97,35
	Kota Probolinggo	239,65	100,00	4.230	98,35

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2021, BPS



Gambar 1. 7 Kepadatan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020

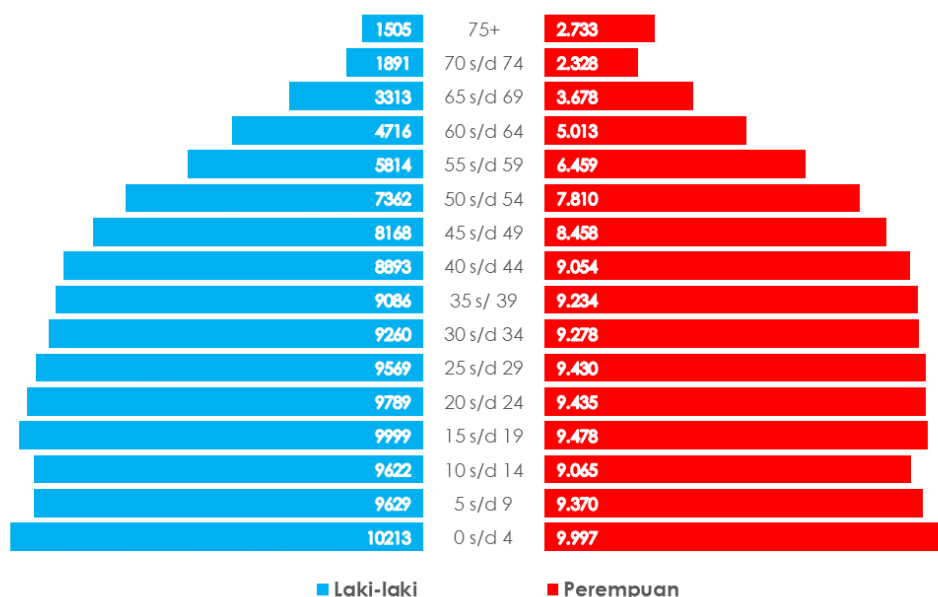
Piramida penduduk Kota Probolinggo jika ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dikategorikan sebagai piramida penduduk muda (ekspansif) dimana penduduk usia muda cenderung lebih dominan. Dari data diatas dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada usia produktif dengan kategori umur 15-60 tahun dengan total 65,34% yang merupakan subyek / pelaku pembangunan utama, merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka pemerintah dituntut untuk dapat mengarahkan program-program pembangunan daerah guna memberdayakan masyarakat serta upaya-upaya peningkatan kualitas SDM yang masuk dalam kelompok usia ini mengingat bonus demografi ini menjadi modal untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Adapun gambaran penduduk berdasarkan usia dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 1. 8 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	10.213	9.997	20.210
2	5-9	9.629	9.370	18.999
3	10-14	9.622	9.065	18.687
4	15-19	9.999	9.478	19.477
5	20-24	9.789	9.435	19.224
6	25-29	9.569	9.430	18.999
7	30-34	9.260	9.278	18.538
8	35-39	9.086	9.234	18.320
9	40-44	8.893	9.054	17.947
10	45-49	8.168	8.458	16.626
11	50-54	7.362	7.810	15.172
12	55-59	5.814	6.459	12.273
13	60-64	4.716	5.013	9.729
14	65-69	3.313	3.678	6.991
15	70-74	1.891	2.328	4.219
16	75+	1.505	2.733	4.238
	Total	118.829	120.820	239.649

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2021, BPS



Gambar 1. 8 Piramida Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020

Penduduk 15 tahun ke atas menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan Tahun 2020 menunjukkan bahwa persentase terbesar tingkat pendidikan masyarakat Kota Probolinggo adalah lulusan Sekolah Menengah Atas. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan lulusan Perguruan Tinggi hanya sebesar 14,59%. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk peningkatan kualitas SDM di Kota Probolinggo sebagai pelaku pembangunan daerah. Dengan adanya program nasional wajib belajar 12 tahun (hingga tingkat SLTP), maka masih menjadi permasalahan bagi Kota Probolinggo untuk mampu meningkatkan pendidikan masyarakat khususnya melalui kegiatan pendidikan informal dan pendidikan masyarakat, mengingat penduduk yang hanya tamat SD sebesar 30,07%.



Tabel 1. 9 Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	34.273	21.409	55.682
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	20.655	15.313	35.968
3	Sekolah Menengan Atas (SMA)	50.195	16.332	66.527
4	Perguruan Tinggi	22.794	4.234	27.028
	Jumlah	127.917	57.228	185.205

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2021, BPS

1.3.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk jumlah data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam kurun waktu dua tahun terakhir bisa dilihat pada table 1.5 dibawah ini

Tabel 1. 10 Jumlah PNS Kota Probolinggo Tahun 2019-2020

Tahun	Jumlah PNS
1	2
2019	3.503 orang
2020	3.344 orang

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021

Adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) mengakibatkan proses penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 baru selesai di Tahun 2021, di satu sisi banyak PNS yang pension baik karena telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) maupun karena meninggal dunia sehingga jumlah PNS Kota Probolinggo pada tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan tahun 2019

1.3.3 Kondisi Ekonomi

1.3.3.1 Potensi Unggulan Daerah

Kota Probolinggo menyimpan berbagai potensi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan terlebih potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset investasi penting dan kompetitif bagi dunia usaha, berbagai potensi investasi yang dimiliki tersebar luas diberbagai sektor, diantaranya :

1. Pertanian :

Bagi negara agraris seperti Indonesia, peran sektor pertanian sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia bahan pangan, sandang dan papan bagi segenap penduduk. Lebih dari itu, mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Pada wilayah selatan Kota Probolinggo jumlah luasan lahan pertanian masih bisa dioptimalkan untuk mendukung total produksi pangan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kota Probolinggo menunjukkan trend yang tidak begitu baik dan cenderung menurun. Hal ini dimungkinkan karena adanya pergeseran struktur perekonomian kota dari sektor primer ke sektor sekunder (jasa dan industri). Selain itu juga



dipengaruhi oleh factor menurunnya jumlah luasan lahan pertanian. Adapun luasan lahan pertanian di Kota Probolinggo Tahun 2020 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1. 11 Luas Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2020

PENGGUNAAN LAHAN	KECAMATAN					Total (Ha)
	Kademangan	Kedopok	Wonoasih	Mayangan	Kanigaran	
LAHAN PERTANIAN						
Lahan Sawah	535	399,5	422	117	270	1.743,5
Irigasi Teknis	535	399,5	422	117	270	1.743,5
Irigasi Setengah Teknis						
Irigasi Sederhana						
Irigasi Desa/ Non PU						
Tadah Hujan						
Pasang Surut						
Lebak						
Polder dan Lainnya						
Bukan Lahan Sawah	121	430,25	224,6	73,6	56,76	906,21
Tegal/Kebun	66	367,5	190			623,5
Ladang/Huma						
Perkebunan						
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	4,91	57,2	20,8	17,1	6,5	106,51
Padang Penggembalaan Rumput						
Sementara tak diusahakan						
Lain – lain (tambak, kolam, pekarangan, ditanami tanaman pertanian dll)	50,09	5,55	13,8	56,5	50,26	176,2
BUKAN LAHAN PERTANIAN	619,36	531,87	451,49	674,94	738,55	3.016,21
Jumlah	1.275,36	1.361,62	1.098,09	865,54	1.065,31	5.665,92

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2021

Sedangkan gambaran umum produktivitas sektor pertanian Kota Probolinggo selama Tahun 2020 sebagaimana pembahasan di bawah ini :

a. Tanaman Pangan

Adapun Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan dari tanaman Pangan di Kota Probolinggo pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.12 di bawah ini. Untuk produksi, luas panen dan rata-rata produksi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti cuaca, hama, curah hujan, dll sehingga produktivitasnya cenderung fluktuatif. Data produksi dan luas panen untuk komoditas padi mulai tahun 2019-2020 terus mengalami penurunan walaupun jika ditinjau dari rata-rata produksi mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Untuk komoditas jagung terjadi peningkatan produksi dan luas panen dalam kurun waktu 2 tahun terakhir akan tetapi dengan penurunan rata-rata produksi walaupun tidak secara signifikan. Sedangkan untuk komoditas bawang merah, mengalami peningkatan dari sisi produksi dan luas panen yang menjadi salah satu potensi pertanian tanaman pangan unggulan Kota Probolinggo walaupun dengan rata-rata produksi yang menurun sama halnya dengan komoditas Jagung.



Tabel 1. 12 Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2019-2020

Jenis	Produksi (ton)		Luas Panen (ha)		Rata-rata Produksi (kw/ha)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Padi	13.992,00	12.150,60	2.088,00	1.841	67,01	66
Jagung	32.196,00	34.993,00	4.534,00	4.999	71,01	70
Bawang Merah	4.556,10	5.245,43	510,00	599	89,34	87.72

Keterangan : Produksi jagung dalam bentuk tongkol kering

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Tahun 2021

b. Perkebunan

Perkebunan bukan merupakan komoditas utama di Kota Probolinggo mengingat Kota Probolinggo tidak termasuk kategori wilayah yang memiliki lahan perkebunan, sehingga usaha perkebunan rakyat hanya sebatas usaha sampingan sebagai penunjang kehidupan keluarga saja. Adapun Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2020 sebagaimana data tabel dibawah ini.

Tabel 1. 13 Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2020

Jenis	Produksi (ton)		Luas Panen (ha)	
	2019	2020	2019	2020
Tembakau	0	0	0	0
Tebu	1661,06	1.568,7	21,547	20.366
Kelapa	14,5	12.53	72,79	56.43
Kapuk Randu	0,16	0.08	3,23	2.22

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Tahun 2021

Komoditas tembakau di Kota Probolinggo sudah tidak ada lagi sejak tahun 2017. Untuk komoditas tebu, luas panen dan tingkat produksi cenderung terus menurun dalam kurun waktu dua tahun terakhir walaupun tidak signifikan dan masih menjadi potensi komoditas unggulan perkebunan Kota Probolinggo. Sedangkan untuk Komoditas kelapa dan kapuk randu juga cenderung mengalami penurunan dari sisi luas panen dan produksi dari tahun ke tahun yang signifikan.

c. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Probolinggo. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, potensi peternakan di Kota Probolinggo Tahun 2019 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel 1.14 dibawah ini. Untuk jenis sapi potong, terdapat kenaikan populasi akan tetapi dengan penurunan produksi daging pada Tahun 2020. Untuk jenis sapi perah tidak terdapat kenaikan signifikan jumlah populasi akan tetapi dengan peningkatan produksi susu yang tergolong signifikan dari sisi produktivitas ternak. Untuk jenis kambing dan domba dengan penurunan jumlah populasi yang diimbangi dengan peningkatan produksi daging yang signifikan pada Tahun 2020. Untuk jenis ayam buras, terdapat peningkatan baik dari sisi jumlah populasi maupun produksi daging dan telur. Sedangkan untuk ayam ras petelur dan ayam ras pedaging mengalami penurunan populasi yang signifikan, akan tetapi untuk produksi daging dan telur



ayam ras petelur tetap mengalami peningkatan, berbeda dengan ayam ras pedaging yang juga mengalami penurunan signifikan dari sisi produksi daging. Untuk jenis Itik dan entog mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah populasi maupun produksi daging dan telur. Sedangkan untuk merpati dan angsa mengalami penurunan jumlah populasi pada tahun 2020.

Tabel 1. 14 Data Produksi Peternakan Tahun 2019-2020

JENIS TERNAK	JUMLAH POPULASI		DAGING		TELUR		SUSU	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Sapi Potong	10.764	10.934	492.577	422.340				
Sapi Perah	223	224					450.577	461.153
Kambing	8.177	3.226	34.369	37.542				
Domba	9.815	5.427	148.522	149.332				
Kuda	12	13						
Ayam Buras	83.701	85.139	95.811	96.027	56.078	57.194		
Ayam Ras Petelur	15.700	12.000	1.885	6.003	141.377	140.946		
Ayam Ras Pedaging	56.100	31.000	1.639.514	1.398.176				
Itik	887	976	23.556	25.668	6.502	6.722		
Entog	298	372			370	475		
Puyuh	150				615			
Kelinci	149	180						
Merpati	2.383	2.235						
Angsa	105	96						

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Tahun 2021

2. Perikanan

Potensi Perikanan laut di Kota Probolinggo memiliki peluang yang sangat besar untuk dioptimalkan. Peluang ini melihat dari letak geografis Kota Probolinggo yang berbatasan langsung dengan Selat Madura dengan panjang pantai 7 km. Namun dalam kurun dua tahun terakhir ini perikanan tangkap dan budidaya mengalami penurunan, untuk perikanan tangkap dikarenakan oleh cuaca buruk dan tidak menentu serta jumlah armada perikanan (Kapal Balai) yang mengalami penurunan. Sedangkan penurunan produksi budidaya terjadi dikarenakan sering terjadi hujan deras yang mengakibatkan pematang tambak jebol sehingga terjadi gagal panen dan menyebabkan produksi budidaya air payau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut ini data produksi perikanan di Kota Probolinggo dalam kurun waktu Tahun 2019-2020



Tabel 1. 15 Data Produksi Perikanan Tahun 2019-2020

JENIS	2019	2020
Perikanan Tangkap		
Jumlah Produksi (Ton)	17.782,20	12.720,4
Nilai Produksi (Rp)	299.264.770.000	189.656.544.808
Perikanan Budidaya		
Jumlah Produksi (Ton)	394,44	311,586
Nilai Produksi (Rp)	7.854.695.000	7.180.241.000

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Tahun 2021

3. Pendidikan :

Tingkat Pendidikan suatu daerah akan mencerminkan kualitas penduduk daerah tersebut. Dalam proses pembangunan peranan pendidikan sangatlah strategis, pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Saat ini pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk, sehingga upaya mencerdaskan penduduk melalui pendidikan merupakan kewajiban dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dalam hal ini diharapkan jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka program wajib belajar semakin luas dan terjangkau. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Fasilitas pendidikan sebagai sarana belajar mengajar untuk kepentingan pelayanan pendidikan masyarakat di Kota Probolinggo secara umum telah tersedia (dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah). Berikut ini data fasilitas Pendidikan Dasar Menengah di Kota Probolinggo.

Tabel 1. 16 Data Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Probolinggo Tahun 2020

NO	VARIABEL	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK		Jumlah Prasarana 2020
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	
1	Sekolah	114	114	48	47	45	45	204
2	Rombongan Belajar (Kelas)	923	927	465	459	545	545	1.920
3	Ruang Kelas	951	957	503	498	477	501	1.914
4	Perpustakaan	122	122	28	28	30	30	180
5	Ruang UKS	107	107	25	25	30	30	162
6	Ruang Komputer	71	71	29	29	41	41	141
7	Laboratorium	4	4	24	24	95	95	123
8	Ruang Olahraga	118	118	9	9	18	18	145

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Berdasarkan data prasarana pendidikan Tahun 2020, diketahui bahwa untuk jenjang pendidikan tingkat SD / MI terdapat penurunan prasarana berupa Rombongan Belajar serta Ruang Kelas. Untuk jenjang pendidikan tingkat SMP / MTS terdapat penurunan prasarana berupa sekolah dan ruang kelas. Sedangkan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA / SMK tidak terdapat penurunan prasarana pada Tahun 2020.



4. Industri

Pembangunan sektor industri di Kota Probolinggo selama Tahun 2019-2020 menunjukkan kinerja positif. Sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan telah menempatkan industri manufaktur sebagai penghela sektor riil. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha industri, nilai produksi dan nilai investasi yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu dua tahun terakhir (kecuali untuk jenis Industri alat transportasi elektronika dan telematika / IATT yang jumlahnya tetap). Peningkatan unit usaha, produksi dan investasi sektor industri ini menunjukkan bahwa terdapat sektor ini menjadi salah satu penggerak perekonomian Kota Probolinggo yang juga tidak terdampak lesunya perekonomian karena pandemi covid-19 pada Tahun 2020. Adapun data Perkembangan sektor industri dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. 17 Data Profil Industri Tahun 2019 – 2020

JENIS	2019	2020
Industri agro dan kimia (IAK)	986 unit	1.004 unit
Industri logam, mesin, tekstil dan aneka (ILMTA)	165 unit	166 unit
Industri alat transportasi elektronika dan telematika (IATT)	11 unit	11 unit
Total Industri	1.162 unit	1.1810 unit
Nilai produksi	3.479.689.872.885	3.604.610.739.322
Nilai Investasi	199,834,831,184	200,088,387,807

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Tahun 2021

5. Kelistrikan

Listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Untuk Kota Probolinggo telah memiliki rasio elektrifikasi 100%, yang berarti bahwa seluruh masyarakat sudah terakses oleh Jaringan Listrik yang disediakan oleh PLN. Berdasarkan data BPS, jumlah pelanggan listrik PLN Kota Probolinggo pada periode Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar 3,49%. Hal ini selaras dengan perkembangan pembangunan di kota Probolinggo baik untuk rumah tinggal, komersil, perkantoran maupun sarana umum lainnya yang membutuhkan peningkatan kebutuhan sambungan listrik baru serta kebutuhan penambahan daya.

Tabel 1. 18 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2019-2020

KECAMATAN	2019	2020
Kademangan	14.369	14.881
Kedopak	20.752	21.431
Wonoasih	11.357	11.989
Mayangan	21.273	21.794
Kanigaran	9.311	9.657
Total	77.062	79.752

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2021, BPS



6. Air Minum

Kapasitas air bersih yang dapat disediakan atau yang diproduksi secara keseluruhan dan cakupan layanannya PDAM Kota Probolinggo selama kurun waktu tahun 2019 – 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. 19 Profil Penyediaan Air Bersih Tahun 2019-2020

NO	VARIABEL	2019	2020
1	Kapasitas Air Bersih yang disediakan / diproduksi	8.722.300 m ³	8.431.000 m ³
2	Kapasitas Air Bersih yang disalurkan	4.967.914 m ³	4.823.565 m ³
3	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	19.938	19.997
4	Jumlah Pelanggan	19.938	19.997
5	Cakupan Pelayanan (%)	59,62	58,91

Sumber : PDAM, Tahun 2021

Berdasarkan data PDAM dimaksud, diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah sambungan rumah, jumlah pelanggan dan cakupan pelayanan PDAM selama dua tahun terakhir. Hal ini selaras dengan perkembangan pembangunan dan kesadaran serta kebutuhan untuk peningkatan akses terhadap air bersih yang aman oleh masyarakat, baik itu untuk perumahan, sarana umum, sarana komersil, perkantoran, dll. Walaupun dari sisi debit air terdapat penurunan Kapasitas Air Bersih yang disediakan / diproduksi dari tahun 2019 – 2020 sebesar 291.300 m³ serta kapasitas air bersih yang disalurkan sebesar 144.349 m³ akan tetapi masih dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

7. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang di Kota Probolinggo. Menyadari hal tersebut maka Pemerintah Kota Probolinggo mendorong penataan dan pembangunan pusat-pusat perdagangan yang ada. Data perkembangan pasar dan toko di Kota Probolinggo sebagaimana tabel dibawah ini. Dengan lesunya perekonomian nasional akibat pandemic Covid-19, sektor perdagangan terdampak adalah Toko Modern / swalayan yang mengalami penurunan signifikan hingga 70% diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat.

Tabel 1. 20 Perkembangan Pasar dan Toko di Kota Probolinggo Tahun 2019-2020

JENIS	2019	2020
Pasar Tradisional / Rakyat (Milik Pemerintah Kota Probolinggo)	11	11
Toko Modern /swalayan	10	3
Pasar Hewan (sapi,kambing)	1	1
Pasar Ikan	1	1

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Tahun 2021



8. UMKM

Data perkembangan jumlah UMKM di Kota Probolinggo dari tahun 2019 s.d 2020 bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. 21 Jumlah UMKM Kota Probolinggo Tahun 2019-2020

URAIAN	2019	2020
Usaha Mikro	6.035	21.211
Usaha Kecil	127	127
Usaha Menengah	36	36
TOTAL UMKM	6.198	21.374

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Tahun 2021

Dari data UMKM pada tabel 1.21 tidak terjadi peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah karena diketahui bahwa pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian masyarakat. Namun terjadi peningkatan signifikan dari jumlah usaha Mikro sebesar 251%. Hal dilatarbelakangi oleh kebijakan untuk menumbuhkan 500 UMKM baru per tahun sejak kepemimpinan Walikota yang baru guna merespon lesunya perekonomian global, serta keterbatasan lapangan pekerjaan sektor formal (industri dan perkantoran) dalam menampung pencari kerja di Kota Probolinggo. Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian sektor formal menyebabkan banyaknya peralihan mata pencaharian sektor usaha mandiri masyarakat yang mendorong inisiasi usaha mikro baru yang didukung kemudahan perijinan usaha baru serta adanya fasilitasi stimulan usaha dari pemerintah untuk UMKM.

9. Perizinan dan Penanaman Modal

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengangguran dan akan menjadi salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) di Kota Probolinggo pada Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 22 Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	NILAI INVESTASI	INVESTOR
1	2016	Rp 740.612.581.171	64
2	2017	Rp 4.121.827.395.289	69
3	2018	Rp 3.552.447.161.184	41
4	2019	Rp 4.444.684.564.917	52
5	2020	Rp 6.116.025.342.540	40

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2021

Adanya pandemi Covid-19 yang juga ditetapkan sebagai bencana non alam nasional tidak berdampak signifikan terhadap sektor investasi Kota Probolinggo. Terdapat peningkatan nilai



Investasi pada Tahun 2020 sebesar 37,60% walaupun secara jumlah investor mengalami penurunan sebanyak 23,08%.

10. Perbankan

Kinerja perbankan di Kota Probolinggo yang sebelumnya menunjukkan kecenderungan meningkat selama kurun waktu 2015 – 2019 dengan adanya perkembangan ekonomi nasional serta berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dengan menciptakan iklim yang lebih baik bagi perkembangan usaha dibidang Perbankan di Indonesia pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang diindikasikan juga sebagai dampak lesunya perekonomian global akibat pandemi Covid-19. Terdapat penurunan 2 unit perbankan di Kota Probolinggo pada periode Tahun 2019- 2020 untuk kategori Bank Pemerintah Daerah.

Tabel 1. 23 Jumlah Bank Menurut Kepemilikan di Kota Probolinggo Tahun 2017-2020

NO	Kepemilikan	2017	2018	2019	2020
1	Bank Pemerintah	14	15	16	16
2	Bank Pemerintah Daerah	2	2	2	0
3	Bank Swasta Nasional	7	7	7	7
4	Bank Swasta Regional	-	-	-	-
Total		23	24	25	23

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2021, BPS

11. Transportasi

Pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Probolinggo didukung pula dengan pembenahan Infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kota Probolinggo serta sarana transportasi yang ada di Probolinggo seperti Terminal Bus Bayuangga, Stasiun Kereta Api Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang merupakan merupakan ujung tombak fasilitas transportasi Kota Probolinggo. Modal transportasi dalam kota seperti *shuttle travel*, angkutan dalam kota yang merupakan angkutan jarak dekat, becak dan ojek memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat lebih cepat menuju tempat tujuan. Berdasarkan data Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2021, diketahui bahwa dari total panjang jalan di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 sebesar 225,72 km, terdapat jaringan jalan sepanjang 2,9 km dalam kondisi rusak dan rusak berat, sepanjang 17,2 km dalam kondisi sedang, sedangkan sisanya sepanjang 205,62 km dalam kondisi baik.

12. Pariwisata

Kota Probolinggo merupakan kota transit yang menghubungkan kota-kota di wilayah sebelah barat dan timur di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam perkembangannya Kota Probolinggo telah berkembang menjadi kota tujuan wisata, hiburan dan kuliner, dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan karenamenjaditempat transit bagi wisatawan yang



akan melakukan perjalanan dari kota-kota di Jawa dan Bali. Selain itu Kota Probolinggo juga telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru sehingga mampu meningkatkan promosi potensi wisata dan jumlah kunjungan wisata Kota Probolinggo. Berikut potensi wisata yang ada di Kota Probolinggo.

Tabel 1. 24 Potensi Wisata Kota Probolinggo

No.	Jenis Obyek Wisata	Nama Obyek Wisata	Alamat
1	Wisata Alam	Sumber Mata Air Sentong	Jl. Ranu, Jrebeng Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67233
		Pantai Permata	Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67221
2	Wisata Budaya	Museum Probolinggo	Jl. Suroyo, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211
		Museum Dr. Moh Saleh	Jl.DR.Moh.Saleh No 1, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
3	Wisata Religi	Gereja Merah	Jl. Suroyo No.32, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Klenteng Tri Dharma	Jl. Wr. Supratman No.127, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
4	Wisata Buatan	Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217 Jawa Timur, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Kolam Renang Bayuangga	Jl. Hayam Wuruk, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Kolam Renang Olympic	Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231
		Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL)	Jl. Basuki Rachmad, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Bee Jay Bakau Resort (BJBR)	Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217 Jawa Timur, Indonesia, Wisata Primadona, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2021

Upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kota Probolinggo bukan tanpa alasan karena sesuai dengan data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2020 tercatat jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Probolinggo dari Tahun 2019-2020 terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini merupakan dampak dari Covid 19 yang berdampak pada penurunan pengunjung wisatawan baik domestik maupun mancanegara hingga sebesar 56,29%. Berikut tabel kunjungan wisatawan di Kota Probolinggo.

Tabel 1. 25 Kunjungan Wisata Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2020

No.	Uraian	2019	2020
1	Wisatawan Domestik	1.084.317	474.615
2	Wisatawan Mancanegara	1.698	69
	Total Wisatawan	1.086.015	474.684

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2021

Melihat potensi tersebut Pemerintah Kota Probolinggo melakukan langkah-langkah dalam rangka mengembangkan wisata di Kota Probolinggo diantaranya wisata budaya, wisata religi dan



wisata buatan yang diharapkan dapat menjadikan Kota Probolinggo sebagai tempat tujuan wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara dengan paket wisata yang terintegrasi dengan KSPN BTS (Bromo Tengger Semeru) yang diwacanakan secara nasional.

1.3.3.2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo baik Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 pada periode Tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi pertumbuhan ekonomi hingga 5,94%. Akan tetapi pada periode Tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga -3,64% sebagai dampak dari bencana non alam nasional Pandemi Covid-19 yang menuntut adanya pembatasan sosial berskala besar dan menghambat aktifitas perekonomian global. Data Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 26 Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB (ADHB) juta Rp	8.888.110	9.660.040	10.521.390	11.349.180	11.074.500
PDRB (ADHK) juta Rp	7.018.290	7.430.620	7.871.380	8.338.770	8.035.270
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,88	5,88	5,93	5,94	-3,64
Jumlah Penduduk (jiwa)	231.112	233.123	235.211	237.208	239.649
PDRB ADHB per kapita (Juta Jiwa)	38.46	41.43	44.73	47.84	46.21
Inflasi (persen)	1,53	3,18	2,18	1,99	1,88
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,01	3,42	3,56	4,25	6,70

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2021, BPS

Untuk menggambarkan trend pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 1. 9 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo
Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2021, BPS



Menurut data dari BPS, laju pertumbuhan PDRB Kota Probolinggo Tahun 2016 – 2019 dengan peningkatan setiap tahunnya walaupun tidak secara signifikan. Pada periode tahun 2016 – 2017 tidak terdapat peningkatan perekonomian, tetap pada kisaran 5,88%. Akan tetapi pada periode tahun 2017 – 2019 terdapat peningkatan perekonomian hingga 0,06%. Penurunan secara signifikan terjadi pada periode Tahun 2019 – 2020 hingga sebesar 9,58% sebagai dampak penurunan ekonomi global akibat pandemic covid-19 dimana laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2020 menjadi -3,64%.

Menurut data dari BPS Kota Probolinggo inflasi di Kota Probolinggo pada tahun 2016 mencapai 1,53% mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2017. Inflasi tahun 2017 mencapai 3,18%. Akan tetapi pada Tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 2,18, jauh lebih rendah daripada laju inflasi Provinsi Jawa Timur. Apabila dilihat dari kelompok pengeluaran : inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan sebesar 3,11% dan inflasi terendah pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,13%.

Seiring berubahnya jumlah lapangan usaha dalam perhitungan PDRB dengan SNA 2008, menyebabkan distribusi peranan lapangan usaha di Kota Probolinggo mengalami perubahan. Menurut data dari BPS selama kurun waktu empat tahun terakhir, sumbangan terbesar dihasilkan oleh sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.



Tabel 1. 27 Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo (miliar rupiah) Tahun 2016–2020

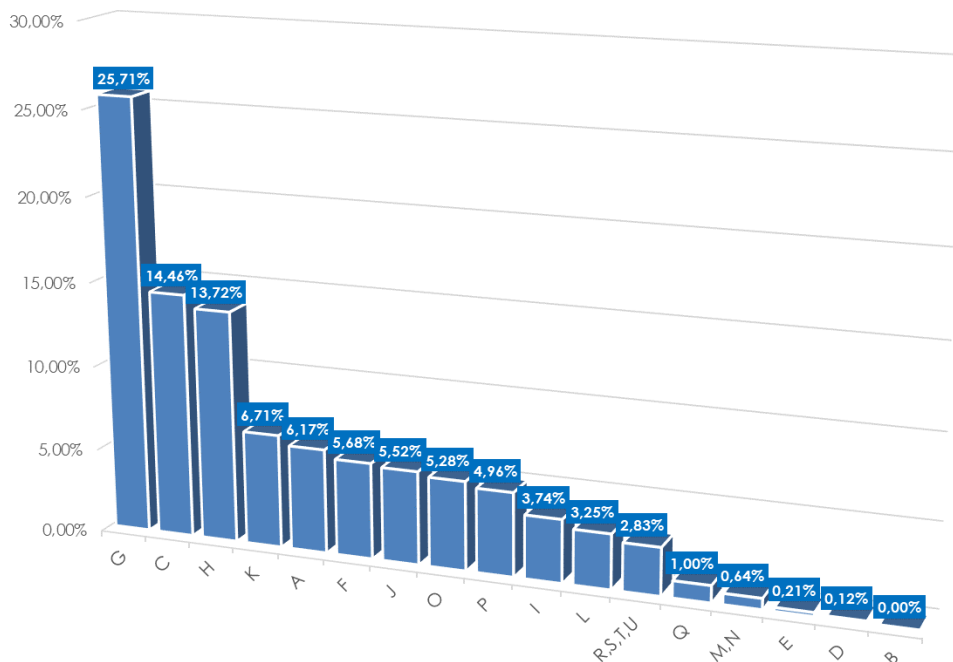
NO	LAPANGAN USAHA	ADHK					ADHB				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	443,80	455,97	451,98	455,26	450,75	595,00	635,56	659,67	679,87	683,16
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	1.141,33	1.202,83	1.274,09	1.290,72	1.230,07	1.364,62	1.469,93	1.596,90	1.659,26	1.601,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,35	8,65	8,94	9,40	9,28	9,83	11,49	12,33	13,14	12,90
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16,51	17,59	18,35	19,18	19,99	19,43	21,03	22,12	22,75	23,77
F	Konstruksi	426,80	461,01	494,67	529,84	495,68	541,54	592,64	640,54	669,87	629,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.710,44	1.825,58	1.945,45	2.080,21	1.960,80	2.254,30	2.461,11	2.724,35	2.968,05	2.846,72
H	Transportasi dan Pergudangan	959,82	1.027,95	1.103,01	1.206,48	1.140,33	1.169,75	1.305,84	1.427,32	1.595,52	1.519,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	234,35	254,92	275,00	295,52	270,61	338,89	376,71	410,80	446,63	414,18
J	Informasi dan Komunikasi	417,87	448,36	479,63	518,57	556,63	440,92	481,05	514,81	563,27	611,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	427,17	441,97	464,77	489,46	488,74	601,37	646,38	699,83	742,65	742,98
L	Real Estat	216,89	227,66	242,19	258,41	265,79	266,70	286,06	317,95	347,49	359,96
M,N	Jasa Perusahaan	44,70	47,40	50,86	54,59	50,99	55,68	60,89	67,99	74,55	70,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	338,44	349,94	364,73	380,26	366,19	440,05	469,28	520,17	577,12	584,27
P	Jasa Pendidikan	329,26	344,39	363,40	392,46	406,64	420,33	448,18	479,23	524,86	549,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	62,10	65,55	70,62	76,42	83,35	77,15	84,09	90,73	100,09	110,49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	240,47	250,83	263,71	281,99	239,43	292,55	309,79	336,65	364,03	313,27
	PDRB	7.018,30	7.430,60	7.871,40	8.338,77	8.035,27	8.888,11	9.660,03	10.521,39	11.349,15	11.074,50

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2021, BPS



Besaran PDRB dan pendapatan perkapita merupakan indikator yang dapat digunakan mengukur kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 – 2020) nilai PDRB Kota Probolinggo menunjukkan tren kenaikan sebesar 5,5% tiap tahunnya kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 3,78% dari Tahun 2019. Hal tersebut diindikasikan terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas perekonomian. Beberapa sektor yang diindikasikan mengalami penurunan kontribusi antara lain adalah: jasa lainnya, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan serta konstruksi.

Ditinjau dari lapangan usaha, kontribusi terbesar terhadap PDRB kota probolinggo tahun 2020 adalah sektor: (1) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 25,71%, (2) industri pengolahan (14,46%), (3) transportasi dan pergudangan (13,72%). Dengan PDRB per kapita harga berlaku pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 46,21 juta.



Gambar 1. 10 Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Atas Harga Berlaku Kota Probolinggo Tahun 2020
Keterangan:

- G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- C Industri Pengolahan
- H Transportasi dan Pergudangan
- K Jasa Keuangan dan Asuransi
- A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- F Konstruksi
- J Informasi dan Komunikasi
- O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- P Jasa Pendidikan
- I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- L Real Estat
- R,S,T,U Jasa Lainnya
- Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- M,N Jasa Perusahaan
- E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
- D Pengadaan Listrik dan Gas
- B Pertambangan dan Penggalian



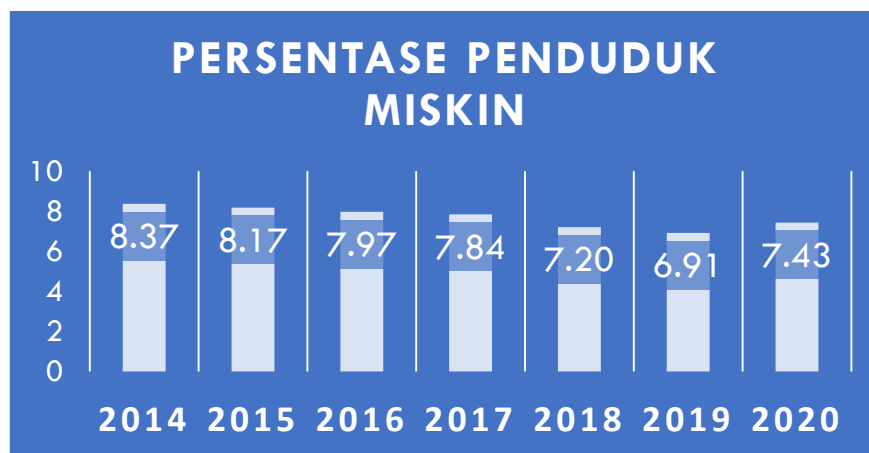
1.3.3.3 Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kota Probolinggo, persentase penduduk miskin di Kota Probolinggo tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,52 persen poin, yaitu dari 6,91 persen menjadi 7,43 persen. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Tahun 2020 adalah sebesar: 0,28, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) : 1,19, dengan garis kemiskinan tahun 2020 sebesar Rp. 524.528,00. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2020 diindikasikan salah satunya disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian masyarakat, termasuk adanya pemutusan hubungan kerja.

Tabel 1. 28 Jumlah Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2017 – 2020

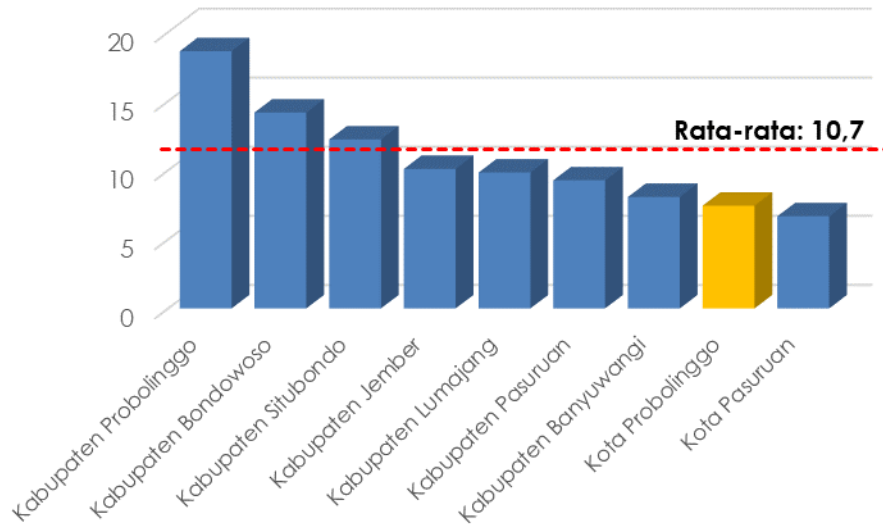
No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
3	2017	18,23	7,84
4	2018	16,90	7,20
5	2019	16,37	6,91
6	2020	17,72	7,43

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2021, BPS



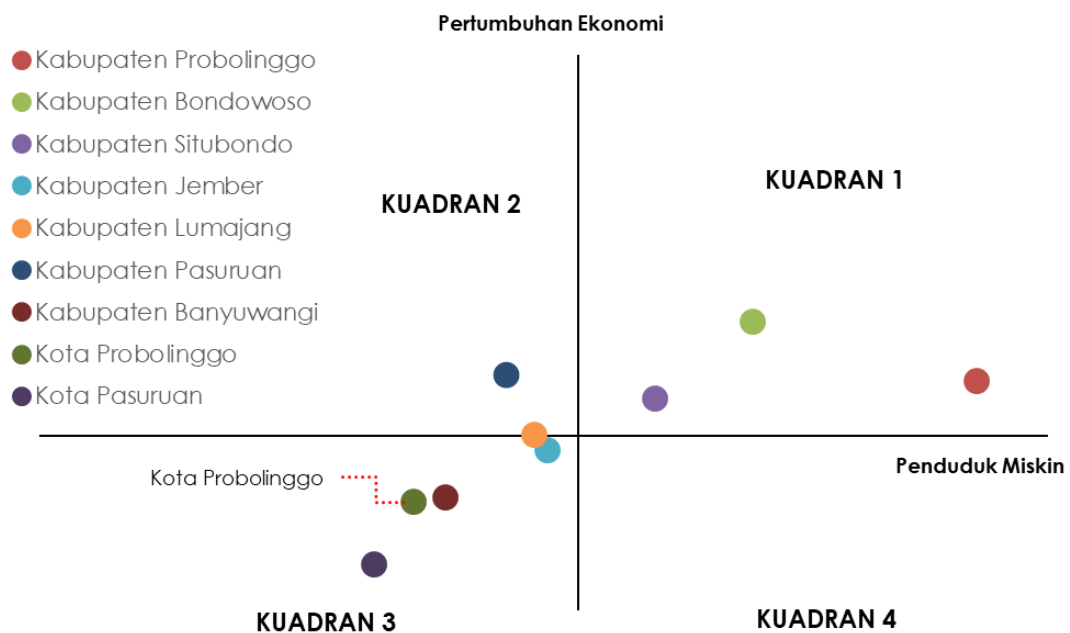
Gambar 1. 11 Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2020

Secara regional di wilayah Pandalungan, persentase penduduk miskin di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 menempati urutan kedua terendah setelah Kota Pasuruan. Sedangkan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar adalah Kabupaten Probolinggo.



Gambar 1. 12 Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Pendalungan Tahun 2020

Bila dikaitkan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan maka Kota Probolinggo termasuk dalam Kuadran 3 bersama dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten/Kota yang masuk dalam Kuadran 3 merupakan wilayah-wilayah dengan karakteristik pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dengan jumlah penduduk miskin rendah.



Gambar 1. 13 Diagram Pertumbuhan Ekonomi dan Penduduk Miskin di Wilayah Pendalungan Tahun 2020

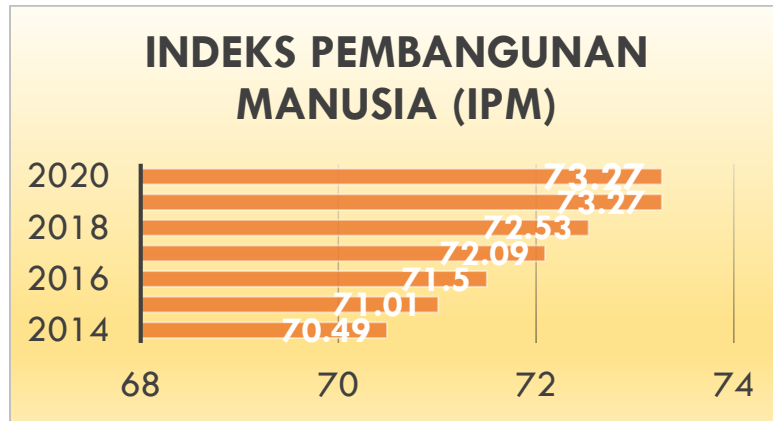
1.3.4 Kondisi Sosial

1.3.4.1 Kualitas SDM

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas sumberdaya manusia daerah adalah nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berdasarkan data BPS nilai IPM Kota Probolinggo selama Tahun 2017-2020 menunjukkan peningkatan dimana pada Tahun 2020 nilai IPM Kota Probolinggo sebesar 73.27. Adapun jika ditinjau dari komponen pembentuk IPM, diketahui bahwa Usia Harapan Hidup



Masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2020 sebesar 70,29 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 13,59 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,70 tahun, dan pengeluaran sebesar Rp. 12.180.000,00/kapita.

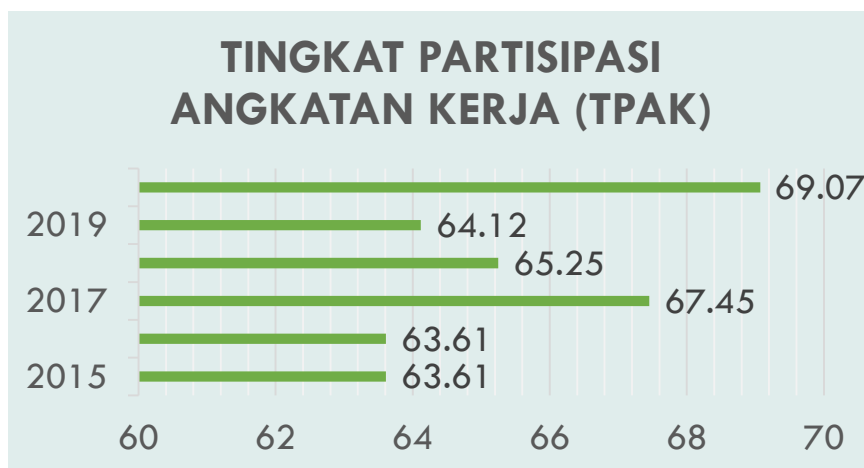


Gambar 1. 14 Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2017- 2020

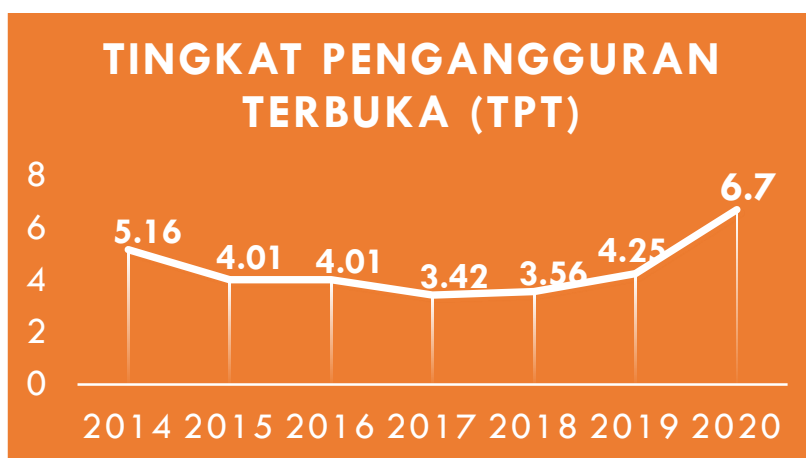
1.3.4.2 Ketenagakerjaan

Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS Kota Probolinggo (2021) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Probolinggo pada Tahun 2020 adalah sebesar 69,07% atau mengalami kenaikan disbanding Tahun 2019 yang yang sebesar 64,12%. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2020 adalah sebesar 6,70%, dimana angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Tahun 2019 yang sebesar 4,25%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo Tahun 2020 sebesar 6.7, meningkat 2,45 dibandingkan Tahun 2019. Hal ini dipengaruhi banyaknya lulusan SMA / SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan tidak tertampung dalam lapangan kerja yang tersedia di Kota Probolinggo.



Gambar 1. 15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Probolinggo Tahun 2015- 2020



Gambar 1. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo Tahun 2014- 2020

1.3.5 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pada dasarnya pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan daerah yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun daerah. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana perimbangan, juga dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diharapkan tetap meningkat sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif terutama saat perekonomian sedang lesu.

Target dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.29 di bawah ini :

Tabel 1. 29 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2020

No.	URAIAN	TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	PENDAPATAN DAERAH	922.401.711.702,66	922.551.472.879,19	100,02%
1	Pendapatan Asli Daerah	172.577.213.110,66	183.700.229.230,19	106,46%
	Hasil Pajak Daerah	39.188.106.888,00	38.425.937.211,00	98,06%
	Hasil Retribusi Daerah	12.531.305.329,00	12.628.253.989,55	100,77%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.077.932.843,66	1.704.846.568,40	82,05%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.779.868.050,00	130.941.191.461,24	110,24%
2	Dana Perimbangan	610.198.050.014,00	601.543.218.884,00	98,58%
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55.578.718.000,00	80.432.170.677,00	144,72%
	Dana Alokasi Umum	440.456.818.000,00	438.274.640.000,00	99,50%
	Dana Alokasi Khusus	114.162.514.014,00	82.836.408.207,00	72,56%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	139.626.448.578,00	137.308.024.765,00	98,34%
	Pendapatan Hibah	22.673.610.000,00	22.673.610.000,00	100,00%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	76.314.956.578,00	73.996.532.765,00	96,96%



No.	URAIAN	TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	935.219.000,00	935.219.000,00	100,00%
	Pendapatan Lainnya	39.702.663.000,00	39.702.663.000,00	100,00%

Sumber Data : BPPKAD Kota Probolinggo,2021 (non audited)

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah Tahun 2020 mencapai target bahkan lebih, yakni sebesar 100,02% dari target pendapatan daerah sebesar Rp. 922.401.711.702,66 dengan realisasi pendapatan daerah Rp. 922.551.472.879,19. Postur pendapatan pada Tahun 2020 didominasi oleh Dana Perimbangan sebesar (65,21%) dimana 72,86% dari Dana Perimbangan tersebut merupakan Dana Alokasi Umum (DAU). Adapun kontribusi PAD pada Tahun 2020 adalah sebesar 19,91% yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.3.6 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan.

Secara umum target dan realisasi belanja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan pada tabel 1.30 sebagai berikut:

Tabel 1. 30 Target dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2020

No.	URAIAN	TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	BELANJA DAERAH	1.082.004.882.500,62	877.667.480.575,35	81,11%
1	Belanja Tidak Langsung	474.918.012.841,68	416.958.460.487,37	87,80%
	Belanja Pegawai	375.377.402.733,07	361.515.129.238,00	96,31%
	Belanja Hibah	18.819.554.000,00	17.372.255.939,37	92,31%
	Belanja Bantuan Sosial	2.700.000.000,00	2.049.785.000,00	75,92%
	Bantuan Keuangan	819.897.545,00	819.897.545,00	100,00%
	Belanja Tidak Terduga	77.201.158.563,61	35.201.392.765,00	45,60%
2	Belanja Langsung	607.086.869.658,94	460.709.020.087,98	75,89%
	Belanja Pegawai	29.807.509.212,00	26.756.647.500,00	89,76%
	Belanja Barang dan Jasa	434.960.750.829,93	347.940.951.313,04	79,99%
	Belanja Modal	142.318.609.617,01	86.011.421.274,94	60,44%

Sumber Data : BPPKAD Kota Probolinggo,2021 (non audited)

Realisasi belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 877.667.480.575,35, dengan demikian capaian realisasi belanja daerah pada Tahun 2020 adalah sebesar 81,11% dari target Rp. 1.082.004.882.500,62. Postur belanja pada Tahun 2020 meliputi: 52,49% untuk belanja langsung dan 47,51% untuk belanja tidak langsung. Pos anggaran terbesar adalah pada belanja pegawai sebesar 41,19% dari total belanja.



1.3.3 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Selain pendapatan dan belanja daerah, juga dilaporkan pembiayaan daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam struktur APBD. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 1. 31 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA. 2020

No	Uraian	2020	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp) *)
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	169.603.170.797,96	169.603.170.797,96
2.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	169.603.170.797,96	169.603.170.797,96
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
4.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	159.603.170.797,96	159.603.170.797,96

Sumber Data : BPPKAD Kota Probolinggo (non audited)

**BAB 2****PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun target dan realisasi anggaran hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini : Tabel 2. 1



Tabel 2. 1 Target dan Realisasi Anggaran TA. 2020

Satuan kerja : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.963.500,00	26.933.500,00	70,95
JUMLAH PENDAPATAN	37.963.500,00	26.933.500,00	70,95
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	133.290.777.696,85	131.345.694.093,00	98,54
BELANJA LANGSUNG	62.325.985.175,71	53.863.121.549,70	86,42
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	4.248.648.800,00	2.723.599.318,00	64,11
Pengelolaan Administrasi Keuangan	1.584.539.000,00	764.832.965,00	48,27
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	2.128.777.800,00	1.511.739.203,00	71,01
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	535.332.000,00	447.027.150,00	83,5
Peningkatan Mutu Dan Akses PAUD Dan Pendidikan Non Formal	3.830.694.300,00	3.436.070.212,00	89,7
Peningkatan Mutu Kurikulum PAUD	140.620.350,00	130.928.500,00	93,11
Peningkatan Mutu Kurikulum Pendidikan Non Formal	121.740.000,00	109.237.000,00	89,73
Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD	38.328.000,00	30.353.000,00	79,19
Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal	95.839.500,00	73.642.000,00	76,84
Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Karakter PAUD	216.259.250,00	163.508.000,00	75,61
Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Non Formal	2.728.720.700,00	2.498.682.510,00	91,57
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	256.446.000,00	253.531.650,00	98,86
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	157.740.500,00	113.240.052,00	71,79
Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta	75.000.000,00	62.947.500,00	83,93
Peningkatan Mutu Dan Akses Pendidikan Dasar	50.262.437.650,71	44.514.818.604,70	88,56
Peningkatan Mutu Kurikulum Sekolah Dasar	862.117.100,00	804.403.250,00	93,31
Peningkatan Mutu Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	964.049.900,00	893.556.400,00	92,69
Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	469.411.100,00	379.642.500,00	80,88
Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	705.044.000,00	656.203.129,00	93,07
Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar	780.992.000,00	409.413.000,00	52,42
Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama	784.249.000,00	340.030.000,00	43,36
Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP	12.696.918.500,00	10.743.511.587,00	84,62
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar	4.975.080.000,00	4.847.545.832,00	97,44
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Menengah Pertama	2.794.859.000,00	2.715.992.539,81	97,18
Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri	25.229.717.050,71	22.724.520.366,89	90,07
Pengembangan Keprofesionalisme Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.504.923.500,00	1.300.738.450,00	86,43
Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Nonformal	524.610.500,00	419.417.500,00	79,95
Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	980.313.000,00	881.320.950,00	89,9
Pelestarian dan Pengelolaan Keragaman Budaya	2.479.280.925,00	1.887.894.965,00	76,15
Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum	428.242.200,00	396.954.165,00	92,69
Pembinaan Sejarah dan Tradisi	385.658.000,00	323.490.139,00	83,88
Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	1.065.380.725,00	967.714.661,00	90,83



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya	600.000.000,00	199.736.000,00	33,29
JUMLAH BELANJA	195.616.762.872,56	185.208.815.642,70	94,68

Satuan kerja : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.484.978.050,00	12.100.530.356,09	73,4
JUMLAH PENDAPATAN	16.484.978.050,00	12.100.530.356,09	73,4
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.750.862.315,00	24.295.991.524,00	98,16
BELANJA LANGSUNG	127.622.305.591,40	72.116.618.727,34	56,51
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	4.778.304.177,00	3.106.185.819,10	65,01
Pengelolaan Administrasi Keuangan	455.932.040,00	382.776.500,00	83,95
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	4.220.118.137,00	2.684.383.819,10	63,61
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	102.254.000,00	39.025.500,00	38,17
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	9.699.780.272,00	2.795.759.567,00	28,82
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	7.892.658.272,00	1.698.271.567,00	21,52
Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	152.936.000,00	63.206.000,00	41,33
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.329.436.000,00	1.034.282.000,00	77,8
Pelayanan Jaminan Persalinan	324.750.000,00	0	0
Pelayanan Dan Sumberdaya Kesehatan Akibat Dampak Rokok	5.660.633.200,00	4.353.727.750,00	76,91
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Rokok	1.400.005.200,00	917.752.000,00	65,55
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Akibat Dampak Rokok	128.000.000,00	0	0
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Promotif dan Preventif Akibat Dampak Rokok	4.132.628.000,00	3.435.975.750,00	83,14
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	11.305.646.014,00	8.026.717.790,00	71
Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Wonoasih	458.000.000,00	88.404.750,00	19,3
Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Ketapang	524.700.000,00	117.285.000,00	22,35
Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Kanigaran	717.500.000,00	125.700.000,00	17,52
Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Sukabumi	287.465.000,00	200.630.000,00	69,79
Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Jati	460.000.000,00	108.552.000,00	23,6
Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Kedopok	442.000.000,00	122.252.500,00	27,66
Management Batuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.641.275.014,00	7.161.179.760,00	93,72
Bantuan Operasional Distribusi Obat E-Logistik	24.094.000,00	19.338.780,00	80,26
Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan	750.612.000,00	83.375.000,00	11,11
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	5.450.823.750,00	1.418.649.250,00	26,03
Peningkatan Surveilans Dan Imunisasi	652.258.750,00	134.086.000,00	20,56
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	4.628.797.500,00	1.160.952.000,00	25,08
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	169.767.500,00	123.611.250,00	72,81
Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Akibat Dampak Rokok	2.016.500.261,00	888.793.000,00	44,08
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Akibat Dampak Rokok	788.760.261,00	159.025.000,00	20,16
Pelayanan Imunisasi, Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah Akibat Dampak Rokok	523.990.000,00	276.801.000,00	52,83
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Akibat Dampak Rokok	703.750.000,00	452.967.000,00	64,36
Jaminan Kesehatan Nasional	20.315.715.894,15	12.583.698.104,00	61,94



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Wonoasih	3.310.506.706,06	2.393.365.572,00	72,3
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ketapang	3.408.219.337,91	2.047.398.270,00	60,07
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kanigaran	5.171.166.220,66	2.916.470.445,00	56,4
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sukabumi	1.913.329.402,04	1.394.695.679,00	72,89
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Jati	3.558.148.618,07	1.831.451.952,00	51,47
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kedopok	2.954.345.609,41	2.000.316.186,00	67,71
Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Pustu Dan Jaringannya	492.230.300,00	322.702.998,00	65,56
Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	67.075.800,00	64.569.600,00	96,26
Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	425.154.500,00	258.133.398,00	60,72
Pembinaan Lingkungan Sosial	2.150.000.000,00	1.344.370.030,00	62,53
Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Wonoasih yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	25.000.000,00	23.650.000,00	94,6
Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Ketapang yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	25.000.000,00	24.750.000,00	99
Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Sukabumi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	25.000.000,00	24.970.000,00	99,88
Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Jati yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	25.000.000,00	23.144.000,00	92,58
Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kedopok yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	25.000.000,00	24.750.000,00	99
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kanigaran yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	25.000.000,00	23.980.000,00	95,92
Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	2.000.000.000,00	1.199.126.030,00	59,96
Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Akibat Dampak Rokok	2.578.752.800,00	1.114.168.700,00	43,21
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Akibat Dampak Rokok	1.052.126.000,00	637.204.400,00	60,56
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Akibat Dampak Rokok	955.076.800,00	398.159.300,00	41,69
Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Akibat Dampak Rokok	571.550.000,00	78.805.000,00	13,79
Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	60.861.437.843,25	34.890.301.026,24	57,33
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	6.745.889.152,00	2.288.136.393,27	33,92
Peningkatan Ketersediaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	5.363.157.000,00	4.615.087.662,00	86,05
Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Kesehatan	107.550.000,00	32.955.000,00	30,64
Peningkatan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan	1.767.790.680,00	1.658.547.799,00	93,82
Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Wonoasih	320.113.500,00	168.947.026,97	52,78
Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Ketapang	295.715.000,00	181.205.162,00	61,28
Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Kanigaran	108.284.500,00	96.316.321,00	88,95
Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Sukabumi	59.000.000,00	37.370.625,00	63,34
Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Jati	67.755.050,00	43.789.549,00	64,63
Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Kedopok	56.500.000,00	38.313.188,00	67,81
Pengelolaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	30.000.000,00	29.140.000,00	97,13



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pelayanan Kesehatan bagi Warga Kota Probolinggo	45.939.682.961,25	25.700.492.300,00	55,94
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.312.481.080,00	1.271.544.693,00	54,99
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan	157.910.500,00	154.047.000,00	97,55
Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	67.491.680,00	41.194.400,00	61,04
Pembinaan Keluarga Sejahtera Dan Pembangunan Keluarga	142.503.900,00	142.246.500,00	99,82
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Program Keluarga Berencana	568.607.000,00	496.417.011,00	87,3
Penunjang Operasional Keluarga Berencana	1.375.968.000,00	437.639.782,00	31,81
JUMLAH BELANJA	152.373.167.906,40	96.412.610.251,34	63,27

Satuan kerja : RSUD Dr Moh Saleh

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	92.000.000.000,00	107.319.007.306,41	116,65
JUMLAH PENDAPATAN	92.000.000.000,00	107.319.007.306,41	116,65
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.365.527.149,00	22.966.181.686,00	98,29
BELANJA LANGSUNG	155.049.265.468,78	121.664.216.787,70	78,47
Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr Moh Saleh	96.680.087.821,78	97.261.886.999,70	100,6
Pelayanan serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	96.680.087.821,78	97.261.886.999,70	100,6
Peningkatan Sarana Prasarana dan Layanan Rumah Sakit	52.769.177.647,00	19.698.335.364,00	37,33
Pengadaan Alat Kesehatan	0	0	0
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana RS Rujukan Nasional,Provinsi,dan Regional yang belum memenuhi standar Kelas13003	0	0	0
Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang belum memenuhi standar Kelas	0	0	0
Pembangunan Gedung Rumah Sakit Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	0
Pengadaan Alat dan Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit Bantuan Provinsi	0	0	0
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	959.432.100,00	609.973.600,00	63,58
Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya	13.829.112.947,00	10.434.960.487,00	75,46
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	4.078.289.600,00	2.451.281.911,00	60,11
Pembangunan Dan/Atau Peningkatan Gedung Sarana Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	17.000.000.000,00	0	0
Rehabilitasi Dan/Atau Renovasi Gedung Sarana Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	5.620.000.000,00	0	0
Penyediaan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit	6.902.343.000,00	3.532.920.699,00	51,18
Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	4.380.000.000,00	2.669.198.667,00	60,94
Pembinaan Lingkungan Sosial	5.600.000.000,00	4.703.994.424,00	84
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kanigaran yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	0	0	0
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama Dengan Badan	3.049.000.000,00	2.391.653.124,00	78,44



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan dan penunjang			
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	2.551.000.000,00	2.312.341.300,00	90,64
JUMLAH BELANJA	178.414.792.617,78	144.630.398.473,70	81,06

Satuan kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.340.308.750,00	695.592.286,05	51,9
JUMLAH PENDAPATAN	1.340.308.750,00	695.592.286,05	51,9
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.461.525.630,95	8.242.737.602,00	97,41
BELANJA LANGSUNG	74.858.041.673,75	55.448.268.513,26	74,07
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	8.809.465.320,00	6.531.384.892,00	74,14
Pengelolaan Administrasi Keuangan	1.588.070.772,00	973.565.266,00	61,3
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	3.626.787.176,00	2.514.914.626,00	69,34
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	3.594.607.372,00	3.042.905.000,00	84,65
Penataan Ruang Dan Bangunan	814.707.283,20	301.186.500,00	36,97
Perencanaan Tata Ruang	467.417.894,40	157.858.000,00	33,77
Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan	347.289.388,80	143.328.500,00	41,27
Pengembangan Dan Pengelolaan Keciptakarya	35.271.964.881,79	24.814.379.955,83	70,35
Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum serta Jasa Konstruksi	33.793.785.142,43	23.540.054.955,83	69,66
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	420.914.739,36	398.561.000,00	94,69
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik	1.057.265.000,00	875.764.000,00	82,83
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik	0	0	0
Pengembangan Dan Pengelolaan Kebinamargaan	22.881.931.077,96	18.737.172.265,43	81,89
Pembangunan Jalan dan Jembatan	5.314.027.500,00	4.225.072.920,44	79,51
Pengelolaan Jalan dan Jembatan	10.158.250.930,61	8.997.458.184,97	88,57
Pengelolaan Pematusan Jalan Kota	1.490.887.647,35	1.407.639.708,00	94,42
Peningkatan Jalan	326.565.000,00	201.440.000,00	61,68
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	5.592.200.000,00	3.905.561.452,02	69,84
Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Air	2.930.079.120,80	1.740.688.200,00	59,41
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	795.096.694,40	663.489.700,00	83,45
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	1.317.688.426,40	991.948.500,00	75,28
Penatagunaan Sumber Daya Air	99.710.000,00	85.250.000,00	85,5
Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa	717.584.000,00	0	0
Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.063.078.990,00	3.286.374.700,00	80,88
Fasilitasi Penyediaan Perumahan	100.630.490,00	95.681.000,00	95,08
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	2.208.500.000,00	1.856.724.200,00	84,07
Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Lingkungan Perumahan	726.000.000,00	669.503.500,00	92,22
Pengelolaan Rusunawa	1.027.948.500,00	664.466.000,00	64,64



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Penyelenggaraan Pertanahan	86.815.000,00	37.082.000,00	42,71
Fasilitasi dan Pengendalian Pertanahan	86.815.000,00	37.082.000,00	42,71
JUMLAH BELANJA	83.319.567.304,70	63.691.006.115,26	76,44

Satuan kerja : Satuan Polisi Pamong Praja

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.500.000,00	7.597.000,00	101,29
JUMLAH PENDAPATAN	7.500.000,00	7.597.000,00	101,29
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.734.932.032,00	5.690.169.172,00	99,22
BELANJA LANGSUNG	5.532.759.036,97	5.186.840.417,00	93,75
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	1.533.497.040,00	1.311.702.897,00	85,54
Pengelolaan Administrasi Keuangan	680.026.500,00	571.154.500,00	83,99
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	840.370.540,00	727.458.397,00	86,56
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	13.100.000,00	13.090.000,00	99,92
Penegakan PERDA dan PERKADA	85.579.500,00	83.579.500,00	97,66
Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran PERDA dan PERKADA	30.980.000,00	28.980.000,00	93,54
Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan PERDA dan PERKADA	54.599.500,00	54.599.500,00	100
Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Pengembangan Kapasitas SDM	3.344.859.500,00	3.229.739.100,00	96,56
Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.279.817.000,00	3.166.848.600,00	96,56
Pengembangan Sumberdaya Manusia Satpol PP	65.042.500,00	62.890.500,00	96,69
Perlindungan Masyarakat	102.320.000,00	102.220.000,00	99,9
Peningkatan Perlindungan Masyarakat	102.320.000,00	102.220.000,00	99,9
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	78.972.000,00	76.534.420,00	96,91
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Pita Cukai yang bukan Haknya, Pita Cukai yang salah Peruntukan, Pita Cukai Bekas dan Tanpa Pita Cukai Diperedaran dan Tempat Penjualan Eceran	78.972.000,00	76.534.420,00	96,91
Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	0	0	0
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan	0	0	0
Penanganan Kebakaran	387.530.996,97	383.064.500,00	98,85
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	387.530.996,97	383.064.500,00	98,85
JUMLAH BELANJA	11.267.691.068,97	10.877.009.589,00	96,53

Satuan kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.998.704.416,00	1.985.291.815,00	99,33
BELANJA LANGSUNG	1.196.278.797,00	1.063.292.573,00	88,88
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	658.665.297,00	604.738.073,00	91,81
Pengelolaan Administrasi Keuangan	56.425.000,00	48.625.000,00	86,18
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	596.850.297,00	550.723.073,00	92,27
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	5.390.000,00	5.390.000,00	100
Penanggulangan Bencana Daerah	537.613.500,00	458.554.500,00	85,29



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	187.345.000,00	131.316.000,00	70,09
Penanganan Kedaruratan dan Logistik	114.957.000,00	91.927.000,00	79,97
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	235.311.500,00	235.311.500,00	100
JUMLAH BELANJA	3.194.983.213,00	3.048.584.388,00	95,42

Satuan kerja : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.854.876.385,00	4.691.337.442,00	96,63
BELANJA LANGSUNG	3.531.680.129,00	3.057.589.710,00	86,58
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pemerintah	1.237.799.594,00	996.824.501,00	80,53
Pengelolaan Administrasi Keuangan	51.458.100,00	43.332.500,00	84,21
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.114.221.494,00	907.915.001,00	81,48
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	72.120.000,00	45.577.000,00	63,2
Pelayanan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	986.235.100,00	885.242.850,00	89,76
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	234.570.500,00	222.386.500,00	94,81
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	211.317.000,00	159.868.100,00	75,65
Perlindungan dan Jaminan Sosial	540.347.600,00	502.988.250,00	93,09
Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	478.654.950,00	438.180.559,00	91,54
Penanganan Fakir Miskin	115.184.500,00	110.097.000,00	95,58
Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	262.941.000,00	234.129.559,00	89,04
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	100.529.450,00	93.954.000,00	93,46
Pembinaan Lingkungan Sosial	300.474.000,00	300.322.000,00	99,95
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan wirausaha Mandiri bagi PMKS	100.700.000,00	100.693.000,00	99,99
Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	50.000.000,00	49.858.500,00	99,72
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Mandiri bagi Masyarakat	66.450.000,00	66.447.500,00	100
Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	83.324.000,00	83.323.000,00	100
Pemberdayaan Perempuan	175.491.560,00	126.422.500,00	72,04
Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	135.694.560,00	108.372.500,00	79,87
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	39.797.000,00	18.050.000,00	45,36
Perlindungan Perempuan dan Anak	144.802.425,00	134.717.000,00	93,04
Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	74.358.200,00	66.814.500,00	89,85
Pengarusutamaan Hak dan Tumbuh Kembang Anak	70.444.225,00	67.902.500,00	96,39
Pembinaan Lingkungan Sosial	161.247.500,00	129.814.800,00	80,51
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	161.247.500,00	129.814.800,00	80,51
Keberdayaan Masyarakat	46.975.000,00	46.065.500,00	98,06
Peningkatan Partisipasi Masyarakat	46.975.000,00	46.065.500,00	98,06
JUMLAH BELANJA	8.386.556.514,00	7.748.927.152,00	92,4



Satuan kerja : Dinas Penanaman Modal, PTSP, Dan Tenaga Kerja

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.400.000,00	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	14.400.000,00	0	0
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.203.988.477,14	6.801.528.382,00	94,41
BELANJA LANGSUNG	4.027.137.827,06	3.296.610.185,68	81,86
Penempatan, Perluasan, Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja	462.686.600,00	457.558.600,00	98,89
Penempatan dan Perluasan Kerja	209.045.400,00	207.278.500,00	99,15
Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja	158.009.300,00	155.007.400,00	98,1
Pengelolaan Balai Latihan Kerja	95.631.900,00	95.272.700,00	99,62
Pengembangan Hubungan Industrial Dan Perlindungan Tenaga Kerja	110.747.050,00	107.049.350,00	96,66
Penguatan Kelembagaan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	81.446.900,00	80.313.900,00	98,61
Fasilitasi Persyaratan Kerja, Pengupahan Dan Jaminan Sosial	29.300.150,00	26.735.450,00	91,25
Pembinaan Lingkungan Sosial	66.000.000,00	64.686.900,00	98,01
Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan	0	0	0
Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	66.000.000,00	64.686.900,00	98,01
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	2.949.970.227,06	2.283.016.085,68	77,39
Pengelolaan Administrasi Keuangan	170.301.000,00	162.866.000,00	95,63
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	2.730.321.227,06	2.070.842.085,68	75,85
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	49.348.000,00	49.308.000,00	99,92
Peningkatan Penanaman Modal	159.192.950,00	113.370.750,00	71,22
Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	26.380.000,00	16.580.000,00	62,85
Pengendalian Penanaman Modal	63.585.000,00	31.500.000,00	49,54
Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	69.227.950,00	65.290.750,00	94,31
Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	278.541.000,00	270.928.500,00	97,27
Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan	127.878.500,00	120.656.000,00	94,35
Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa	150.662.500,00	150.272.500,00	99,74
JUMLAH BELANJA	11.231.126.304,20	10.098.138.567,68	89,91

Satuan kerja : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.894.902.250,00	2.160.208.700,99	114
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.456.386.869,50	9.382.220.424,00	99,22
BELANJA LANGSUNG	7.350.104.023,00	6.906.588.427,00	93,97
Peningkatan Ketahanan Pangan	107.255.000,00	100.521.000,00	93,72
Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	9.125.000,00	9.085.000,00	99,56
Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	17.940.000,00	15.018.000,00	83,71
Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	80.190.000,00	76.418.000,00	95,3
Pembinaan Lingkungan Sosial	137.444.900,00	124.859.400,00	90,84
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat bagi Pelaku Agribisnis	85.450.000,00	76.305.000,00	89,3



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan dan Keterampilan Pangan Lokal	51.994.900,00	48.554.400,00	93,38
Pengembangan Perikanan Budidaya	487.487.546,00	456.434.800,00	93,63
Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya	86.634.168,00	86.181.000,00	99,48
Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan	93.232.368,00	92.802.200,00	99,54
Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan	307.621.010,00	277.451.600,00	90,19
Pengembangan Usaha Perikanan	816.677.264,00	791.974.311,00	96,98
Pengembangan dan Promosi Hasil Perikanan	127.234.752,00	126.259.500,00	99,23
Pengelolaan UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	689.442.512,00	665.714.811,00	96,56
Pengembangan Perikanan Tangkap	709.185.078,00	687.141.786,00	96,89
Pengembangan dan Fasilitasi Kenelayanan	86.815.252,00	86.140.000,00	99,22
Pengembangan Sumberdaya Ikan	68.092.168,00	67.638.000,00	99,33
Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Nelayan	199.495.000,00	199.050.000,00	99,78
Pengelolaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan	354.782.658,00	334.313.786,00	94,23
Pembinaan Lingkungan Sosial	447.587.500,00	423.462.134,00	94,61
Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	165.000.000,00	153.976.700,00	93,32
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pengolah dan Pemasar	150.000.000,00	140.182.400,00	93,45
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pembudidaya Ikan	132.587.500,00	129.303.034,00	97,52
Peningkatan Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah	2.131.379.420,00	1.960.796.296,00	92
Pengelolaan Administrasi Keuangan	464.067.196,00	439.413.000,00	94,69
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.545.813.720,00	1.399.940.296,00	90,56
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	121.498.504,00	121.443.000,00	99,95
Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	284.026.000,00	282.086.000,00	99,32
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	180.668.500,00	180.045.500,00	99,66
Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	103.357.500,00	102.040.500,00	98,73
Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	175.785.000,00	174.320.000,00	99,17
Penanganan Pasca Panen dan Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	175.785.000,00	174.320.000,00	99,17
Pengembangan Produksi Peternakan	1.361.749.715,00	1.347.890.500,00	98,98
Peningkatan Produksi Peternakan	1.207.834.715,00	1.199.030.500,00	99,27
Peningkatan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	153.915.000,00	148.860.000,00	96,72
Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan	465.520.500,00	409.146.200,00	87,89
Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	322.674.500,00	266.932.700,00	82,73
Pengelolaan Pemotongan Hewan	142.846.000,00	142.213.500,00	99,56
Pembinaan Lingkungan Sosial	226.006.100,00	147.956.000,00	65,47
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga dan Masyarakat melalui Pelatihan Usaha Peternakan Kelompok Tani Ternak	78.371.100,00	64.602.000,00	82,43
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan dan Bimbingan Pengolahan Hasil Ternak	147.635.000,00	83.354.000,00	56,46
JUMLAH BELANJA	16.806.490.892,50	16.288.808.851,00	96,92



Satuan kerja : Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	523.678.000,00	592.888.600,00	113,22
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.191.268.765,60	10.965.054.019,00	97,98
BELANJA LANGSUNG	12.770.901.250,00	12.088.523.029,38	94,66
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	2.402.424.504,00	2.278.025.560,00	94,82
Pengelolaan Administrasi Keuangan	51.270.900,00	51.159.500,00	99,78
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	2.295.097.704,00	2.170.819.310,00	94,59
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	56.055.900,00	56.046.750,00	99,98
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.232.433.920,00	1.206.988.333,00	97,94
Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	89.030.200,00	88.587.000,00	99,5
Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	103.362.768,00	98.358.850,00	95,16
Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup	469.924.352,00	454.874.200,00	96,8
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	570.116.600,00	565.168.283,00	99,13
Perlindungan dan Konservasi RTH dan Sumber Daya Alam	1.627.800.714,00	1.507.250.937,38	92,59
Konservasi Sumber Daya Alam	4.800.000,00	4.800.000,00	100
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	1.602.012.364,00	1.482.020.437,38	92,51
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	20.988.350,00	20.430.500,00	97,34
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.636.457.965,00	5.271.488.294,00	93,52
Mobilisasi dan Penanganan Sampah	1.693.767.442,00	1.617.225.420,00	95,48
Pengelolaan Taman Pemrosesan Akhir (TPA)	667.497.246,00	628.025.060,00	94,09
Penanggulangan Sampah	1.637.754.888,00	1.401.159.350,00	85,55
Pengolahan Sampah	809.971.389,00	797.611.527,00	98,47
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	827.467.000,00	827.466.937,00	100
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.836.784.147,00	1.816.309.905,00	98,89
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	131.634.168,00	124.286.000,00	94,42
Kemitraan Lingkungan Hidup	134.363.785,00	133.648.500,00	99,47
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	83.716.600,00	83.426.500,00	99,65
Pengelolaan Informasi dan edukasi lingkungan	1.487.069.594,00	1.474.948.905,00	99,18
Pembinaan Lingkungan Sosial	35.000.000,00	8.460.000,00	24,17
Pelatihan dan/atau Sertifikasi Bagi Tenaga Teknis di Bidang Lingkungan Yang Diselenggarakan Oleh Instansi/Lembaga Resmi Yang Diakui Oleh Pemerintah	35.000.000,00	8.460.000,00	24,17
JUMLAH BELANJA	23.962.170.015,60	23.053.577.048,38	96,21

Satuan kerja : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.063.097.065,36	2.797.699.682,00	91,34
BELANJA LANGSUNG	2.854.766.232,00	2.582.813.163,00	90,47
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	1.348.157.232,00	1.173.523.213,00	87,05
Pengelolaan Administrasi Keuangan	91.625.000,00	71.875.000,00	78,44
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.221.532.232,00	1.072.468.213,00	87,8
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	35.000.000,00	29.180.000,00	83,37



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pelayanan Administrasi Kependudukan	810.238.500,00	803.079.650,00	99,12
Pelayanan Identitas Penduduk	88.945.000,00	87.355.000,00	98,21
Pelayanan Administrasi Pindah Datang Penduduk	107.442.000,00	107.377.000,00	99,94
Pendataan Penduduk	29.016.000,00	29.016.000,00	100
Penerbitan Dokumen Kependudukan	554.530.000,00	549.028.750,00	99,01
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.305.500,00	30.302.900,00	99,99
Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	0	0	0
Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	329.448.500,00	262.662.800,00	79,73
Pelayanan Pencatatan Kelahiran	134.336.000,00	133.707.500,00	99,53
Pelayanan P4-K (Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian)	17.550.000,00	17.500.000,00	99,72
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	173.062.500,00	106.955.300,00	61,8
Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil	4.500.000,00	4.500.000,00	100
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	366.922.000,00	343.547.500,00	93,63
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	91.000.000,00	90.817.000,00	99,8
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	55.492.000,00	48.983.000,00	88,27
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39.350.000,00	32.417.500,00	82,38
Penyusunan Buku Data Penduduk per Semester	93.550.000,00	86.900.000,00	92,89
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87.530.000,00	84.430.000,00	96,46
JUMLAH BELANJA	5.917.863.297,36	5.380.512.845,00	90,92

Satuan kerja : Dinas Perhubungan

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.885.000.000,00	5.438.472.001,00	111,33
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.268.054.734,00	5.072.030.758,00	96,28
BELANJA LANGSUNG	20.708.757.518,00	20.203.223.997,01	97,56
Peningkatan Kinerja Lembaga Aparatur Pemerintah	1.979.594.218,00	1.775.186.451,00	89,67
Pengelolaan Administrasi Keuangan	178.411.500,00	152.192.950,00	85,3
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.781.645.218,00	1.604.119.751,00	90,04
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	19.537.500,00	18.873.750,00	96,6
Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4.388.097.300,00	4.141.757.625,01	94,39
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal	312.699.000,00	304.611.425,01	97,41
Peningkatan Pengendalian, Pengawasan, dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.500.319.850,00	3.289.940.250,00	93,99
Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	103.002.250,00	91.876.250,00	89,2
Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor	472.076.200,00	455.329.700,00	96,45
Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal	0	0	0
Pengembangan Transportasi	14.341.066.000,00	14.286.279.921,00	99,62
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal	14.341.066.000,00	14.286.279.921,00	99,62
Perencanaan Pengembangan Transportasi	0	0	0
Pembinaan dan Pengendalian Perhubungan Laut	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal	0	0	0
JUMLAH BELANJA	25.976.812.252,00	25.275.254.755,01	97,3



Satuan kerja : Dinas Komunikasi Dan Informatika

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	208.720.000,00	177.424.200,00	85,01
JUMLAH PENDAPATAN	208.720.000,00	177.424.200,00	85,01
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.745.228.714,32	5.722.185.211,00	99,6
BELANJA LANGSUNG	6.256.913.600,00	6.097.486.463,00	97,45
Peningkatan Kinerja Lembaga Aparatur Pemerintah	1.191.068.700,00	1.152.103.323,00	96,73
Pengelolaan Administrasi Keuangan	120.000.000,00	119.450.000,00	99,54
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.064.108.700,00	1.025.693.323,00	96,39
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	6.960.000,00	6.960.000,00	100
Pengelolaan Komunikasi Publik	1.230.139.400,00	1.173.099.854,00	95,36
Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat	929.380.000,00	900.505.050,00	96,89
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	196.359.400,00	176.894.804,00	90,09
Penguatan Kelembagaan Dan Pengelolaan Kemitraan	104.400.000,00	95.700.000,00	91,67
Pengelolaan Informasi Publik	306.019.000,00	305.158.000,00	99,72
Pelayanan informasi dan pengaduan	147.070.000,00	147.027.000,00	99,97
Pengelolaan Opini Publik	158.949.000,00	158.131.000,00	99,49
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.439.053.000,00	2.401.772.690,00	98,47
Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Teknologi	2.343.353.000,00	2.318.890.290,00	98,96
Pengelolaan data elektronik dan integrasi sistem Informasi	95.700.000,00	82.882.400,00	86,61
Pengelolaan e-Government	730.382.500,00	707.326.993,00	96,84
Pengembangan aplikasi e-government	425.740.000,00	420.563.460,00	98,78
Pengembangan ekosistem e-government	113.945.000,00	112.847.700,00	99,04
Peningkatan tata kelola e-government	190.697.500,00	173.915.833,00	91,2
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	242.800.000,00	242.305.203,00	99,8
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	242.800.000,00	242.305.203,00	99,8
Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	100
Pengelolaan Data Statistik Sektoral	13.000.000,00	13.000.000,00	100
Peningkatan Pengelolaan Persandian	104.451.000,00	102.720.400,00	98,34
Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	104.451.000,00	102.720.400,00	98,34
JUMLAH BELANJA	12.002.142.314,32	11.819.671.674,00	98,48

Satuan kerja : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.633.053.249,00	1.193.935.600,50	73,11
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.464.238.959,05	7.087.554.588,00	83,74
BELANJA LANGSUNG	9.127.886.221,80	6.247.209.442,00	68,44
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	1.602.020.358,80	1.435.927.477,00	89,63
Pengelolaan Administrasi Keuangan	226.558.000,00	189.679.500,00	83,72
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.347.962.358,80	1.218.777.977,00	90,42
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	27.500.000,00	27.470.000,00	99,89
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Koperasi	625.421.360,00	554.805.250,00	88,71



Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Penguatan Kelembagaan dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	97.158.400,00	92.979.000,00	95,7
Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Usaha Koperasi	81.133.280,00	80.596.000,00	99,34
Penertiban dan Pengawasan Koperasi Melalui Akuntabilitas	29.771.680,00	16.230.250,00	54,52
Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing SDM KUMKM	417.358.000,00	365.000.000,00	87,45
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	759.312.280,00	511.435.675,00	67,36
Penguatan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro	113.926.080,00	70.577.500,00	61,95
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk serta Fasilitas Prasarana Produksi Bagi Usaha Mikro	419.726.600,00	295.328.525,00	70,36
Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Promosi dan Pemasaran produk usaha mikro	225.659.600,00	145.529.650,00	64,49
Pengembangan Usaha Perdagangan	5.858.797.383,00	3.476.706.930,00	59,34
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	2.242.927.039,00	1.916.804.000,00	85,46
Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	60.022.434,00	57.889.535,00	96,45
Peningkatan dan Pengembangan Kemetrolgian	37.527.310,00	31.829.560,00	84,82
Pengelolaan dan Pelayanan Pasar	1.720.694.000,00	1.470.183.835,00	85,44
Revitalisasi Pasar Tradisional	1.797.626.600,00	0	0
Pengembangan Industri	132.334.840,00	131.531.000,00	99,39
Pembangunan Sumber Daya Industri	19.443.000,00	19.443.000,00	100
Pemberdayaan Industri	20.424.400,00	20.239.500,00	99,09
Peningkatan Pengawasan, Kerjasama dan Promosi Investasi Industri	92.467.440,00	91.848.500,00	99,33
Pembinaan Lingkungan Sosial	150.000.000,00	136.803.110,00	91,2
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	150.000.000,00	136.803.110,00	91,2
JUMLAH BELANJA	17.592.125.180,85	13.334.764.030,00	75,8

Satuan kerja : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	514.754.250,00	249.480.750,00	48,47
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.078.199.648,45	3.945.402.265,00	96,74
BELANJA LANGSUNG	5.468.573.193,98	4.929.268.802,52	90,14
Peningkatan Mutu Kepemudaan dan Keolahragaan	1.183.402.942,00	1.083.035.100,00	91,52
Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	420.650.000,00	366.830.500,00	87,21
Pemberdayaan dan Pengembangan Olah Raga	762.752.942,00	716.204.600,00	93,9
Peningkatan Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah	1.510.667.787,98	1.348.537.539,00	89,27
Pengelolaan Administrasi Keuangan	27.700.000,00	27.196.500,00	98,18
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.444.717.787,98	1.284.120.039,00	88,88
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	38.250.000,00	37.221.000,00	97,31
Pengembangan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.747.676.020,00	1.524.608.951,52	87,24
Pengelolaan Destinasi Wisata	641.152.920,00	609.345.000,00	95,04
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	75.892.900,00	67.889.000,00	89,45
Pengembangan Industri Pariwisata	76.918.200,00	59.561.000,00	77,43
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata	609.662.000,00	456.653.951,52	74,9
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan	344.050.000,00	331.160.000,00	96,25
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.026.826.444,00	973.087.212,00	94,77



Pengembangan Promosi Pariwisata	779.226.556,00	746.867.193,00	95,85
Pengembangan Data dan Informasi Kepariwisata	101.081.388,00	98.029.845,00	96,98
Pengembangan Pasar dan Jaringan Kerjasama Pariwisata	146.518.500,00	128.190.174,00	87,49
JUMLAH BELANJA	9.546.772.842,43	8.874.671.067,52	92,96

Satuan kerja : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.152.802.806,30	3.820.254.263,00	91,99
BELANJA LANGSUNG	1.101.701.448,88	942.857.996,00	85,58
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	743.313.198,88	645.669.201,00	86,86
Pengelolaan Administrasi Keuangan	111.500.000,00	91.598.000,00	82,15
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	630.492.698,88	552.935.701,00	87,7
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	1.320.500,00	1.135.500,00	85,99
Pengelolaan Perpustakaan	218.237.000,00	174.680.795,00	80,04
Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka	120.000.000,00	109.895.065,00	91,58
Peningkatan Layanan Perpustakaan	98.237.000,00	64.785.730,00	65,95
Pembinaan dan Pemasyarakatan Perpustakaan	22.446.250,00	16.615.000,00	74,02
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	18.910.000,00	15.715.000,00	83,1
Pemasyarakatan Perpustakaan	3.536.250,00	900.000,00	25,45
Pengelolaan Arsip	101.905.000,00	95.293.000,00	93,51
Pengelolaan Arsip Dinamis	45.507.000,00	41.395.000,00	90,96
Pengelolaan Arsip Statis	56.398.000,00	53.898.000,00	95,57
Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan	15.800.000,00	10.600.000,00	67,09
Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	14.146.000,00	10.600.000,00	74,93
Pemasyarakatan Kearsipan	1.654.000,00	0	0
JUMLAH BELANJA	5.254.504.255,18	4.763.112.259,00	90,65

Satuan kerja : Sekretariat DPRD

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.312.592.414,00	16.370.148.015,00	94,56
BELANJA LANGSUNG	20.873.532.000,00	18.910.000.524,00	90,59
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	16.167.687.637,00	14.665.420.464,00	90,71
Pengelolaan Administrasi Keuangan	246.499.500,00	232.999.500,00	94,52
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	13.785.843.737,00	12.757.676.773,00	92,54
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	512.499.500,00	479.323.500,00	93,53
Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan, kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD	1.622.844.900,00	1.195.420.691,00	73,66
Peningkatan Daya Dukung Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	4.705.844.363,00	4.244.580.060,00	90,2
Pengelolaan Perundang-undangan	2.126.137.483,00	1.690.244.750,00	79,5
Pengelolaan Rapat dan Risalah	2.579.706.880,00	2.554.335.310,00	99,02
JUMLAH BELANJA	38.186.124.414,00	35.280.148.539,00	92,39



Satuan kerja : Inspektorat

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.576.684.326,21	5.397.357.873,00	96,78
BELANJA LANGSUNG	6.446.629.021,00	5.618.090.239,00	87,15
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	1.272.381.914,00	1.159.112.249,00	91,1
Pengelolaan Administrasi Keuangan	3.400.000,00	2.636.500,00	77,54
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.228.179.496,00	1.118.196.249,00	91,05
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	40.802.418,00	38.279.500,00	93,82
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1.506.501.068,00	1.117.657.740,00	74,19
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.425.656.568,00	1.052.983.750,00	73,86
Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah	80.844.500,00	64.673.990,00	80
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	493.225.122,00	318.740.000,00	64,62
Pemantapan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	493.225.122,00	318.740.000,00	64,62
Penguatan Pengawasan	3.174.520.917,00	3.022.580.250,00	95,21
Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.974.359.166,00	1.922.195.250,00	97,36
Pemantapan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.200.161.751,00	1.100.385.000,00	91,69
JUMLAH BELANJA	12.023.313.347,21	11.015.448.112,00	91,62

Satuan kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.750.262.539,85	4.661.823.427,00	98,14
BELANJA LANGSUNG	3.700.048.007,00	3.526.765.285,68	95,32
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	1.495.536.317,00	1.384.340.952,68	92,56
Pengelolaan Administrasi Keuangan	156.034.320,00	125.912.000,00	80,7
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.297.775.197,00	1.217.317.702,68	93,8
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	41.726.800,00	41.111.250,00	98,52
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	769.104.750,00	748.339.065,00	97,3
Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	506.358.750,00	492.863.565,00	97,33
Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	262.746.000,00	255.475.500,00	97,23
Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Rakyat	313.760.500,00	306.728.248,00	97,76
Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	132.570.000,00	129.037.351,00	97,34
Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	181.190.500,00	177.690.897,00	98,07
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	346.506.480,00	322.486.650,00	93,07
Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Investasi	213.107.000,00	195.678.400,00	91,82
Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Perindustrian Dan Pariwisata	133.399.480,00	126.808.250,00	95,06
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Kewilayahan	354.976.500,00	345.781.910,00	97,41
Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Infrastruktur	192.575.500,00	186.581.010,00	96,89



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup	162.401.000,00	159.200.900,00	98,03
Penelitian dan Pengembangan	420.163.460,00	419.088.460,00	99,74
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Kota Probolinggo	149.240.000,00	148.990.000,00	99,83
Penelitian Pembangunan, Inovasi Dan Teknologi	270.923.460,00	270.098.460,00	99,7
JUMLAH BELANJA	8.450.310.546,85	8.188.588.712,68	96,9

Satuan kerja : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	42.242.156.888,00	41.960.308.709,00	99,33
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.273.303.833,59	22.112.861.546,00	84,16
BELANJA LANGSUNG	9.882.785.619,38	9.377.505.624,00	94,89
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	3.200.548.409,00	3.030.018.183,00	94,67
Pengelolaan Administrasi Keuangan	655.989.486,00	637.263.278,00	97,15
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	2.355.568.978,00	2.206.672.405,00	93,68
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	188.989.945,00	186.082.500,00	98,46
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	516.047.384,00	513.027.800,00	99,41
Pelayanan, Penetapan, Pendataan Dan Penagihan Pajak Daerah	368.229.000,00	367.442.000,00	99,79
Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan	147.818.384,00	145.585.800,00	98,49
Peningkatan Penerimaan PBB & BPHTB	935.914.900,00	890.814.600,00	95,18
Pendataan dan Penilaian PBB & BPHTB	374.216.400,00	357.365.500,00	95,5
Penagihan Dan Pengolah Data PBB & BPHTB	561.698.500,00	533.449.100,00	94,97
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah	696.619.250,00	641.990.510,00	92,16
Perencanaan Barang Milik Daerah	308.963.750,00	290.766.750,00	94,11
Pengamanan Barang Milik Daerah	240.992.000,00	217.978.110,00	90,45
Penatausahaan Barang Milik Daerah	146.663.500,00	133.245.650,00	90,85
Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	1.005.795.129,00	995.876.778,00	99,01
Pengelolaan Kas	277.418.000,00	276.919.000,00	99,82
Perbendaharaan	553.620.329,00	545.538.428,00	98,54
Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	174.756.800,00	173.419.350,00	99,23
Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	751.632.440,00	746.373.400,00	99,3
Pengembangan Manajemen Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan	177.830.200,00	176.814.200,00	99,43
Pengembangan Manajemen Akuntansi Belanja	181.819.000,00	181.461.500,00	99,8
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	391.983.240,00	388.097.700,00	99,01
Perencanaan Anggaran Daerah	2.776.228.107,38	2.559.404.353,00	92,19
Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung	1.367.783.437,00	1.215.736.437,00	88,88
Anggaran Belanja Langsung	1.204.000.670,38	1.159.819.916,00	96,33
Analisis dan Evaluasi Anggaran	204.444.000,00	183.848.000,00	89,93
JUMLAH BELANJA	36.156.089.452,97	31.490.367.170,00	87,1



Satuan kerja : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.115.151.061,00	4.058.674.670,00	98,63
BELANJA LANGSUNG	2.405.987.841,00	2.037.557.708,00	84,69
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	846.923.652,00	736.592.342,00	86,97
Pengelolaan Administrasi Keuangan	18.426.500,00	18.426.500,00	100
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	822.172.152,00	711.875.842,00	86,58
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	6.325.000,00	6.290.000,00	99,45
Pembinaan, Pengembangan Dan Kesejahteraan Pegawai	807.422.150,00	556.054.417,00	68,87
Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai	613.222.500,00	378.931.967,00	61,79
Pengelolaan Pembinaan Pegawai	147.664.650,00	130.791.950,00	88,57
Fasilitasi Kesejahteraan Pegawai	46.535.000,00	46.330.500,00	99,56
Pengelolaan Formasi, Informasi Dan Mutasi Pegawai	751.642.039,00	744.910.949,00	99,1
Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	442.217.004,00	437.666.004,00	98,97
Pengelolaan Informasi Kepegawaian	96.596.385,00	94.985.295,00	98,33
Pengelolaan Mutasi Pegawai	212.828.650,00	212.259.650,00	99,73
JUMLAH BELANJA	6.521.138.902,00	6.096.232.378,00	93,48

Satuan kerja : Kecamatan Kademangan

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.414.800,00	1.414.800,00	100,00
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.848.850.732,00	7.573.448.287,00	96,49
BELANJA LANGSUNG	9.551.184.809,00	4.697.200.024,00	49,18
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	6.607.970.837,00	2.012.789.420,00	30,46
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	404.844.935,00	392.433.500,00	96,93
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kademangan	502.340.267,00	57.825.000,00	11,51
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Pohsangit Kidul	502.340.267,00	25.040.000,00	4,98
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Ketapang	502.340.267,00	369.666.000,00	73,59
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Triwung Kidul	502.340.267,00	100.855.000,00	20,08
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Pilang	502.340.267,00	0,00	0,00
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Triwung Lor	502.340.267,00	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kademangan	708.363.000,00	148.115.000,00	20,91
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pohsangit Kidul	106.895.000,00	82.715.000,00	77,38
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketapang	716.488.000,00	218.145.000,00	30,45
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Kidul	274.114.000,00	176.267.000,00	64,30
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilang	562.665.000,00	226.227.920,00	40,21
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Lor	820.559.300,00	215.500.000,00	26,26
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kademangan	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pohsangit Kidul	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Triwung Kidul	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pilang	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Triwung Lor	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	1.332.337.191,00	1.258.339.431,00	94,45



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pengelolaan Administrasi Keuangan	234.658.000,00	229.045.000,00	97,61
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.088.883.191,00	1.020.509.431,00	93,72
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	8.796.000,00	8.785.000,00	99,87
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	840.382.200,00	798.200.000,00	94,98
Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	69.893.000,00	49.783.000,00	71,23
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	482.357.200,00	468.978.000,00	97,23
Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	288.132.000,00	279.439.000,00	96,98
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan	770.494.581,00	627.871.173,00	81,49
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Kidul	117.429.000,00	91.486.806,00	77,91
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kademangan	120.830.000,00	91.495.164,00	75,72
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pohsangit Kidul	120.907.000,00	98.034.984,00	81,08
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pilang	120.632.000,00	101.842.705,00	84,42
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Lor	103.964.000,00	82.628.116,00	79,48
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Ketapang	106.658.500,00	91.229.398,00	85,53
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul	8.294.000,00	8.294.000,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kademangan	8.960.000,00	8.960.000,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kidul	18.353.000,00	18.350.000,00	99,98
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pilang	10.868.000,00	10.563.000,00	97,19
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Lor	5.450.000,00	4.000.000,00	73,39
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Ketapang	28.149.081,00	20.987.000,00	74,56
JUMLAH BELANJA	17.400.035.541,00	12.270.648.311,00	70,52

Satuan kerja : Kecamatan Wonoasih

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.186.200,00	1.186.200,00	100,00
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.584.468.483,75	7.384.289.694,00	86,02
BELANJA LANGSUNG	8.298.412.971,50	5.606.838.407,00	67,57
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	5.673.534.002,00	3.084.059.850,00	54,36
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	423.201.050,00	418.469.850,00	98,88
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Pakistaji	502.340.267,00	162.285.000,00	32,31
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kedunggaleng	502.340.267,00	272.590.000,00	54,26
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Sumber Taman	502.340.267,00	281.950.000,00	56,13
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kedung Asem	502.340.267,00	192.473.000,00	38,32
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Jrebeng Kidul	502.340.267,00	182.555.000,00	36,34
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Wonoasih	502.340.267,00	270.348.000,00	53,82
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakistaji	373.883.300,00	135.512.500,00	36,24
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedunggaleng	460.922.900,00	347.126.000,00	75,31
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Taman	233.936.150,00	164.500.000,00	70,32
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Asem	543.732.500,00	187.779.500,00	34,54
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul	318.383.500,00	215.183.500,00	67,59
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonoasih	305.433.000,00	253.287.500,00	82,93
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakistaji	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedunggaleng	0,00	0,00	0,00



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung Asem	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Kidul	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonoasih	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	1.055.251.369,50	1.013.054.893,00	96,00
Pengelolaan Administrasi Keuangan	670.775.354,41	654.839.519,00	97,62
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	334.121.815,09	307.864.374,00	92,14
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	50.354.200,00	50.351.000,00	99,99
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	1.024.378.440,00	1.007.611.040,00	98,36
Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	178.598.000,00	174.371.200,00	97,63
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	574.870.300,00	563.455.900,00	98,01
Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	270.910.140,00	269.783.940,00	99,58
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan	545.249.160,00	502.112.624,00	92,09
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Wonoasih	63.555.000,00	55.757.058,00	87,73
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jrebeng Kidul	76.875.000,00	74.553.488,00	96,98
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pakistaji	63.875.000,00	59.927.897,00	93,82
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedunggaleng	75.136.000,00	71.447.268,00	95,09
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedung Asem	80.825.000,00	74.812.250,00	92,56
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sumber Taman	85.625.000,00	77.858.802,00	90,93
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonoasih	15.109.600,00	15.100.000,00	99,94
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Kidul	7.046.000,00	6.944.500,00	98,56
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pakistaji	22.976.000,00	19.155.031,00	83,37
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedunggaleng	18.702.760,00	13.822.830,00	73,91
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Asem	19.856.800,00	17.611.500,00	88,69
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sumber Taman	15.667.000,00	15.122.000,00	96,52
JUMLAH BELANJA	16.882.881.455,25	12.991.128.101,00	76,95

Satuan kerja : Kecamatan Mayangan

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.752.660,00	1.752.660,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.752.660,00	1.752.660,00	100,00
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.169.851.058,00	6.088.097.940,00	98,67
BELANJA LANGSUNG	8.523.423.259,20	5.188.876.425,00	60,88
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	5.876.639.735,00	2.702.284.560,00	45,98
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	469.754.400,00	443.241.300,00	94,36
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Jati	502.340.267,00	174.511.960,00	34,74
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Mangunharjo	502.340.267,00	166.448.750,00	33,13
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Wiroborang	502.340.267,00	311.815.000,00	62,07
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Sukabumi	502.340.267,00	338.660.000,00	67,42
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Mayangan	502.340.267,00	300.670.000,00	59,85
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jati	268.150.000,00	155.594.650,00	58,03
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangunharjo	666.100.000,00	162.500.000,00	24,40
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiroborang	429.059.000,00	193.260.000,00	45,04
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukabumi	801.860.000,00	321.150.000,00	40,05
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan	730.015.000,00	134.432.900,00	18,42
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Jati	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangunharjo	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wiroborang	0,00	0,00	0,00



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukabumi	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mayangan	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	839.883.206,20	796.655.381,00	94,85
Pengelolaan Administrasi Keuangan	315.968.960,00	311.151.300,00	98,48
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	412.136.539,00	374.132.415,00	90,78
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	111.777.707,20	111.371.666,00	99,64
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	1.109.172.900,00	1.056.120.700,00	95,22
Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	116.012.500,00	83.196.800,00	71,71
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	687.393.500,00	672.273.500,00	97,80
Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	305.766.900,00	300.650.400,00	98,33
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan	697.727.418,00	633.815.784,00	90,84
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Wiroborang	48.115.840,00	39.457.701,00	82,01
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jati	96.529.160,00	85.617.934,00	88,70
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sukabumi	88.272.100,00	78.469.720,00	88,90
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Mangunharjo	150.656.048,00	141.959.147,00	94,23
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Mayangan	90.453.388,00	77.742.148,00	85,95
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wiroborang	59.637.566,00	56.602.232,00	94,91
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jati	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukabumi	88.511.046,00	84.147.044,00	95,07
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mangunharjo	29.167.000,00	27.029.983,00	92,67
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mayangan	34.885.270,00	31.289.875,00	89,69
JUMLAH BELANJA	14.693.274.317,20	11.276.974.365,00	76,75

Satuan kerja : Kecamatan Kedopok

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.548.000,00	1.548.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.548.000,00	1.548.000,00	100,00
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.022.590.263,00	7.881.884.532,00	98,25
BELANJA LANGSUNG	7.809.291.296,00	4.600.561.837,00	58,91
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	5.249.949.602,00	2.402.719.650,00	45,77
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	580.218.000,00	421.633.000,00	72,67
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Sumber Wetan	502.340.267,00	272.970.300,00	54,34
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kedopok	502.340.267,00	209.663.750,00	41,74
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Jrebeng Lor	502.340.267,00	108.154.000,00	21,53
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Jrebeng Wetan	502.340.267,00	349.214.500,00	69,52
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kareng Lor	502.340.267,00	183.241.000,00	36,48
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Jrebeng Kulon	502.340.267,00	60.345.000,00	12,01
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Wetan	282.565.000,00	55.969.000,00	19,81
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedopok	262.250.000,00	137.597.000,00	52,47
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Lor	257.720.000,00	108.623.600,00	42,15
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Wetan	273.445.000,00	246.225.000,00	90,05
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kareng Lor	273.750.000,00	99.640.000,00	36,40
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kulon	305.960.000,00	149.443.500,00	48,84
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Wetan	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedopok	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Lor	0,00	0,00	0,00



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Wetan	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kareng Lor	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Kulon	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	1.094.390.994,00	940.001.725,00	85,89
Pengelolaan Administrasi Keuangan	428.279.000,00	317.049.250,00	74,03
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	449.516.850,00	416.686.575,00	92,70
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	216.595.144,00	206.265.900,00	95,23
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	778.355.000,00	741.842.000,00	95,31
Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	72.074.000,00	47.934.000,00	66,51
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	489.066.000,00	477.562.000,00	97,65
Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	217.215.000,00	216.346.000,00	99,60
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan	686.595.700,00	515.998.462,00	75,15
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sumber Wetan	17.650.000,00	6.569.500,00	37,22
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kareng Lor	15.230.000,00	5.103.500,00	33,51
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedopok	11.739.000,00	1.739.000,00	14,81
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jrebeng Kulon	13.074.000,00	2.962.000,00	22,66
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jrebeng Wetan	24.936.000,00	9.720.000,00	38,98
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jrebeng Lor	12.380.000,00	1.050.000,00	8,48
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sumber Wetan	107.625.000,00	90.228.593,00	83,84
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kareng Lor	91.378.800,00	73.630.216,00	80,58
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedopok	108.549.000,00	97.814.588,00	90,11
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Kulon	115.662.100,00	99.026.667,00	85,62
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Wetan	77.947.400,00	57.423.009,00	73,67
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Lor	90.424.400,00	70.731.389,00	78,22
JUMLAH BELANJA	15.831.881.559,00	12.482.446.369,00	78,84

Satuan kerja : Kecamatan Kanigaran

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.963.670,00	5.963.670,00	100,00
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.272.545.005,50	8.149.008.779,00	98,51
BELANJA LANGSUNG	10.380.758.634,80	8.297.926.014,71	79,94
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	7.574.864.852,00	5.769.105.425,71	76,16
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	415.886.000,00	413.356.075,71	99,39
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kanigaran	502.340.267,00	502.340.000,00	100,00
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Sukoharjo	502.340.267,00	400.587.500,00	79,74
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Trisnonegaran	502.340.267,00	366.000.000,00	72,86
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kebon Sari Wetan	502.340.267,00	360.717.500,00	71,81
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kebon Sari Kulon	502.340.267,00	366.000.000,00	72,86
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Curahgrinting	502.340.267,00	363.237.500,00	72,31
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigaran	891.569.000,00	728.641.000,00	81,73
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukoharjo	312.500.000,00	170.010.000,00	54,40
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Trisnonegaran	751.575.000,00	695.077.000,00	92,48
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebon Sari Wetan	643.642.500,00	301.672.000,00	46,87
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebon Sari Kulon	378.680.750,00	367.930.750,00	97,16
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Curahgrinting	1.166.970.000,00	733.536.100,00	62,86



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigaran	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukoharjo	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Trisnonegaran	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebon Sari Wetan	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebon Sari Kulon	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Curahgrinting	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	1.068.156.123,80	948.376.536,00	88,79
Pengelolaan Administrasi Keuangan	779.066.223,80	675.438.462,00	86,70
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	284.089.900,00	267.938.074,00	94,31
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	1.158.168.480,00	1.108.043.280,00	95,67
Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	76.278.780,00	51.354.000,00	67,32
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	764.863.700,00	747.611.500,00	97,74
Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	317.026.000,00	309.077.780,00	97,49
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan	579.569.179,00	472.400.773,00	81,51
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Curahgrinting	10.000.000,00	0,00	0,00
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kanigaran	10.000.000,00	0,00	0,00
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kebonsari Wetan	10.000.000,00	0,00	0,00
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sukoharjo	12.350.000,00	2.350.000,00	19,03
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kebonsari Kulon	10.000.000,00	0,00	0,00
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Tisnonegaran	10.000.000,00	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Curahgrinting	73.994.920,00	61.745.986,00	83,45
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kanigaran	92.841.780,00	90.735.878,00	97,73
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebonsari Wetan	92.284.400,00	86.964.893,00	94,24
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukoharjo	89.602.540,00	83.512.636,00	93,20
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebonsari Kulon	104.385.400,00	96.471.726,00	92,42
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tisnonegaran	64.110.139,00	50.619.654,00	78,96
JUMLAH BELANJA	18.653.303.640,30	16.446.934.793,71	88,17



Satuan kerja : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.614.408.647,15	2.592.321.537,00	99,16
BELANJA LANGSUNG	2.347.016.876,20	2.150.717.784,00	91,64
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	961.027.876,20	829.336.784,00	86,3
Pengelolaan Administrasi Keuangan	142.502.000,00	139.297.500,00	97,75
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	793.685.876,20	672.789.284,00	84,77
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	24.840.000,00	17.250.000,00	69,44
Pengembangan Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan	76.521.000,00	76.421.000,00	99,87
Penguatan Lembaga Politik, Pengembangan Etika dan Budaya Politik	50.169.000,00	50.169.000,00	100
Penguatan Organisasi Kemasyarakatan	26.352.000,00	26.252.000,00	99,62
Peningkatan Kesatuan Bangsa	1.309.468.000,00	1.244.960.000,00	95,07
Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	249.069.000,00	219.429.000,00	88,1
Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	1.060.399.000,00	1.025.531.000,00	96,71
JUMLAH BELANJA	4.961.425.523,35	4.743.039.321,00	95,6

Satuan kerja : Sekretariat Daerah

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.998.297.503,50	13.690.185.532,00	97,80
BELANJA LANGSUNG	17.084.742.136,53	15.002.450.432,00	87,81
Peningkatan Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah	12.034.387.096,60	10.450.419.508,00	86,84
Pengelolaan Tata Usaha dan Kepegawaian	817.964.900,00	766.940.250,00	93,76
Pengelolaan Kerumahtanggaan	3.186.905.502,60	2.359.566.557,00	74,04
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	1.648.457.800,00	1.500.936.221,00	91,05
Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	213.945.000,00	211.293.500,00	98,76
Pengelolaan Penatausahaan keuangan	2.504.146.434,00	2.345.852.558,00	93,68
Pengelolaan Sarana dan Prasarana	3.662.967.460,00	3.265.830.422,00	89,16
Dukungan Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	798.934.654,00	754.521.343,00	94,44
Fasilitasi Keagamaan	401.326.200,00	393.157.140,00	97,96
Fasilitasi Kesejahteraan Sosial	155.061.250,00	118.844.250,00	76,64
Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat	242.547.204,00	242.519.953,00	99,99
Pengendalian Administrasi Perekonomian, Pembangunan Dan Sumber Daya Alam	913.384.142,57	878.357.080,00	96,17
Fasilitasi Bina Ekonomi Daerah	452.404.689,40	425.718.180,00	94,10
Fasilitasi Bina Usaha Daerah	179.047.053,00	178.186.100,00	99,52
Pembangunan dan Sumber Daya Alam	281.932.400,17	274.452.800,00	97,35
Peningkatan Pelayanan Bidang Hukum	959.185.779,00	944.403.027,00	98,46
Penataan Peraturan perundang-undangan	158.315.481,00	153.497.477,00	96,96
Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	612.956.398,00	611.162.750,00	99,71
Dokumentasi dan Informasi Hukum	187.913.900,00	179.742.800,00	95,65
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	762.578.620,00	587.116.689,00	76,99
Pengembangan Administrasi Kerjasama dan Kewilayahan	378.868.260,00	252.947.740,00	66,76
Peningkatan Kapasitas Kecamatan	74.403.300,00	55.077.305,00	74,03
Penyelenggaraan Pelaporan Pemerintahan Daerah	259.307.060,00	232.101.644,00	89,51
Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00	46.990.000,00	93,98
Peningkatan Kapasitas Birokrasi Perangkat Daerah	383.172.190,00	340.684.950,00	88,91
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Penyelenggaraan Analisis Jabatan	186.432.770,00	182.737.950,00	98,02
Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	196.739.420,00	157.947.000,00	80,28
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	762.759.431,76	695.876.720,00	91,23
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	430.079.731,76	392.572.000,00	91,28
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	97.431.200,00	94.279.500,00	96,77



URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	235.248.500,00	209.025.220,00	88,85
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	218.101.000,00	149.428.416,00	68,51
Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	218.101.000,00	149.428.416,00	68,51
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	252.239.222,60	201.642.699,00	79,94
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik	252.239.222,60	201.642.699,00	79,94
JUMLAH BELANJA	31.083.039.640,03	28.692.635.964,00	92,31

Pada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka struktur APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, (2) Dana Perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
2. Belanja Daerah, terdiri dari : (1) Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, (2) Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri: (1) penerimaan pembiayaan, (2) pengeluaran pembiayaan

Penyampaian laporan tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Probolinggo secara umum bertujuan untuk menginformasikan capaian keuangan selama Tahun 2020 secara akuntabel dan transparan antara lain dengan melakukan analisis terhadap realisasi Pendapatan maupun Belanja melalui perbandingan antara target dengan realisasinya, maupun antar periode pelaporan serta sedapat mungkin melakukan identifikasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan di dalam mencapai target yang ditetapkan. Penyampaian laporan tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan informasi penting di dalam LKPJ yang disampaikan Walikota Probolinggo kepada DPRD Kota Probolinggo. Untuk mendapat gambaran yang lebih rinci tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2020 dilaporkan pada pada table 2.2 berikut ini:



Tabel 2. 2 Data Kinerja Anggaran 2019 - 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	Evaluasi dan Analisis	Kendala (Jika ada)	Solusi/Upaya yang dilakukan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)					
I	PENDAPATAN	1,039,481,193,960.66	962,134,794,308.82	92.56	922,401,711,702.66	922,551,472,879.19	100.02	(39,583,321,429.63)	(4.11)			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	183,644,060,625.66	175,775,285,716.82	95.72	172,577,213,110.66	183,700,229,230.19	106.45	7,924,943,513.37	4.51	Adanya optimalisasi PAD Kota Probolinggo melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD, di dalamnya termasuk layanan jemput bola dalam memaksimalkan PAD di tengah turunnya kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan kemampuan wajib pajak dan wajib retribusi Kota Probolinggo.	Di tahun 2020, terdapat pemberlakuan pembatasan-pembatasan kegiatan sebagai bagian dari protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19. Sebagai salah satu pusat kegiatan dan tempat berkerumunnya masyarakat, banyak melakukan penutupan sektor wisata yang berakibat pada penurunan pendapatan pemerintah daerah.	Melakukan evaluasi kontrol internal terhadap pelaksanaan penerimaan agar lebih tepat sasaran, serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan sambil berharap kondisi perekonomian pulih agar kemampuan daerah dalam mendapatkan pendapatan dapat lebih optimal.



NO	URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	Evaluasi dan Analisis	Kendala (Jika ada)	Solusi/Upaya yang dilakukan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)					
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	37,547,937,249.00	41,902,567,410.00	111.60	39,188,106,888.00	38,425,937,211.00	98.06	(3,476,630,199.00)	(8.30)	Adanya pembebasan pajak sektor pariwisata berdasarkan instruksi presiden selama 3 bulan (bulan April, Mei, Juni) dan keluarnya Surat Edaran Walikota Probolinggo Nomor 900/1890/425.209/2020 tanggal 30 April 2020		
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13,976,761,399.00	15,364,512,087.00	109.93	12,531,305,329.00	12,628,253,989.55	100.77	(2,736,258,097.45)	(17.81)	Banyak penutupan sumber retribusi daerah dikarenakan kondisi Kota Probolinggo dengan tingkat positif COVID-19 yang cukup tinggi.		
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,525,548,647.66	1,327,277,131.47	87.00	2,077,932,843.66	1,704,846,568.40	82.05	377,569,436.93	28.45	Terjadi peningkatan laba BUMD tahun 2020 yang berakibat pada meningkatnya pendapatan bagian laba Pemkot Probolinggo.		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130,593,813,330.00	117,180,929,088.35	89.73	118,779,868,050.00	130,941,191,461.24	110.24	13,760,262,372.89	11.74	Pada masa pandemi COVID-19, tingkat konsumsi masyarakat mengalami kenaikan yang berakibat pada penarikan uang dari bank dan permintaan pinjaman uang yang tinggi sehingga berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga bank. Selain itu, pendapatan jenis ini meningkat karena tingginya pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya		



NO	URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	Evaluasi dan Analisis	Kendala (Jika ada)	Solusi/Upaya yang dilakukan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)					
1.2	DANA PERIMBANGAN	725,925,621,124.00	650,903,335,236.00	89.67	610,198,050,014.00	601,543,218,884.00	98.58	(49,360,116,352.00)	(7.58)	Dana perimbangan dialokasikan untuk penanganan pandemi covid 19 sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat tentang refocussing dan realokasi anggaran karena pandemi COVID-19.	Banyak terdapat perubahan kebijakan dari pusat terkait pelaksanaan anggaran di Kota Probolinggo. Selain itu terdapat pembatasan penyaluran dana perimbangan sebagai efek dari <i>refocussing</i> dan realokasi yang berakibat tidak maksimalnya pelaksanaan anggaran.	Mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait kebijakan anggaran dalam dana perimbangan tidak terlalu sering berubah karena mengakibatkan keterlambatan dan kebingungan di daerah.
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	118,406,328,000.00	85,349,933,346.00	72.08	55,578,718,000.00	80,432,170,677.00	144.72	(4,917,762,669.00)	(5.76)	Bagi hasil pajak menurun karena terdapat penurunan pendapatan dari pajak PPh secara signifikan akibat adanya insentif pajak kepada wajib pajak berdasarkan PMK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Selain itu, akibat adanya Covid-19, industri minyak dan gas bumi mengalami penurunan permintaan, penurunan harga, dan		



NO	URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	Evaluasi dan Analisis	Kendala (Jika ada)	Solusi/Upaya yang dilakukan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)					
1.2.2	Dana Alokasi Umum	486,728,858,000.00	477,592,333,000.00	98.12	440,456,818,000.00	438,274,640,000.00	99.50	(39,317,693,000.00)	(8.23)	kelebihan produksi sehingga mengakibatkan penurunan pada pendapatan bagi hasil bukan pajak. Karena terdapat penurunan anggaran Dana Alokasi Umum di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu realisasinya masih 99,5%.		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	120,790,435,124.00	87,961,068,890.00	72.82	114,162,514,014.00	82,836,408,207.00	72.56	(5,124,660,683.00)	(5.83)	Karena anggaran dari Dana Alokasi Khusus Fisik (Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur Jalan) tidak terserap seluruhnya, dan anggaran untuk Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi belum terserap seluruhnya. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan belum terserap seluruhnya.		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	129,911,512,211.00	135,456,173,356.00	104.27	139,626,448,578.00	137,308,024,765.00	98.34	1,851,851,409.00	1.37	Karena Pemerintah Kota Probolinggo memaksimalkan target lain-lain pendapatan yang dapat diperoleh sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi sektor lain pendapatan yang terdampak oleh COVID-19. Selain itu, pandemi COVID-19 mengakibatkan realisasi Bagi Hasil Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	COVID-19 menyebabkan realisasi Bagi Hasil Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor turun akibat penurunan kemampuan	-



NO	URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	Evaluasi dan Analisis	Kendala (Jika ada)	Solusi/Upaya yang dilakukan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)					
										dan Bagi Hasil dari Pajak Rokok naik secara signifikan dari penganggaran yang dilakukan.	kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban pajak terkait.	
1.3.1	Pendapatan Hibah	21,228,400,000.00	21,099,420,000.00	99.39	22,673,610,000.00	22,673,610,000.00	100.00	1,574,190,000.00	7.46	Terdapat peningkatan Dana Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan 2019. Selain itu juga penyerapan anggaran Dana Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar di tahun 2020 sebesar 100% sedangkan di tahun 2019 hanya sebesar 99,39%.		
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	71,057,492,211.00	95,065,084,356.00	133.79	76,314,956,578.00	73,996,532,765.00	96.96	(21,068,551,591.00)	(22.16)	Karena anggaran dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) realisasinya belum mencapai 100%.		
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	960,719,000.00	959,219,000.00	99.84	935,219,000.00	935,219,000.00	100.00	(24,000,000.00)	(2.50)	Karena anggaran dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 lebih kecil daripada di tahun 2019. Namun untuk realisasinya sudah mencapai angka 100% (lebih baik apabila dibandingkan dengan 2019 yang hanya sebesar 99,84%).		



NO	URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	Evaluasi dan Analisis	Kendala (Jika ada)	Solusi/Upaya yang dilakukan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)					
1.3.4	Pendapatan Lainnya	36,664,901,000.00	18,332,450,000.00	50.00	39,702,663,000.00	39,702,663,000.00	100.00	21,370,213,000.00	116.57	Pada 2019 penyaluran Dana Insentif Daerah tahap 2 belum tersalurkan yang menyebabkan realisasinya baru 50% dari total anggarannya. Sedangkan di tahun 2020 penyaluran Dana Insentif Daerah telah terealisasi 100%.		
II	BELANJA	1,305,945,473,976.52	1,058,974,718,130.52	81.09	1,082,004,882,500.62	877,667,480,575.35	81.11	(181,307,237,555.17)	(17.12)			
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	476,510,406,012.99	448,777,134,661.00	94.18	474,918,012,841.68	416,958,460,487.37	87.80	(31,818,674,173.63)	(7.09)	Capaian belanja di BTL sudah maksimal (di atas 90%) secara umum, namun belanja bantuan sosial hanya terserap 75,95% dan Belanja Tak Terduga (BTT) 45,60% dikarenakan penyesuaian dengan regulasi dan situasi dan kondisi dalam penanganan Pandemi COVID-19 di Kota Probolinggo. Selain itu, belanja subsidi tidak dianggarkan sebagai akibat dari <i>refocussing</i> dan <i>reallocation</i> anggaran.	Terdapat <i>force majeure</i> yaitu adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan keharusan penyesuaian kondisi anggaran secara cepat. Dampak dari penyesuaian tersebut antara lain serapan belanja yang tidak maksimal.	Penyesuaian penganggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan anggaran terkait penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).



NO	URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	Evaluasi dan Analisis	Kendala (Jika ada)	Solusi/Upaya yang dilakukan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)					
2.1.1	Belanja Pegawai	398,066,435,230.99	377,531,549,557.00	94.84	375,377,402,733.07	361,515,129,238.00	96.31	(16,016,420,319.00)	(4.24)	Penurunan realisasi terjadi karena penurunan jumlah pegawai akibat tingkat angka pensiun pegawai meningkat pada tahun anggaran tersebut.		
2.1.2	Belanja Subsidi	75,000,000.00	51,900,000.00	69.20	0.00	0.00	0.00	(51,900,000.00)	(100.00)	Belanja subsidi tidak dianggarkan karena adanya <i>refocusing</i> anggaran akibat COVID-19.		
2.1.3	Belanja Hibah	28,435,387,250.00	24,300,801,641.00	85.46	18,819,554,000.00	17,372,255,939.37	92.31	(6,928,545,701.63)	(28.51)	<i>By name by adress</i> penerima hibah atau usulan dari penerima hibah turun dan ada beberapa jenis hibah (hibah pendidikan, dan lain-lain) yang memperketat syarat pengajuan dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan Pemerintah pusat / pemerintah provinsi Jawa Timur.		
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2,860,000,000.00	1,819,250,000.00	63.61	2,700,000,000.00	2,049,785,000.00	75.92	230,535,000.00	12.67	Tingkat kematian kota Probolinggo naik, sehingga santunan kematian yang disalurkan juga naik.		
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	874,663,092.00	774,663,023.00	88.57	819,897,545.00	819,897,545.00	100.00	45,234,522.00	5.84	Ada bantuan ke daerah lain yang terdampak bencana alam (Gempa di Sulawesi, dll).		
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	46,198,920,440.00	44,298,970,440.00	95.89	77,201,158,563.61	35,201,392,765.00	45.60	(9,097,577,675.00)	(20.54)	Anggaran di tahun 2020 dialokasikan untuk penanganan covid harus memenuhi aturan 35% dari APBD.		



NO	URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	Evaluasi dan Analisis	Kendala (Jika ada)	Solusi/Upaya yang dilakukan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)					
2.2	BELANJA LANGSUNG	829,435,067,963.53	610,197,583,469.52	73.57	607,086,869,658.94	460,709,020,087.98	75.89	(149,488,563,381.54)	(24.50)	Selain kebijakan <i>refocussing</i> dan <i>reallocating</i> anggaran akibat pandemi COVID-19, penyerapan Belanja Langsung tidak optimal karena adanya keterbatasan ketersediaan kas di awal pandemi COVID-19 akibat kebijakan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat serta pemberlakuan pembatasan-pembatasan kegiatan sebagai bagian dari protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 di Kota Probolinggo. Selain itu, terjadi penghematan realisasi belanja langsung untuk peningkatan penggunaan SILPA yang akan dipakai di tahun anggaran berikutnya.	Keterlambatan penyaluran dana transfer akibat mekanisme pengalokasian dana darurat yang kurang fleksibel dan cadangan keuangan yang kurang cukup.	Mempersiapkan regulasi dan anggaran terhadap situasi-situasi darurat perlu diperhatikan lebih seksama dan dipersiapkan lebih lanjut agar kedepannya tidak terjadi kurang siap terhadap situasi-situasi yang diluar rencana sehingga dalam proses pelaksanaan tidak terjadi terburu-buru.
2.1	Belanja Pegawai	60,164,450,907.60	54,024,923,435.00	89.80	29,807,509,212.00	26,756,647,500.00	89.76	(27,268,275,935.00)	(50.47)	Penurunan signifikan anggaran belanja 2020 dari perbandingan tahun 2019 diakibatkan oleh penganggaran belanja pegawai yang jauh lebih kecil pada tahun anggaran 2020. Selain itu, belanja pegawai pada BLUD tahun 2020 tidak terealisasi lebih dari setengahnya akibat dari perubahan status puskesmas-puskesmas Kota Probolinggo menjadi BLUD. Terdapat <i>refocussing dan reallocating</i> anggaran 2020 untuk keperluan pandemi COVID-19 dan peningkatan penggunaan SILPA untuk tahun anggaran berikutnya.		



NO	URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	Evaluasi dan Analisis	Kendala (Jika ada)	Solusi/Upaya yang dilakukan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)					
2.2	Belanja Barang dan Jasa	490,305,550,600.65	374,335,129,367.66	76.35	434,960,750,829.93	347,940,951,313.04	79.99	(26,394,178,054.62)	(7.05)	Terjadi penurunan penganggaran barang dan jasa pada tahun 2020 yang mengakibatkan turunnya persentase perbandingan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019. Selain itu, terdapat kebijakan refocussing dan reallocating anggaran untuk COVID-19 dan peningkatan penggunaan SILPA tahun anggaran berikutnya. Ada pula beberapa belanja yang sepenuhnya tidak diserap yaitu Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran; Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3; dan Belanja Bimbingan Teknis. Belanja tersebut adalah belanja yang sekiranya dapat ditahan pengeluarannya ataupun dapat dilakukan sendiri tanpa pengeluaran biaya.		
2.3	Belanja Modal	278,965,066,455.28	181,837,530,666.86	65.18	142,318,609,617.01	86,011,421,274.94	60.44	(95,826,109,391.92)	(52.70)	Penganggaran modal pada tahun 2020 cenderung sangat rendah dibandingkan penganggaran tahun 2019 mengakibatkan perbandingan realisasi tahun anggaran 2020 dan 2019 mengalami penurunan drastis. <i>Refocussing dan reallocating</i> anggaran 2020 dilakukan untuk keperluan pandemi COVID-19 dan untuk peningkatan penggunaan SILPA untuk tahun anggaran berikutnya.		
	SURPLUS/ DEFISIT	(266,464,280,015.86)	(96,839,923,821.70)	36.34	(159,603,170,797.96)	44,883,992,303.84	(28.12)	141,723,916,125.54	(146.35)			



NO	URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	Evaluasi dan Analisis	Kendala (Jika ada)	Solusi/Upaya yang dilakukan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)					
3	PEMBIAYAAN DAERAH											
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	266,464,280,015.86	266,464,280,015.86	100.00	169,603,170,797.96	169,603,170,797.96	100.00	(96,861,109,217.90)	(36.35)			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	266,464,280,015.86	266,464,280,015.86	100.00	169,603,170,797.96	169,603,170,797.96	100.00	(96,861,109,217.90)	(36.35)			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00	10,000,000,000.00	100.00			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00	10,000,000,000.00	100.00			
	PEMBIAYAAN NETTO	266,464,280,015.86	266,464,280,015.86	100.00	159,603,170,797.96	159,603,170,797.96	100.00	(106,861,109,217.90)	(40.10)			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	169,624,356,194.16	0.00	0.00	204,487,163,101.80	0.00	34,862,806,907.64	20.55			



Dalam pelaksanaan APBD Kota ProbolinggoTA 2020, telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ditemui hambatan dan kendala, antara lain:

a. Kinerja Pendapatan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama TA 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendataan dan pemungutan pajak;
- 2) Kurangnya petugas dilapangan;
- 3) Adanya pembebasan pajak sektor pariwisata berdasarkan instruksi presiden selama 3 bulan (bulan April, Mei, Juni) dan keluarnya Surat Edaran Walikota Probolinggo Nomor 900/1890/425.209/2020 tanggal 30 April 2020 menyebabkan hasil pajak daerah mengalami penurunan
- 4) Kebutuhan dana untuk pandemi Covid-19 yang sangat besar menyebabkan sebagian dana perimbangan dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat tentang refocussing dan realokasi anggaran karena pandemi Covid-19.
- 5) Terdapat pemberlakuan pembatasan aktivitas yang melibatkan orang banyak sebagai bagian dari protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 sehingga banyak kegiatan pelayanan publik, aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi sumber PAD baik dari pajak maupun retribusi mengalami penurunan secara signifikan.
- 6) Terdapat penurunan bagi hasil pajak menurun yang disebabkan adanya penurunan pendapatan dari pajak PPh secara signifikan akibat adanya insentif pajak kepada wajib pajak berdasarkan PMK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Selain itu, akibat adanya Covid-19, industri minyak dan gas bumi mengalami penurunan permintaan, penurunan harga, dan kelebihan produksi sehingga mengakibatkan penurunan pada pendapatan bagi hasil bukan pajak.

Upaya untuk mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan sarana penunjang dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak;
- 2) Tersedianya fasilitas pembayaran pajak secara online;
- 3) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan pendaftaran/validasi data obyek pajak baru, menyesuaikan tarif pajak dengan perundang-undangan yang ada;
- 4) Mengkaji kembali mekanisme penetapan target PAD agar benar-benar sesuai dengan potensi yang sesungguhnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi agar mengkaji ulang mekanisme penghitungan bagi hasil pajak serta penetapan kembali penyaluran dana bagi hasil pajak sesuai dengan potensi realisasi penerimaan negara kepada pemerintah daerah.
- 6) Adanya optimalisasi PAD Kota Probolinggo melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD, di dalamnya termasuk layanan jemput bola dalam memaksimalkan PAD di tengah turunnya



kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan kemampuan wajib pajak dan wajib retribusi Kota Probolinggo.

b. Kinerja Belanja

Masih ada permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang berpengaruh terhadap kinerja realisasi belanja antara lain:

- 1) Terdapat force majeure (pandemi Covid-19) yang menyebabkan keharusan penyesuaian kondisi anggaran secara cepat. Dampak dari penyesuaian mendadak tersebut antara lain belanja pegawai yang harus ditahan berefek pada regenerasi pegawai yang tidak optimal, regulasi pemberian hibah yang kurang jelas peruntukannya, dan dampak beruntun lainnya.
- 2) Keterlambatan penyaluran dana transfer akibat mekanisme pengalokasian dana darurat yang kurang fleksibel dan cadangan keuangan yang kurang cukup.

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

- 1) Penyesuaian penganggarnya di tahun anggaran selanjutnya dengan cara update data pegawai, alokasi anggaran hibah disesuaikan dengan kemampuan APBD, regulasi pemberian hibah diperjelas khususnya hibah pendidikan, dan formulasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Mempersiapkan regulasi dan anggaran terhadap situasi-situasi darurat perlu diperhatikan lebih seksama dan dipersiapkan lebih lanjut agar kedepannya tidak terjadi kurang siap terhadap situasi-situasi yang diluar rencana sehingga dalam proses pelaksanaan tidak terjadi terburu-buru.
- 3) Mengutamakan pengeluaran yang bersifat mendesak/rutin secara efektif dan efisien;
- 4) Membangun komitmen dan meningkatkan profesionalitas seluruh PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab masing- masing;
- 5) Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan. Termasuk dalam memformulasikannya dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub rincian obyek belanjanya agar tidak terjadi kesalahan;
- 6) Mereviu pedoman-pedoman yang disusun dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terjadi persamaan persepsi dan lebih operasional;
- 7) Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dan penatausahaan persediaan maupun barang milik daerah, dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri;
- 8) Melaksanakan pendampingan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi vertikal lain dalam rangka supervisi, pembinaan dan sebagainya sepanjang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku.



BAB 3

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Dalam rangka penyampaian penyelenggaraan urusan pemerintah daerah maka dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Probolinggo Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor : 6 Tahun 2019, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 yaitu hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Untuk hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Permendagri 18 Tahun 2020 meliputi :

- a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan
- b. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya
- c. Tindak lanjut rekomendari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, konkuren dan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalita serta kepentingan strategis nasional.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



3.1.1. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Menguatkan serta meningkatkan rata-rata lama sekolah dan memperbaiki sistem sistem pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan	PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH	Persentase Capaian Kinerja Program	%	80,00	92,76			
			2. Regulasi pembatasan jumlah siswa yang bersekolah di Kota Proolinggo dari luar Kota Probolinggo								
			3. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan dana BOS, dan mengarahkannya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	100,00	100,00	1) Terdapat belanja yang tidak dapat direalisasikan, pengadaan seragam batik pegawai dikarenakan gagal lelang dan tidak maksimalnya realisasi/serapan BBM untuk kendaraan dinas dan operasional akibat pembatasan sosial. 2) Secara pelaksanaan tidak ada kendala, karena pelaksanaan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja pada sub bagian Keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan target	1) Beberapa anggaran belanja sudah dialihkan kepada belanja yang dapat diserap maksimal sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan , 2) Menganggarkan sub kegiatan belanja pakaian batik pada tahun anggaran 2021 ; 3) Penyesuaian nomenklatur dan anggaran program kegiatan dan sub kegiatan Sub Bag Keuangan pada tahun 2021 agar dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi ; 4) Mengevaluasi hasil administrasi keuangan berdasarkan realisasi dan target kinerja per kegiatan, 5) Mensosialisasikan dan memberikan pemahaman	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			4. Meningkatkan pemerataan kualitas dan akses proses belajar mengajar di Kota Probolinggo		Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	60,00	60,71	output dan waktu pelaksanaan.	untuk prosedur penatausahaan keuangan agar pencapaian realisasi program kegiatan dan sub kegiatan lebih maksimal	
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100,00	97,99	1) Terdapat Beberapa belanja tidak dapat terserap dengan maksimal 2) Secara pelaksanaan tidak ada kendala, karena pelaksanaan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja pada sub bagian Keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan target output dan waktu pelaksanaan.	1) Mengalihkan belanja agar dapat optimal direalisasikan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada. 2) Mengevaluasi hasil kegiatan tata usaha perkantoran berdasarkan realisasi dan target kinerja per kegiatan, 3) mengatur waktu kegiatan dimasa pandemi yang direncanakan pada kegiatan yang akan dilaksanakan	
					Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100,00	76,83			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Program	%	80,00	64,29	1) Beberapa belanja tidak dapat diserap dengan maksimal, dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan kegiatan akibat pembatasan sosial.	1) Beberapa anggaran belanja sudah dialihkan kepada belanja yang dapat diserap maksimal sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan 2) Mengevaluasi hasil kinerja program berdasarkan realisasi dan target kinerja per kegiatan,	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									2) Belum maksimalnya perencanaan anggaran per kegiatan berdasarkan Indikator dan Target Kinerja Output, sehingga berpengaruh terhadap Realisasi Kinerja Program .	3) memberikan pemahaman yang lebih kepada pelaksana kegiatan terhadap Target Kinerja Kegiatan dan Program yang telah ditentukan.	
				PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Penduduk usia 5-6 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar PAUD	%	80,00	76,82			
					Persentase Penduduk usia 7-18 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar	%	95,69	96,12			
				Peningkatan Mutu Kurikulum PAUD	Persentase satuan PAUD yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	%	77,78	73,42	1) Beberapa belanja tidak terserap maksimal dikarenakan pelaksanaan sub sub kegiatan menyesuaikan dengan kondisi pembatasan sosia. 2) Beberapa Lembaga belum memenuhi indikator capaian Standar Proses dan Standar Isi	1) Mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan 2) Mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran pada satuan PAUD secara daring dan pengembangan KTSP PAUD yang disesuaikan dengan Kondisi COVID-19,	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Mutu Kurikulum Pendidikan Non Formal	Persentase satuan Pendidikan Non Formal yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	%	80,50	80,00	1) Beberapa belanja tidak terserap maksimal dikarenakan pelaksanaan sub sub kegiatan menyesuaikan dengan kondisi pembatasan sosia. 2) Beberapa Lembaga belum memenuhi indikator capaian Standar Proses dan Standar Isi	1) Mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan 2) Mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran pada satuan Pendidikan Nonformal secara daring dan pengembangan KTSP Pendidikan Nonformal yang disesuaikan dengan Kondisi COVID-19,	
				Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD	Persentase satuan PAUD yang terakreditasi	%	74,89	42,98	1) Beberapa rekening belanja tidak dapat diserap yaitu Belanja Honor Narasumber dan Perdin karena adanya pembatasan sosial; 2) Beberapa Satuan PAUD masih belum melaksanakan Akreditasi	1) Mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan; 2) Mengusulkan penambahan kuota untuk pelaksanaan Akreditasi Kelembagaan bagi Satuan PAUD, 3) Mengoptimalkan evaluasi mutu kelembagaan melalui data Raport Mutu dan DAPODIK PAUD, 4) Mengoptimalkan pemenuhan sarana pendidikan melalui BOP PAUD Daerah dan BOP PAUD DAK Non Fisik (sesuai prosentase dan RKAS)	
					Persentase satuan PAUD yang memenuhi Standar Sarana Prasarana	%	74,32	72,97			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal	Persentase satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	%	27,27	27,27	1) Beberapa rekening belanja tidak dapat diserap yaitu Belanja Honor Narasumber dan Perdin karena adanya pembatasan sosial 2) Tidak ada Kendala, terdapat peningkatan capaian jumlah akreditasi lembaga Non Formal,	1) Mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan 2) Mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Nonformal secara daring dan pengembangan KTSP Nonformal yang disesuaikan dengan Kondisi COVID-19,	
					Persentase satuan Pendidikan Nonformal yang memenuhi standar sarana prasarana	%	80,00	80,00			
				Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Karakter PAUD	Persentase Peserta Didik PAUD yang memenuhi standar kompetensi lulusan	%	90,80	90,09	1) Pelaksanaan beberapa Sub Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan adanya pembatasan / pelibatan peserta kegiatan, sehingga beberapa belanja tidak dapat diserap maksimal 2) Beberapa satuan PAUD capaian Indikator Standar Kompetensi Lulusan masih belum maksimal	1) Mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan protokol kesehatan 2) Melaksanakan Indikator Capaian SKL Peserta Didik PAUD sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku (penentuan SKL disesuaikan dengan kondisi COVID-19)	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Mutu dan Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Non Formal	Persentase Peserta Didik Pendidikan Nonformal yang memenuhi standar kompetensi lulusan.	%	80,00	80,00	1) Pelaksanaan beberapa Sub Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan adanya pembatasan / pelibatan peserta kegiatan, sehingga beberapa belanja tidak dapat diserap maksimal, 1 (Satu) 2) Satuan Pendidikan Non Formal belum memenuhi Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan SNP	1) Mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja sesuai dengan kondisi yang ada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 2) Melaksanakan Indikator Capaian SKL Peserta Didik Non Formal sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku (penentuan SKL disesuaikan dengan kondisi COVID-19)	
				Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD yang memperoleh Bantuan Pemenuhan Sarana Prasarana DAK Fisik PAUD	%	1,00	1,00	1) Belanja Perdin tidak dapat dilaksanakan, karena evaluasi dan koordinasi atas pelaksanaan DAK Fisik PAUD dilaksanakan secara daring 2) Belum maksimalnya perencanaan dan penganggaran khususnya untuk Belanja Kegiatan Fisik, sehingga diharapkan pelaksanaan DAK Fisik PAUD dapat terlaksana lebih awal	1) Penyerapan Anggaran DAK Fisik sesuai dengan ketentuan dan Juknis yang berlaku 2) Membuat time schedule pelaksanaan bagi kegiatan dan sub kegiatan Fisik	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang terpenuhi Biaya Operasionalnya	%	219,00	202,00	1) Beberapa belanja tidak dapat terserap maksimal, karena adanya pembatasan / pelibatan peserta , sehingga kegiatan rapat, sosialisasi bagi penerima BOP PAUD Daerah dan BOP PAUD DAK Non Fisik dilaksanakan secara daring/ virtual konferensi 2) Beberapa satuan PAUD belum memuhi ketentuan persyaratan untuk menerima BOP PAUD DAK Non Fisik	1) Mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 2) Optimalisasi pembinaan kepada Satuan PAUD untuk pengelolaan Dana BOP PAUD Daerah dan BOP PAUD DAK Non Fisik sesuai dengan ketentuan dan Juknis yang berlaku	
				Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta	Jumlah madrasah diniyah dan sekolah swasta yang terpenuhi BOP-nya	%	68,00	61,00	1) Beberapa belanja tidak dapat terserap maksimal, karena adanya pembatasan / pelibatan peserta 2) Beberapa Lembaga MADIN belum memenuhi kriteria persyaratan sebagai Penerima BPPDGS MADIN	1) Mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 2) Memberikan pembinaan dan sosialisasi terkait pengusulan Hibah dan Pengelolaan BPPDGS MADIN pada Pengelola Lembaga MADIN	
				PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN DASAR	Persentase Penduduk usia 7 - 12 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar SD	%	100,00	97,96			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Persentase Penduduk usia 13-15 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar SMP	%	97,00	101,13			
					Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Sarana Prasarana	%	83,82	80,66			
				Peningkatan Mutu Kurikulum Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	%	95,29	97,67	1) Pembatasan jumlah peserta dalam kegiatan, minimnya serapan belanja uang saku karena pembatasan pelibatan masyarakat/orang tua dalam kegiatan 2) Belum terpenuhinya standar isi dan proses pada 2 lembaga swasta	1) Melakukan kegiatan bertahap, memaksimalkan pencapaian outcome meski dengan keterbatasan peserta ; 2) Pendampingan lebih intensif dalam pengembangan KTSP dan pengembangan strategi pembelajaran	
				Peningkatan Mutu Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	%	80,00	89,66	1) Pembatasan jumlah peserta dalam kegiatan, minimnya serapan belanja uang saku karena pembatasan pelibatan masyarakat/orang tua dalam kegiatan ; 2) Belum terpenuhinya standar isi pada 3 lembaga swasta	1) Melakukan kegiatan bertahap, memaksimalkan pencapaian outcome meski dengan keterbatasan peserta; 2) Pendampingan lebih intensif dalam pengembangan KTSP	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD yang terakreditasi A	%	72,94	43,75	1) Pembatasan jumlah peserta dalam kegiatan, minimnya serapan beberapa rekening belanja karena pembatasan peserta kegiatan 2) Capaian SNP Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan pada Satuan Pendidikan Dasar SD pada beberapa Sekolah masih belum memenuhi indikator yang ditentukan	1) Mengoptimalkan penyerapan anggaran Sub Sub Kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan daring/virtual dan pembatasan peserta dengan tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan 2) Mengoptimalkan hasil capaian Raport Mutu Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021. 3) Memprioritaskan anggaran BOS dan BOSDA untuk pemenuhan SPM Pendidikan Dasar dan pemenuhan standar pendidikan yang lain sesuai dengna skala prioritas masing-masing satuan pendidikan SD ; 4) Optimalisasi pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana BOS dan BOSDA pada satuan pendidikan Dasar SD	
					Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang memenuhi standar sarana prasarana	%	72,94	66,27			
				Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP yang terakreditasi A	%	50,00	45,65	1) Pembatasan jumlah peserta dalam kegiatan, minimnya serapan	1) Mengoptimalkan penyerapan anggaran Sub Sub Kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP yang memenuhi standar sarana prasarana	%	60,71	55,56	beberapa rekening belanja karena pembatasan peserta kegiatan 2) Capaian SNP Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan pada Satuan Pendidikan Dasar SMP pada beberapa Sekolah masih belum memenuhi indikator yang ditentukan	daring/virtual dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi COVID-19; 2) Mengoptimalkan hasil capaian Raport Mutu Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021. 3) Memprioritaskan anggaran BOS dan BOSDA untuk pemenuhan SPM Pendidikan Dasar dan pemenuhan standar pendidikan yang lain sesuai dengan skala prioritas masing-masing satuan pendidikan SMP ; 4) Optimalisasi pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana BOS dan BOSDA pada satuan pendidikan Dasar SMP	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik Jenjang SD yang memenuhi standar Kompetensi Lulusan	%	88,27	72,94	1) Pelaksanaan beberapa Sub Kegiatan merupakan kegiatan Lomba atau even dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi Pembatasan Sosial akibat Pandemi COVID-19 ; 2) Beberapa satuan pendidikan SD masih belum mencapai standar sesuai dengan SNP Standar Kompetensi Lulusan 3) Pembinaan terhadap satuan pendidikan SD swasta belum dilaksanakan secara maksimal	1) Mengupayakan pelaksanaan sub kegiatan yang berupa even / Lomba yang bisa dilaksanakan secara virtual / daring; 2) Mengoptimalkan Standar Mutu Kelulusan berdasarkan Ketentuan Minimal SKL	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik Jenjang SMP yang memenuhi standar kompetensi lulusan	%	92,51	88,89	1) Pelaksanaan beberapa Sub Kegiatan merupakan kegiatan Lomba atau even dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi Pembatasan Sosial akibat Pandemi COVID-19; 2) Beberapa satuan pendidikan SMP masih belum mencapai standar sesuai dengan SNP Standar Kompetensi Lulusan , 3) Pembinaan terhadap satuan pendidikan dasar SMP swasta belum dilaksanakan secara maksimal	1) Mengupayakan pelaksanaan sub kegiatan yang berupa even / Lomba yang bisa dilaksanakan secara virtual / daring; 2) Mengoptimalkan penyerapan anggaran BOSDA sesuai dengan Rencana Kebutuhan Prioritas pada Satuan Pendidikan Dasar SD dan SMP Negeri, 3) Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOSDA ; 4) koordinasi dengan pihak 2 yang terkait agar	
				Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP	Jumlah satuan Pendidikan SD yang terpenuhi biaya operasionalnya	%	75,00	75,00	1) Belanja Modal bagi satuan pendidikan dasar yang ada pada Belanja BOSDA tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya realokasi anggaran BOSDA untuk penanganan COVID - 19 ; 2) Semua Satuan SD dan SMP Negeri dapat menerima anggaran BOSDA ,	1) Mengupayakan pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi sesuai dengan ketentuan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan; 2) Mengoptimalkan penyerapan anggaran BOSDA sesuai dengan Rencana Kebutuhan Prioritas pada Satuan Pendidikan Dasar SD dan SMP Negeri, 3) Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOSDA;	
				Jumlah satuan Pendidikan SMP yang terpenuhi biaya operasionalnya	%	10,00	10,00				



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									3) Pengelolaan BOSDA masih perlu ditingkatkan	4) koordinasi dengan pihak 2 yang terkait agar pelaksanaan pengelolaan BOSDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
				Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah satuan pendidikan SD yang terpenuhi sarana prasarana	%	77,00	77,00	1) Penganggaran belum optimal karena belum bisa memproyeksikan kebutuhan insidental atas perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan DAK Fisik SD; 2) Belum semua Satuan Pendidikan Dasar SD dapat terpenuhi pemenuhan sarana prasarananya melalui Anggaran DAK Fisik SD, sehingga satuan pendidikan dasar SD yang mendapat alokasi DAK Fisik SD sesuai dengan hasil evaluasi dan analisa skala tingkat kerusakan fisik	1) Mengupayakan pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi sesuai dengan ketentuan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan; 2) Pemenuhan Sarana Prasarana Fisik SD berdasarkan skala prioritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 3) Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan DAK Fisik dengan instansi terkait (Dinas PUPR, BPPKAD, Bappeda Litbang) ; 4) Melakukan Pengawasan dan monitoring pelaksanaan DAK Fisik SD	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan Pendidikan SMP yang terpenuhi sarana prasarana	%	12,00	12,00	1) Penganggaran belum optimal karena belum bisa memproyeksikan kebutuhan insidental atas perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan DAK Fisik SMP; 2) Belum semua Satuan Pendidikan Dasar SD dapat terpenuhi pemenuhan sarana prasarananya melalui Anggaran DAK Fisik SD, sehingga satuan pendidikan dasar SD yang mendapat alokasi DAK Fisik SD sesuai dengan hasil evaluasi dan analisa skala tingkat kerusahakan fisik	1) Menyesuaikan perubahan rekening Belanja DAK Fisik SD melalui perubahan penjabaran DPPA Kegiatan 2) Pemenuhan Sarana Prasarana Fisik SMP berdasarkan skala prioritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 3) Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan DAK Fisik dengan instansi terkait (Dinas PUPR, BPPKAD, Bappeda Litbang) 4) Melakukan Pengawasan dan monitoring pelaksanaan DAK Fisik SMP	
				Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terpenuhi Biaya Operasionalnya	%	85,00	85,00	1) Perencanaan dan penganggaran BOS pada satuan pendidikan dasar masih belum optimal ; 2) Penatausahaan dan pelaporan Dana BOS pada satuan pendidikan dasar mash belum optimal	1) Mengoptimalkan penyerapan anggaran BOS sesuai dengan DPA dan RKAS Satuan Pendidikan Dasar SD dan SMP Negeri; 2) Memberikan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri, 3) Melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran dana BOS , 4) Bekerjasama dengan APIP untuk pengawasan dana BOS	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				PENGEMBANGAN KEPROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Nonformal yang memenuhi Standar Kompetensi	%	69,44	58,60			
					Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Kompetensi	%	70,00	52,68			
				Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal	Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Nonformal yang tersertifikasi dan menerapkan standar proses	%	58,00	57,21	1) Pembatasan jumlah peserta dalam kegiatan, minimnya serapan beberapa rekening belanja karena pembatasan peserta kegiatan 2) Masih adanya Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD dan Nonformal belum memenuhi standar sebagaimana yang ditentukan	1) Perubahan anggaran pada rekening belanja agar dapat diserap dan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi COVID-19; 2) Melaksanakan evaluasi terhadap peta kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, 3) Optimalisasi data Capaian Mutu Standar Pendidik dan Kependidikan PAUD dan Nonformal untuk peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan pada tahun	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar yang tersertifikasi dan menerapkan standar proses	%	56,00	48,61	1) Pembatasan jumlah peserta dalam kegiatan, minimnya serapan beberapa rekening belanja karena pembatasan peserta kegiatan 2) Masih adanya Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Dasar belum memenuhi standar sebagaimana yang ditentukan	Perubahan anggaran pada rekening belanja agar dapat diserap dan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi COVID-19 2) Melaksanakan evaluasi terhadap peta kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, 3) Optimalisasi data Capaian Mutu Standar Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Dasar untuk peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan pada tahun selanjutnya	
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemantapan peran masyarakat dalam tindakan preventif penyakit sedini mungkin Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, PP dan KB	indeks	78	82,74			
			Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara merata serta menyediakan Rumah Slinggah Rujukan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Presentase laporan keuangan yang tepat waktu	%	100	100	Anggaran untuk kegiatan yang memerlukan tatap muka banyak yang tidak terserap dengan adanya pandemi	Melakukan efisiensi/ pengurangan dan peralihan anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID 19	
			Peningkatan cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Probolinggo		Presentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	70	33,34		Evaluasi penugasan tambahan dalam masa pandemi COVID 19 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Pembangunan Rumah Sakit Baru dan Peningkatan Kelas RSUD Kota Probolinggo							dan Keluarga Berencana dimana realisasi kegiatan lebih di fokuskan pada kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID 19	
			Peningkatan Pelayanan dan Manajemen Puskesmas	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi Perkantoran	%	80	80	Keterbatasan pendanaan karena dana Pusat tidak tersalurkan sepenuhnya sehingga tidak maksimal dalam menggunakan dana		
			Pengembangan kerjasama dan kemitraan untuk Peningkatan						Tambahan anggaran saat PAPBD relatif Besar dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan relatif singkat		
					Presentase administrasi kepegawaian yang tepat waktu	%	100	100			
					Presentase ketatalaksanaan yang tepat waktu	%	80	80			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Presentase capaian kinerja kegiatan minimal 80 %	%	80	64,41	Keterbatasan pendanaan karena dana Pusat tidak tersalurkan sepenuhnya sehingga tidak maksimal dalam menggunakan dana		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang sesuai Standar	%	100	100			
				Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan ANC sesuai standar	Bumil	4.083	3.604			
					Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Persalinan sesuai standar	Bulin	3.898	3.632			
					Jumlah Pelayanan Bayi Baru Lahir yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Bayi	3.712	3.572			
					Jumlah Pelayanan Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balita	18.490	13.186	Pembatasan pemeriksaan dan kunjungan Posyandu sehingga capaian rendah		
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Screning Kesehatan sesuai standar	Anak usia pendidikan dasar US	23.373	1.955	Tidak adanya kegiatan pembelajaran tatap muka sehingga jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat screening rendah	Pemeriksaan Skrening dengan Google Form kepada semua sekolah untup setiap murid	
					Jumlah Warga yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat Screning Kesehatan sesuai standar	Lansia	23.391	11.750	Pembatasan pemeriksaan dan kunjungan Lansia sehingga capaian rendah	Pemeriksaan dan perawatan Lansia dengan kunjungan rumah dan menghadirkan lansia secara bertahap sebanyak 30 org dalam sehari 2 tahap	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Prevalensi Penurunan Kurang gizi	Balita gizi Buruk	1.498	59	Balita dengan status gizi buruk yang ditemukan dan ditangani rendah		
				Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	RT	61.474	67.045	Adanya batasan kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat selama pandemi		
				jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM	Kelurahan	29	12				
				Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja yang terbentuk	Pos UKK	12	12				
				Jumlah Kelompok masyarakat di wilayah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	kelompok	80	80				
				Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah promosi kesehatan yg dilaksanakan	kali	5	5	Pembatasan kegiatan pertemuan karena pandemi	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yg bukan mengumpulkan orang/pertemuan Penerapan protokol kesehatan scr ketat pd kegiatan pertemuan	
				Jumlah upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yg sesuai standart	UKBM	5	4	Adanya penambahan anggaran pada tribulan 4			
				Pelayanan Jaminan Persalinan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Pertolongan Persalinan Sesuai standart	Bumil	3.898	3.632	Kinerja tercapai namun pembiayaan untuk pembiayaan jaminan persalinan tidak terserap karena sudah ditanggung oleh UHC/ BPJS		
				Jumlah Pelayanan Bayi Paripurna	Bayi Baru Lahir	3.712	3.572				



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelayanan Dan Sumberdaya Kesehatan Akibat Dampak Rokok	Persentase Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Yang sesuai Standar (Akibat Dampak Rokok)	%	100	100			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Rokok	Jumlah fasilitas kesehatan yang difasilitasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan akibat dampak rokok	faskes	6	5	Kondisi pandemi covid-19 pada Triwulan I s/d III ada ketidakpastian ketersediaan anggaran DAU dan DID, sehingga penyerapan serta kebijakan mengadakan kegiatan pertemuan tidak dapat dilaksanakan	Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada triwulan III dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dengan cara virtual	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Akibat Dampak Rokok	Jumlah SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat akibat dampak rokok	orang	30	-	Penghentian kegiatan pelatihan dikarenakan pandemi Covid-19	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan secara daring/zoom meeting	
				Pemenuhan Sarana dan Prasarana Promotif dan Preventif Akibat Dampak Rokok	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar akibat dampak rokok	jenis	8	8			
				Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas dengan capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang bernilai BAIK	%	100	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wonoasih	Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi pembiayaannya di Puskesmas Wonoasih	kegiatan	76	22	Tertundanya pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa serta turunnya jumlah kunjungan baik rawat jalan maupun rawat inap di puskesmas dan puskesmas pembantu, yang berdampak pada penurunan pendapatan selama pandemi Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang banyak, harus dilakukan pengurangan jumlah peserta (maksimal 30 orang) yang berdampak pada realisasi penyerapan anggaran	Menyediakan layanan kontak secara tidak langsung Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang banyak, dilakukan pengurangan jumlah peserta sesuai dengan himbauan satgas covid, agar kegiatan tetap terlaksana	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Ketapang	Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi pembiayaannya di Puskesmas Ketapang	kegiatan	35	14	Kegiatan baru bisa dilaksanakan pada Tribulan kedua/ April karena menunggu perubahan penjabaran perwali terkait penyesuaian dan Penggunaan Alokasi DAK 2020 dan Kondisi Bencana Pandemi Covid -19 yang mengharuskan protokol Kesehatan sehingga kegiatan sosialisasi dan edukasi kesehatan tidak bisa terserap secara maksimal	Melaksanakan kegiatan pertemuan sesuai protokol kesehatan	
				Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Kanigaran	Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi pembiayaannya di Puskesmas Kanigaran	kegiatan	80	70	Kegiatan baru bisa dilaksanakan pada Tribulan kedua/ April karena menunggu perubahan penjabaran perwali terkait penyesuaian dan Penggunaan Alokasi DAK 2020 dan Kondisi Bencana Pandemi Covid -19 yang mengharuskan protokol Kesehatan sehingga kegiatan sosialisasi dan edukasi kesehatan tidak bisa terserap secara maksimal	Melaksanakan kegiatan pertemuan sesuai protokol kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Sukabumi	Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi pembiayaannya di Puskesmas Sukabumi	kegiatan	20	15	Kegiatan tidak dapat terlaksana selama pandemi	Melaksanakan kegiatan pertemuan sesuai protokol kesehatan	
				Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Jati	Jumlah Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi pembiayaannya di Puskesmas Jati	kegiatan	38	23	Kegiatan tidak dapat terlaksana selama pandemi	Melaksanakan kegiatan pertemuan sesuai protokol kesehatan	
				Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Kedopok	Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi pembiayaannya di Puskesmas Kedopok	kegiatan	102	37	Selama pandemi Covid-19 tidak bisa mengumpulkan kader, sehingga rencana kegiatan secara tatap muka tidak bisa dilaksanakan	Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di sampaikan melalui grup WA kader dan apabila memerlukan pertemuan tatap muka dilaksanakan dengan protokol kesehatan	
				Management Batuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Cakupan kegiatan management penunjang kegiatan promotif dan preventif	kegiatan	5	5			
				Bantuan Operasional Distribusi Obat E-Logistik	Jumlah pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kesehatan yang difasilitasi pembiayaannya	fasyankes	6	6			
				Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi pembiayaannya di Dinas Kesehatan	kegiatan	3	4	Kegiatan baru bisa dilaksanakan pada Tribunal kedua/ April karena menunggu perubahan penjabaran perwali	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yg bukan mengumpulkan orang/pertemuan	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									terkait penyesuaian dan Penggunaan Alokasi DAK 2020 dan Kondisi Bencana Pandemi Covid -19 yang mengharuskan protokol Kesehatan sehingga kegiatan sosialisasi dan edukasi kesehatan tidak bisa terserap secara maksimal	Penerapan protokol kesehatan scr ketat pd kegiatan pertemuan	
				Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang sesuai standar	%	100	100			
					Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang sesuai standar	%	100	100			
				Peningkatan Surveilans Dan Imunisasi	Jumlah Kelurahan yang mencapai target Universal Child Immunization (UCI)	kelurahan	29	25	Kegiatan baru bisa dilaksanakan pada Tribulan kedua/ April karena menunggu perubahan penjabaran perwali terkait penyesuaian dan Penggunaan		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Persentase anak usia 0 – 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	95	82	Alokasi DAK 2020 dan Kondisi Bencana Pandemi Covid -19 yang mengharuskan protokol Kesehatan sehingga kegiatan sosialisasi dan edukasi kesehatan tidak bisa terserap secara maksimal		
					Persentase Kasus wabah dan atau KLB yang ditemukan dan ditangani < 24 jam	%	100	100			
				Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	610	237	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan kegiatan program karena pandemi Covid-19 2. Petugas TB/HIV diperbantukan untuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sehingga kegiatan program TB banyak yg tertunda 3. Kegiatan kontak tracing pasien TB oleh kader program TB/ pendampingan pasien HIV oleh manajer kasus program HIV dikurangi karena 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan program yang bersifat rutin (skrining pasien, pengobatan, pencatatan & pelaporan) tetap dilaksanakan selama pandemi Covid-19 2. Petugas TB tetap melaksanakan kegiatan skrining pasien, pengobatan, pencatatan & pelaporan 3. Kegiatan kontak tracing pasien TB oleh kader program TB/ pendampingan pasien HIV oleh manajer kasus program HIV dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat 	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	5.500	2.942	pandemi Covid-19 4. Kegiatan penyemprotan (fogging) sarang nyamuk terbatas di luar ruangan		
					Prosentase kasus DBD yang ditemukan dan mendapat penanganan sesuai standar	%	100	100			
				Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah pelayanan kesehatan setiap warga negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	77.847	54.309	Kegiatan Posbindu / Pandu PTM dan kegiatan sosialisasi yang melibatkan orang banyak/ tatap muka tidak dapat dilaksanakan selama pandemi		
					Jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	28.909	8.460			
					Jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	4.143	5.168			
					Jumlah pelayanan kesehatan penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB)	orang	261	494			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
					Jumlah Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Napza	orang	220	75			
				Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Akibat Dampak Rokok	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang sesuai standar Akibat Dampak Rokok	%	100	100			
				Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Akibat Dampak Rokok	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang sesuai standar Akibat Dampak Rokok	kegiatan	5	3			
				Pelayanan Imunisasi, Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Akibat Dampak Rokok	Jumlah Pelayanan Imunisasi, Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah yang sesuai standar Akibat Dampak Rokok	kegiatan	1	2	Kondisi Bencana Pandemi Covid -19 yang mengharuskan protokol Kesehatan Sehingga kegiatan sosialisasi, Bimtek dan Edukasi Kesehatan tidak bisa terserap secara maksimal		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Akibat Dampak Rokok	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang sesuai standar Akibat Dampak Rokok	kegiatan	8	5	Kondisi Bencana Pandemi Covid -19 yang mengharuskan protokol Kesehatan Sehingga kegiatan sosialisasi, Bimtek dan Edukasi Kesehatan tidak bisa terserap secara maksimal		
				Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase Puskesmas dengan Capaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP) di FKTP yang bernilai 95%	%	100	100			
				Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Wonoasih	Angka Kontak	per-mil	150	14,58	Jumlah kunjungan menurun selama pandemi	Melakukan pelayanan dengan protokol kesehatan	
					Rasio rujukan non spesialistik	%	5	5			
					Rasio peserta prolans	%	50	40			
				Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ketapang	Angka Kontak	per mil	150	60,07	Jumlah kunjungan menurun selama pandemi	Melakukan pelayanan dengan protokol kesehatan	
					Rasio rujukan non spesialistik	%	5	5			
					Rasio peserta prolans	%	50	40			
				Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kanigaran	Angka Kontak	per mil	60	39,55	Jumlah kunjungan menurun selama pandemi	Melakukan pelayanan dengan protokol kesehatan	
					Rasio rujukan non spesialistik	persen	5	5			
					Rasio peserta prolans	persen	86	80			
				Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sukabumi	Angka Kontak	per mil	120	103	Jumlah kunjungan menurun selama pandemi	Melakukan pelayanan dengan protokol kesehatan	
					Rasio rujukan non spesialistik	%	3	2			
					Rasio peserta prolans	%	75	54			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Jati	Angka Kontak	permil	60	52	Jumlah kunjungan menurun selama pandemi	Melakukan pelayanan dengan protokol kesehatan	
					Rasio rujukan non spesialisistik	%	5	5			
					Rasio peserta prolanis	%	80	75			
				Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kedopok	Jumlah angka kontak	per mil	60	210,22	Jumlah kunjungan menurun selama pandemi	Melakukan pelayanan dengan protokol kesehatan	
					Rujukan non spesialisistik	%	5	5			
					Rasio peserta prolanis	%	50	50			
				Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Pustu Dan Jaringannya	Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	%	100	100			
				Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang sarana dan prasarannya sesuai standar	Fasyankes	8	8			
				Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	Jumlah alat kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang memenuhi standar	jenis	636	628			
				Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai standar	%	100	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Wonoasih yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan di Puskesmas Wonoasih yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai standar	%	100	85,2			
				Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Ketapang yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan di Puskesmas Ketapang yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai standar	%	100	99			
				Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Sukabumi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan di Puskesmas Sukabumi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai standar	%	100	85			
				Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Jati yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan di Puskesmas jati yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai standar	%	100	91,02			
				Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kedopok yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan di Puskesmas Kedopok yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai standar	%	100	99			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kanigaran yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan di Puskesmas Kanigaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai standar	%	100	90			
				Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai standar	%	100	100			
				Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Akibat Dampak Rokok	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang sesuai standar (akibat dampak rokok)	%	100	59.96			
				Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Akibat Dampak Rokok	program prioritas dan program pendukung kesehatan yang di promosikan (akibat dampak rokok)	program	5	5	Kondisi Bencana Pandemi Covid -19 yang mengharuskan protokol kesehatan, sehingga kegiatan sosialisasi, Bimtek dan Edukasi Kesehatan tidak bisa terserap secara maksimal	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yg bukan mengumpulkan orang/pertemuan Penerapan protokol kesehatan secara ketat pada kegiatan pertemuan	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Akibat Dampak Rokok	Jumlah peningkatan kesehatan keluarga dan gizi yang sesuai standar (akibat dampak rokok)	kegiatan	19	6	Kondisi Bencana Pandemi Covid -19 yang mengharuskan protokol Kesehatan, sehingga kegiatan sosialisasi, Bimtek dan Edukasi Kesehatan tidak bisa terserap secara maksimal		
				Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Akibat Dampak Rokok	Jumlah Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (akibat dampak rokok)	kegiatan	5	5	Kondisi Bencana Pandemi Covid -19 yang mengharuskan protokol Kesehatan, sehingga kegiatan sosialisasi, Bimtek dan Edukasi Kesehatan tidak bisa terserap secara maksimal		
				Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	%	100	100			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang Memenuhi Standar	Fasyankes	6	6	Kondisi Bencana Pandemi Covid -19 yang mengharuskan protokol Kesehatan, sehingga kegiatan sosialisasi, Bimtek dan Edukasi Kesehatan tidak bisa terserap secara maksimal	Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada triwulan III dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dengan cara virtual	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Memenuhi Standar Kelas RS.nya	Fasyankes	4	4			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional yang Memenuhi Standar	Fasyankes	12	12	Pada Triwulan I s/d III ada ketidakpastian ketersediaan anggaran DAU dan DID, sehingga penyerapan serta kebijakan mengadakan kegiatan pertemuan tidak dapat dilaksanakan		
					Jumlah Laboratorium Dasar yang sesuai standar	Fasyankes	7	6			
					Jumlah Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan	Unit	1	1			
				Peningkatan Ketersediaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah fasilitas kefarmasian yang difasilitasi dalam upaya memenuhi standar	Farsyanfar	80	51			
					Jumlah sediaan farmasi yang tersedia di Instalasi Farmasi Kesehatan sesuai standar	Jenis	362	308			
					Persentase pemenuhan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sesuai standar	%	70	76			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase Rekomendasi Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	%	100	100	Pembatasan kegiatan pertemuan tatap muka dikarenakan pandemi Covid-19	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan secara daring/zoom meeting	
					Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Sarana Kesehatan	%	100	100			
					Jumlah Tenaga Fungsional Kesehatan yang Mendapat Pelatihan	orang	60	-			
					Persentase Penerbitan Penilaian Angka Kredit (PAK)	%	100	100			
				Peningkatan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan	Jumlah pemenuhan sediaan farmasi dan Alkes yang tersedia di Instalasi Farmasi Kesehatan sesuai standar	jenis	998	936			
				Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Wonoasih	Indeks kepuasan masyarakat di puskesmas wonoasih	Indeks	80	85,2	Penurunan jumlah kunjungan dan pembatasan kegiatan karena pandemi	Melakukan pelayanan dengan protokol kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Ketapang	Indeks Kepuasan masyarakat di Puskesmas Ketapang	Indeks	80	79,2	Penurunan jumlah kunjungan dan pembatasan kegiatan karena pandemi	Melakukan pelayanan dengan protokol kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Kanigaran	Indeks Kepuasan masyarakat di puskesmas Kanigaran	Indeks	80	79	Pembatasan kegiatan tatap muka sehingga anggaran konsumsi rapat tidak terserap		
				Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Sukabumi	Indeks Kepuasan masyarakat di puskesmas sukabumi	Indeks	90	81			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Jati	Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Jati	Indeks	80	80			
				Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Kedopok	Indeks Kepuasan masyarakat di puskesmas Kedopok	Indeks	80	80,1	Jumlah kunjungan menurun selama pandemi		
				Pengelolaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Indeks kepuasan masyarakat di Labkesda	Indeks	82	82			
				Pelayanan Kesehatan bagi Warga Kota Probolinggo	Jumlah warga penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayarkan premi asuransi/ jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo	orang	32.730	64.441			
3	Kesehatan	RSUD	1. Pengembangan kerjasama dan kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2. Peningkatan fasilitas pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada BLUD		%	100%	171.32			
				Pelayanan serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan BLUD	Peningkatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasien	%	100%	171.32			
				Peningkatan Sarana Prasarana Layanan RS		%	100%	5.16			
				Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	Pengadaan Alat - alat Kesehatan di Rumah Sakit	%	100%	0	Tidak ada alokasi		
				Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana RS Rujukan Nasional, Provinsi, dan Regional yang belum memenuhi Standar Kelas 13003	Pemenuhan Ruang IBS sesuai standart kelas di Rumah Sakit	%	100%	0	Tidak ada alokasi		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional ang belum memenuhi standar kelas	Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	%	100%	0	Recofusing covid		
				Pembangunan Gedung RS Bantuan Keuangan Provinsi	Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai III	%	100%	0	Tidak ada alokasi		
				Pengadaan Alat dan Penunjang Sarana Prasarana RS Bantuan Provinsi	Untuk Pembelian Alat Kedokteran Bedah	%	100%	0	Tidak ada alokasi		
				Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS	- Gaji Tenaga Kontrak - Pemenuhan Alat Kedokteran Rumah Sakit	%	100%	99.31			
				Pembangunan dan/atau Peningkatan Gedung Sarana RS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Rawat Inap	%	100%	0	Tidak mencukupi waktu untuk proses lelang		
				Rehabilitasi dan/atau Renovasi Gedung Sarana RS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Gedung IGD	%	100%	0	Terkendala proses hibah gedung	Sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkes terkait proses hibah gedung	
				Penyediaan Alat Kesehatan RS	Pengadaan Alat Kesehatan DAK	%	100%	57.33			
				Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Viruse Disease 2019 (Covid -19)	Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid - 19	%	100%	78.81			
				Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Peningkatan Pelayanan RS	%	100%	63.58			
				Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak	Peningkatan sarana Pelayanan Kesehatan RS	%	100%	75.46			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya							
				Pembinaan Lingkungan Sosial		%	100%	95.08			
				Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kanigaran yang bekerjasama dengan BPJS	Prosentase pemeliharaan / pembangunan dan rehabilitasi gedung rumah sakit dari anggaran DBHCHT	%	100%	0			
				Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kanigaran yang bekerjasama dengan BPJS melalui Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang	Pemenuhan alat kesehatan melalui dana DBHCHT	%	100%	118.97			
				Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana yang bekerjasama dengan BPJS	Jumlah Alat Kedokteran dan Fasilitas Penunjang Lain ang Terpenuhi dari anggaran DBHCHT	%	100%	145.19			
4	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR PKP Kota Probolinggo	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	80	80			
				Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	80	80			
				Kegiatan Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Ketatalaksanaan tepat waktu	%	80	80			
				Kegiatan Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	80	80			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Meningkatnya Penataan Ruang sesuai RTRW	Program Penataan Ruang Dan Bangunan	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	81	75			
				Kegiatan Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Disusun sesuai Ketentuan	dokumen	2	2			
				Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase IMB yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	71	65			
			Meningkatnya Kualitas Fasilitas Umum	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Keciptakarya	Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	%	86	80			
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum serta Jasa Konstruksi	Jumlah bangunan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara	bangunan	75	70			
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah Pembangunan Sambungan Rumah	SR	100	100			
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik	Jumlah sarana dan prasarana limbah domestik yang Terbangun dan Terpelihara	IPAL	10	9			
				Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik	Jumlah sarana dan prasarana limbah domestik yang Terbangun dan Terpelihara	IPAL	10	0			
			Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kebinamargaan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	78	94.69			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun	Km	19,45	24			
				Kegiatan Pengelolaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terpelihara dengan Baik	Km	19,45	24			
				Kegiatan Pengelolaan Pematusan Jalan Kota	Panjang Pematusan / Drainase Jalan Kota yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	Km	71	82			
				Kegiatan Peningkatan Jalan	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun	Km	77,65	0			
				Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terpelihara dengan Baik	Km	38,83	38.83			
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	%	81	74.12			
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Panjang jaringan irigasi dan drainase yang terbangun	Km	13	12			
				Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Panjang jaringan irigasi dan drainase yang terpelihara	Km	11	10			
				Kegiatan Penatagunaan Sumber Daya Air	Jumlah Warga yang Diikutsertakan dalam Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	Orang	900	860			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa	Panjang jaringan irigasi dan drainase yang terpelihara	Km	0,70	0			
5	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPUKR PKP Kota Probolinggo	Penataan dan Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	73	100			
				Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Perumahan	Jumlah Prasarana dan Sarana Perumahan yang Ditangani	meter	3.000	3.000			
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman yang Ditangani	meter	17.000	17.000			
				Kegiatan Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Lingkungan Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota	%	21	21			
				Kegiatan Pengelolaan Rusunawa	Persentase Fasilitas Rusunawa Dalam Kondisi Baik	%	80	80			
6	Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo	Satpol PP sebagai Anggota di Bidang Keamanan dan Ketertiban	PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH		%	83	83			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	80	80			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	80	80			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Program	%	90	90			
			Meningkatkan pengawasan terhadap Perda dan Perkada	PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Persentase Peningkatan Kepatuhan Perda dan Perkada	Orang	430	430			
				Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran PERDA dan PERKADA	Jumlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan	Orang	30	30			
				Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada	Jumlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan	Orang	400	400			
			Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM	Persentase gangguan Trantibum yang ditangani	Orang	2.464	2.464			
				Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	Orang	2.235	3.806	jumlah 906 merupakan kasus Trantibum dan 2900 merupakan pelanggaran Prokes		
				Pengembangan Sumberdaya Manusia Satpol PP	Jumlah personil satpol pp yang mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang satpol pp	Personel	229	229			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Perlindungan masyarakat	Linmas	237	237			
				Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan Kompetensi anggota Linmas	Linmas	237	237			
				Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	jumlah warung /toko yg didata terkait pita cukai	Toko	45	45			
				Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Pita Cukai yang Bukan Haknya, Pita Cukai yang Salah Peruntukkan, Pita Cukai Bekas dan Tanpa Pita Cukai.	jumlah warung /toko yg didata terkait pita cukai	Toko	45	45			
				Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	jumlah kegiatan sosialisasi terkait cukai	Kegiatan					
				Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	jumlah kegiatan sosialisasi terkait cukai	Kegiatan			Anggaran kena refocusing		
7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Perlibatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	80	80			
			2. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	80	80			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			3. Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan		b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	80	80			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	80	80			
					b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	80	80			
					c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	80	80			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	80	80			
				Program Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana	%	90	90			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana				1. Realisasi anggaran pada kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 70,09%. 2. Target Kinerja dan Realisasi Target Kinerja untuk kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2020 adalah 0, karena pada tahun anggaran 2020 dilakukan refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid -19 dari Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana khususnya anggaran sub kegiatan pembentukan kelurahan tangguh bencana.	1. Pada rencana awal akan melakukan pengadaan sumur injeksi yang butuh alokasi anggaran lebih besar daripada pengadaan sumur resapan dimana ternyata lebih sesuai dengan lokasi lingkungan serta dilakukannya efisiensi anggaran 2. Pada Tahun 2020 telah dilakukan pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran dengan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur	
				Penanganan Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	100	Realisasi anggaran pada kegiatan Penanganan Kedaruratan dan Logistik Tahun 2020 tercapai realisasi anggaran sebesar 79,97%	Adanya Relawan yang mengundurkan diri, yang awalnya berjumlah 30 orang berkurang menjadi 24 orang sehingga anggaran tidak terserap dan kejadian bencana tidak dapat diprediksi dengan pasti	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Rehabilitasi dan Rekonstruksi	a. Persentase Rehabilitasi Korban Bencana yang ditangani.	%	90	90			
					b. Persentase Rekonstruksi Dampak Bencana yang ditangani.	%	90	90			
8	Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo	Perlibatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	PENANGANAN KEBAKARAN							
				Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai reponsif time	Kejadian	25	25			
8	URUSAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah melalui Penerapan Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%					
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	85%	81%			
					Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	85%	81%			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	85%	85%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	85%	85%			
					Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	85%	85%			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan	%	85%	80%			
			Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo	Pelayanan Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	%					
				Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Orang	40	40			
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Orang	160	96			
				Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Orang	50	45			
					Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Orang	170	125			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Pembinaan dan Advokasi dari LK3	Orang	50	0	Adanya Refocusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19	Melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas	
					Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	1.300	1.217			
					Jumlah Sasaran yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan Bencana Berbasis Masyarakat		300	200			
					Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	60	100			
			Optimalisasi Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial	%					
				Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Layanan Pengentasan Kemiskinan	Orang	36	35			
				Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Persentase Kegiatan Verval yang terlaksana	%	100	100			
				Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Jumlah Sasaran dari Orsos yang mendapatkan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sosial	Orang	95	88			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Jumlah Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Kegiatan	2	2			
				Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo	Pembinaan Lingkungan Sosial						
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi PMKS	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	Orang	30	30			
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Jumlah Kepala Rumah Tangga/Janda yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	Orang	30	35			
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	Orang	15	15			
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putusu sekolah dan Lansia Produktif yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	Orang	30	30			



3.1.2. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Tabel 3. 2 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Ketenagakerjaan	DPMPTSP NAKER	Menguatkan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Program Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	%	78,3	63			
			Memberikan pelatihan untuk peningkatan skill serta re-orientasi terhadap sektor strategis dan potensial melalui Balai Latihan Kerja	Kegiatan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang memanfaatkan peluang Penempatan Kerja melalui Job Fair	Pencari Kerja	180	180			
					Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	Pencari Kerja	30	30			
				Kegiatan Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pencari kerja yang meningkat keterampilan kerjanya.	Pencari Kerja	48	48			
				Pengelolaan UPT BLK	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi latihan kerja.	Pencari Kerja	864	288	Kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan akibat pandemic covid		
			Meminimalisir sengketa perburuhan	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penurunan kasus tenaga kerja	%	61,4	61,4			
					Persentase kepesertaan Jamsostek	%	0	0	-Karena adanya recofusing anggaran kegiatan		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang mendapatkan penguatan kelembagaannya.	Perusahaan	88	88			
					Persentase Kasus yang di fasilitasi.	Kasus	78	78			
				Kegiatan Fasilitasi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	%	50	50			
					Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan pengupahan yang di hasilkan.	rekomendasi	2	2			
					Jumlah perusahaan yang memfasilitasi kepesertaan Jamsostek.	Perusahaan	60	60			
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat	peserta	100	100			
				Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat	peserta	16	16			
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kegiatan Politik dan Ekonomi	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	%					



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi	Orang	200	142			
					Persentase peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga politik, organisasi wanita	%					
					Persentase organisasi wanita yang berperan aktif dalam pembangunan	%					
				Pelebagaan Pengasutamaan Gender (PUG)	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas		235	112			
			1. Mengoptimalkan PPT dalam Pengaduan dan Pembinaan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2. Menekan Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan yang belum mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	%					
					Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	%					
				Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani dan diselesaikan	%	100	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Persentase pekerja perempuan dan anak yang mendapatkan pengawasan dan perlindungan	%					
					Persentase jejaring yang berperan dlm penanganan permasalahan perempuan dan anak	%					
				Pengarasutamaan Hak dan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak yang diinisiasi	Kelurahan dan Kecamatan	20	29			
					Jumlah Kampung Ramah Anak dan Forum Anak	Kampung					
					Jumlah PATBM						
			Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kegiatan Politik dan Ekonomi	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase peningkatan jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	%					
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan keterampilan	Orang	50	60			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD	
3	Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri	Peningkatan Ketahanan Pangan	Rasio ketersediaan pangan	Skor	0.54	0.74	Karena Produksi Bruto padi turun (9%) dan jagung turun (5%) dan jumlah penduduk bertambah menyebabkan rasio ketersediaan pangan menurun	Meningkatkan produktivitas dan luas tanam padi dan jagung		
					Persentase Peningkatan pemanfaatan pangan	%	0.07	-0.33	Jumlah Balita yang hadir/ditimbang berkurang dari tahun lalu dikarenakan pandemi ,balita yang naik BB nya sangat rendah asupan gizi penyediaan pangankeluarga berkurang serta pendapatan keluarga menurun akiba PHK dan atau karena pandemi covid	Sosialisasi pentingnya Posyandu, Sosialisasi MP ASI		
				Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	58	67.66				
					Jumlah penanganan daerah rawan pangan	Lokasi	5	5	Tidak adanya Perda yang mengatur Cadangan Pangan Pemerintah	Masih menfungsikan BULOG sebagai Buffer Stock(lembaga penyangga stock) pangan daerah		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Prosentase peningkatan stabilitas harga & pasokan pangan	%	82	90.91			
				Jumlah cadangan pangan		Ton	0	0			
				Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Peningkatan Jumlah dan Jenis Pangan Alternatif	Produk	0	0	Tidak adanya Perda yang mengatur Cadangan Pangan Pemerintah	Masih menfungsikan BULOG sebagai Buffer Stock(lembaga penyangga stock) pangan daerah	
					Prosentase Konsumsi Pangan yang Aman	%	60	86			
				Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Peningkatan kelompok olahan pangan yang difasilitasi	%	0.5	0.5		
					Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat bagi Pelaku Agribisnis	Jumlah kelompok yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan kerja	Kelompok	5	7		
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan dan Keterampilan Pangan Lokal	Jumlah produk hasil olahan pangan lokal	Produk	2		3						
4	Urusan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perkim	Meningkatnya Penataan Ruang sesuai RTRW	Program Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	81	75			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Fasilitas dan Pengendalian Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Disusun sesuai Ketentuan	Dokumen	3	3			
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan upaya konservasi kawasan lindung 2. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan partisipasi masyarakat 3. Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah Pengelolaan Administrasi Keuangan Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80% Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	84	80	Efisiensi Anggaran Penyerapan untuk beberapa belanja seperti halnya belanja perangko, materai/benda pos penyerapan sebesar 41,82% dan belanja iuran jaminan non PNS sebesar 0%. Kendala yang dihadapi untuk belanja materai tidak dapat terlaksananya hibah gerobak sampah di tahun 2020. sedangkan untuk iuran jaminan kesehatan, belum adanya dasar untu dilakukan pembayaran	Pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan -	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	80	84.21	Secara keseluruhan anggaran untuk perencanaan sudah cukup, akan tetapi perlu adanya tambahan untuk agenda pelaksanaan Rakor dan FGD terkait konsep perencanaan strategi terhadap peningkatan capaian kinerja dan penciptaan inovasi	dengan adanya keterbatasan anggaran untuk melaksanakan Rakor dan FGD maka memaksimalkan teknologi informasi untuk mengadakan Rakor dan FGD membahas permasalahan yang ada	
				Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Mutu Air Dan Udara Dengan Kualitas Baik	%	70	65.01			
				Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup	Kasus Lingkungan	15	15	Tidak ada kendala penyerapan anggaran		
					Jumlah Perusahaan yang menindaklanjuti Sanksi Yang diberikan	perusahaan	6	6			
				Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Nilai Kualitas Udara Dan Kualitas Air Yang Memenuhi Baku Mutu	Nilai	50	50	Penyerapan BBM 14 % dikarenakan efisiensi dan pengurangan kegiatan pengawasan		
					Jumlah Upaya Pengawasan yang telah dilakukan kepada usaha /kegiatan terhadap Ketaatan Akan	kali	30	30			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					kaidah Lingkungan hidup						
				Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup	Prosentase Permohonan Kajian Lingkungan Hidup Yang Telah Mendapatkan Rekomendasi Teknis	%	100	100	Sisa 14 jt, tidak bisa diserap karena merupakan persediaan untuk mutasi pegawai ptt		
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah Titik Sampel Mutu Air Dan Kualitas Udara Yang Diuji (Pengujian Eksternal)	Titik	20	19	Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa di laksanakan dan ada yang sudah dilaksanakan akan tetapi tidak maksimal	Telah melaksanakan penyerapan anggaran secara maksimal	
			Jumlah Titik Sampel Mutu Air Dan Kualitas Udara Yang Diuji (Pengujian Internal)		Titik	350	378				
				Perlindungan Dan Konservasi RTH Dan Sumber Daya Alam	Prosentase Tutupan Lahan Publik	%	20	4,89			
				Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Sumber Mata Air Yang Terpelihara	Sumber Mata Air	1	1			
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Taman dan RTHKP) Yang Dipelihara	RTH	15	15	Ada 2 kendaraan yang tidak boleh diserap, Adanya Tenaga Operasional yang pindah ke Dinas lain		
				Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat Sasaran Peningkatan Kapasitas	Orang	500	500	Harga ATK di bawah SBU		
				Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Timbulan Sampah Yang Terlayani	%	8	70,34			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Mobilisasi dan Penanganan Sampah	Jumlah Sampah Yang Terangkut	Ton	20.629	22.406	- Sisa penyerapan BBM 50,78 juta dikarenakan selisih harga liter satuan BBM sebesar 350 perliter	-	
									- Sisa penyerapan PTT 24,57 jt dikarenakan BPJS Kesehatan		
				Pengelolaan Taman Pemrosesan Akhir (TPA)	Jumlah Sampah Yang Dikelola Di TPA	Ton	22.350	24.804,1	- Penyerapan mamin rapat sosialisasi pembangunan TPA tidak terserap 2,42 jt	-	
									- Sisa penyerapan PTT 23,93 jt dikarenakan BPJS Kesehatan		
									- Sisa penyerapan BBM 9,29 juta dikarenakan selisih harga liter satuan BBM sebesar 350 perliter		
				Penanggulangan Sampah	Jumlah Ruas Jalan Kota Dan Lokasi Yang Dilakukan Penyapuan Serta Cipta Kondisi	Ruas Jalan dan Lokasi	130	130	- Pengadaan hibah gerobak dorong 150jt tidak terserap, dikarenakan hibah gerobak sampah tidak sesuai dengan aturan hibah	-	
									- Sisa penyerapan PTT 33,8 jt dikarenakan BPJS Kesehatan		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									- Sisa penyerapan habis pakai 11,63 jt disesuaikan dengan riil kebutuhan - Penyerapan tenaga kerja non pegawai kalibanger Jan - Maret 2020 tidak terserap sebesar 20 jt dikarenakan disposisi nota dinas walikota terhitung awal maret - Sisa penyerapan BBM 15,34 juta dikarenakan selisih harga liter satuan BBM solar sebesar 350 perliter dan 150 pertalit		
				Pengolahan Sampah	Jumlah Sampah Terolah	Ton	115	133,57			
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung TPA	Unit	2	2	Tidak ada kendala penyerapan anggaran	Telah melaksanakan penyerapan anggaran secara maksimal	
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat Yang Ikut Berperan Aktif Dalam Pengelolaan Lingkungan	Orang	2.850	2.793			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat Serta Lembaga Terkait Yang Berperan Aktif Dalam Mengelola Lingkungannya	Orang/Lembaga	1.430	1.300	Anggaran dialihkan ke kegiatan lain, tetapi masih tersisa uang hadiah dan trophy	-	
				Kemitraan Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok Mitra Peduli Lingkungan Yang Aktif Dan Mandiri	Mitra	3	3	Tidak ada kendala penyerapan anggaran	Telah melaksanakan penyerapan anggaran secara maksimal	
				Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kelurahan Yang Mendukung Dalam Aksi Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim	Kelurahan	1	3	Tidak ada kendala penyerapan anggaran	Telah melaksanakan penyerapan anggaran secara maksimal	
				Pengelolaan Informasi dan edukasi lingkungan	Jumlah Lembaga Pendidikan Yang Meraih Adiwiyata	Sekolah	2	1	Anggaran tidak tercapai 100% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang digunakan sesuai kebutuhan.	Tetap melakukan pendampingan 11 sekolah Adiwiyata Provinsi, yaitu MI Muhammadiyah, SDN Wonoasih 1, SDN Triwung Lor 3, SDN Kedopok 2, SDN Pakistaji 1, SDN Kanigaran 3, SDN Sukabumi 4, SMPN 6, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 2.	
				Pembinaan Lingkungan Sosial	Volume Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial	Jenis	1	1			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Bagi Tenaga Teknis Di Bidang Lingkungan Yang Diselenggarakan Oleh Instansi/Lembaga Resmi Yang Diakui Oleh Pemerintah	Jumlah Petugas Teknis Lingkungan Yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	15	4	tidak bisa melaksanakan penyerapan anggaran secara maksimal sesuai dengan proker yang telah di susun	melaksanakan penyerapan anggaran secara maksimal	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah melalui Penerapan Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	100	100	Anggaran tidak terealisasi 100% karena adanya pejabat yang kosong sehingga HR Pengelola Keuangan tidak direalisasikan	Mengajukan tambahan personil ASN yang belum belu terisi	
					Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	91	88,24			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	94	100			
					Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	100	96,9			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	91	99,35			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	96	100			
				Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-el	Penduduk	169.000	171.602			
			Jumlah Penduduk Yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)		Penduduk	79.000	81.708				
			Jumlah Penduduk Pindah Datang Yang ddata		Penduduk	4.000	3.941				
			Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Pemohon KTP-el Yang dilayani	Pemohon	20.000	25.347				
				Jumlah Pemohon Kartu Keluarga Yang dilayani	Pemohon	15.000	21.211				
				Jumlah Pemohon KIA Yang dilayani	Pemohon	7.000	5.837				
			Pelayanan Administrasi Pindah Datang Penduduk	Jumlah Pemohon Pindah Datang Yang dlayani	Pemohon	4.000	3.941				
			Pendataan Penduduk	Jumlah Penduduk Yang Diberikan NIK	Penduduk	3000	4040				
			Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah Bahan Cetak Dokumen Kependudukan	Jenis	8	8				
			Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Rakor dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kalli	12	12				
			Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Keliling di Sekolah	Kali	0	0	Karena kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi	Akan dianggarkan kembali pelaksanaan		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									covid sehingga anggaran kegiatan dialihkan ke kegiatan lain	kegiatan tahun berikutnya	
				Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	anak	69.622	73.257			
					Jumlah Penduduk Meninggal yang Memiliki Akte Kematian	orang	2.400	2.946			
					Jumlah Penduduk Yang Dilayani Pencatatan Peristiwa Penting	orang	6.702	8.049			
				Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Yang Dilayani	orang	5.100	4.714			
				Pelayanan P4-K (Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian)	Jumlah Pemohon Akta Perkawinan Yang Dilayani	orang	20	31			
					Jumlah Pemohon Akta Perceraian Yang Dilayani	orang	7	7			
					Jumlah Pemohon Akta Perubahan Nama Yang Dilayani	orang	60	48			
					Jumlah Pemohon Pembetulan Akta Yang Dilayani	orang	250	303			
					Jumlah Pemohon Akta Kematian Yang Dilayani	orang	2.400	2.946			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Jumlah pelaksanaan rakor yang dilaksanakan	kali	2	1	Realisasi anggaran rendah karena pengadaan APD mengalami perubahan harga lebih rendah dari yang sudah direncanakan, Pelayanan keliling tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid	Perencanaan penganggaran akan lebih di optimalkan lebih matang	
				Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil	Jumlah jenis blanko dan formulir yang dicetak	jenis	3	3			
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pembangunan Daerah	%	100	131.66			
					Persentase Jaringan SIAK Dalam Kondisi Baik	%	100	100			
				Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana SIAK Yang Dipelihara	perangkat	2	2			
				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan dan Penyajian Data Yang Disusun Tepat Waktu	laporan	60	79			
				Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kerjasama Yang Dilaksanakan	stakeholder	1	1			
					Jumlah Inovasi Yang Dilaksanakan	Inovasi	1	1			
				Penyusunan Buku Data Penduduk per Semester	Jumlah dokumen yang dicetak	buku	180	180			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	peserta	400	400			
7	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Mayangan	Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	80	80			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi	Kelompok	6	6			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Jati	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi	Kelompok	10	10	Keterbatasan Waktu dalam penyerapan dan Ketersediaan Kas pada pertengahan waktu		
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi	Kelompok	19	19	Keterbatasan Waktu dalam penyerapan dan Ketersediaan Kas pada pertengahan waktu		
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Wiroborang	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi	Kelompok	6	6	Keterbatasan Waktu dalam penyerapan dan Ketersediaan Kas pada pertengahan waktu		
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Sukabumi	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi	Kelompok	9	9	Keterbatasan Waktu dalam penyerapan dan Ketersediaan Kas pada pertengahan waktu		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Mayangan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi	Kelompok	8	8	Keterbatasan Waktu dalam penyerapan dan Ketersediaan Kas pada pertengahan waktu		
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jati	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	10	10	Keterbatasan Waktu dalam penyerapan dan Ketersediaan Kas pada pertengahan waktu		
					b. Jumlah Penerima Sarana Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	5	5			
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangunharjo	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	19	19	Keterbatasan Waktu dalam penyerapan dan Ketersediaan Kas pada pertengahan waktu		
					b. Jumlah Penerima Sarana Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	5	5			
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiroborang	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	6	6	Keterbatasan Waktu dalam penyerapan dan Ketersediaan Kas pada pertengahan waktu		
					b. Jumlah Penerima Sarana Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	5	5			
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukabumi	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	9	9	Keterbatasan Waktu dalam penyerapan dan Ketersediaan Kas pada pertengahan waktu		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					b. Jumlah Penerima Sarana Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	5	5			
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	8	8	Keterbatasan Waktu dalam penyerapan dan Ketersediaan Kas pada pertengahan waktu		
					b. Jumlah Penerima Sarana Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	5	5			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jati	a. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	5	0	Adanya Recofusing Anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 (Penjabaran IV)	Dianggarkan pada tahun berikutnya	
					b. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik	5	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangunharjo	a. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	5	0			
					b. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik	5	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wiroborang	a. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	5	0			
					b. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik	5	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukabumi	a. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	5	0			
					b. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik	5	0			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mayangan	a. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	5	0			
					b. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik	5	0			
8	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kanigaran	Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yang Aktif kemasyarakatan aktif	%	90	90			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Kelompok	7	7			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kanigaran	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	5	4	Adanya rentan waktu yang cukup lama antara Reviu RAB di Inspektorat, pengajuan TU hingga penyelesaian TU nihil sehingga dikhawatirkan waktu yang ditentukan tidak terpenuhi	Membimbing Pokmas agar pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	5	5	Adanya rentan waktu yang cukup lama antara Reviu RAB di Inspektorat, pengajuan TU hingga penyelesaian TU nihil sehingga dikhawatirkan waktu yang ditentukan tidak terpenuhi	Membimbing Pokmas agar pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan	
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Tisnonegaran	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	5	5	Adanya rentan waktu yang cukup lama antara Reviu RAB di Inspektorat, pengajuan TU hingga penyelesaian TU nihil sehingga dikhawatirkan waktu yang ditentukan tidak terpenuhi	Membimbing Pokmas agar pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan	
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kebon Sari Wetan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	5	5	Adanya rentan waktu yang cukup lama antara Reviu RAB di Inspektorat, pengajuan TU hingga penyelesaian TU nihil sehingga dikhawatirkan waktu yang ditentukan tidak terpenuhi	Membimbing Pokmas agar pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kebon Sari Kulon	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	5	5	Adanya rentan waktu yang cukup lama antara Reviu RAB di Inspektorat, pengajuan TU hingga penyelesaian TU nihil sehingga dikhawatirkan waktu yang ditentukan tidak terpenuhi	Membimbing Pokmas agar pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan	
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Curahgrinting	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	5	5	Adanya rentan waktu yang cukup lama antara Reviu RAB di Inspektorat, pengajuan TU hingga penyelesaian TU nihil sehingga dikhawatirkan waktu yang ditentukan tidak terpenuhi	Membimbing Pokmas agar pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigaran	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat; b. Jumlah Penerima Sarana Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok	5	5	Terbatasnya pendapatan dana transfer DAU dari pusat untuk Pemerintah Kota Probolinggo sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan		
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukoharjo	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;	Kelompok	5	2	Terbatasnya pendapatan dana transfer DAU dari pusat untuk Pemerintah Kota		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					b. Jumlah Penerima Sarana Pemberdayaan Masyarakat				Probolinggo sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan		
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tisnonegaran	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitas Pembedayaan Masyarakat; b. Jumlah Penerima Sarana Pembedayaan Masyarakat	Kelompok	5	3	Terbatasnya pendapatan dana transfer DAU dari pusat untuk Pemerintah Kota Probolinggo sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan		
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebon Sari Wetan	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitas Pembedayaan Masyarakat; b. Jumlah Penerima Sarana Pembedayaan Masyarakat	Kelompok	5	3	Terbatasnya pendapatan dana transfer DAU dari pusat untuk Pemerintah Kota Probolinggo sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan		
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebon Sari Kulon	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitas Pembedayaan Masyarakat; b. Jumlah Penerima Sarana Pembedayaan Masyarakat	Kelompok	5	5	Terbatasnya pendapatan dana transfer DAU dari pusat untuk Pemerintah Kota Probolinggo sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan		
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Curahgrinting	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitas Pembedayaan Masyarakat; b. Jumlah Penerima Sarana Pembedayaan Masyarakat	Kelompok	5	4	Terbatasnya pendapatan dana transfer DAU dari pusat untuk Pemerintah Kota Probolinggo sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kanigaran	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun; b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Lokasi	5	0	- Pergeseran (Pengurangan) Anggaran Sarpras untuk Kegiatan pelaksanaan penanggulangan COVID-19 (Penjabaran II), - Adanya Recofusing Anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 (Penjabaran IV)		
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sukoharjo	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun; b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Lokasi	5	0	- Pergeseran (Pengurangan) Anggaran Sarpras untuk Kegiatan pelaksanaan penanggulangan COVID-19 (Penjabaran II), - Adanya Recofusing Anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 (Penjabaran IV)		
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tisnonegaran	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun;	Lokasi	5	0	- Pergeseran (Pengurangan) Anggaran Sarpras untuk Kegiatan pelaksanaan penanggulangan COVID-19 (Penjabaran II),		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dipelihara				- Adanya Recofusing Anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 (Penjabaran IV)		
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kebon Sari Wetan	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun; b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Lokasi	5	0	- Pergeseran (Pengurangan) Anggaran Sarpras untuk Kegiatan pelaksanaan penanggulangan COVID-19 (Penjabaran II), - Adanya Recofusing Anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 (Penjabaran IV)		
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kebon Sari Kulon	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun; b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Lokasi	5	0	- Pergeseran (Pengurangan) Anggaran Sarpras untuk Kegiatan pelaksanaan penanggulangan COVID-19 (Penjabaran II), - Adanya Recofusing Anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 (Penjabaran IV)		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Curahgrinting	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun; b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Lokasi	5	0	- Pergeseran (Pengurangan) Anggaran Sarpras untuk Kegiatan pelaksanaan penanggulangan COVID-19 (Penjabaran II), - Adanya Recofusing Anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 (Penjabaran IV)		
9	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Wonoasih	Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yang Aktif	%	100	32.89			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Kelompok	2	2			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Pakistaji	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	13	13	Kepengurusan NPWP Bendahara Pembantu kelurahan untuk kegiatan daker yang membutuhkan waktu lama sehingga menghambat pencairan anggaran.		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									Anggaran PAK yang belum direviu inspektorat.		
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kedunggaleng	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	5	5	Adanya kekurangan aparatur pejabat di kelurahan sehingga 1 orang pejabat merangkap 3 PPTK. Pada kel. Kedunggaleng hanya terdapat 1 lurah sebagai KPA, 1 Seklur sebagai PPK dan 1 kasi merangkap 3 PPTK.	Mengusulkan pemenuhan aparatur pada SKPD terkait	
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Sumber Taman	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	5	5	Kepengurusan NPWP Bendahara Pembantu kelurahan untuk kegiatan dakel yang membutuhkan waktu lama sehingga menghambat pencairan anggaran. Anggaran PAK yang belum direviu inspektorat.		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kedung Asem	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	5	3	Kepengurusan NPWP Bendahara Pembantu kelurahan untuk kegiatan dakel yang membutuhkan waktu lama sehingga menghambat pencairan anggaran. Anggaran PAK yang belum direviu inspektorat.		
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Jrebeng Kidul	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	5	5	Kepengurusan NPWP Bendahara Pembantu kelurahan untuk kegiatan dakel yang membutuhkan waktu lama sehingga menghambat pencairan anggaran. Anggaran PAK yang belum direviu inspektorat.		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Wonoasih	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi	Kelompok	5	5	Kepengurusan NPWP Bendahara Pembantu kelurahan untuk kegiatan dakek yang membutuhkan waktu lama sehingga menghambat pencairan anggaran. PAK yang belum direviu inspektorat.		
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakistaji	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Titik	36	36	- Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan. (kegiatan rutin dan belanja covid 19 yang lebih diprioritaskan sehingga di kel Pakistaji anggaran pemas dihentikan pada saat kegiatan berlangsung).		
					Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok	0	0			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedunggaleng	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	446	440	Adanya kekurangan aparatur pejabat di kelurahan sehingga 1 orang pejabat merangkap 3 PPTK. Pada kel. Kedunggaleng hanya terdapat 1 lurah sebagai KPA, 1 Seklur sebagai PPK dan 1 kasi merangkap 3 PPTK.		
					Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok	0	0			
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Taman	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Titik	20	20	Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan.		
					Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok	0				



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Asem	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Titik	45	20	Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan. (kegiatan rutin dan belanja covid 19 yang lebih diprioritaskan sehingga di kel Kedungasem anggaran pemas dihentikan pada saat kegiatan berlangsung).		
					Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok	0				
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Titik	40	40	Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan.		
					Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok	0	0			
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonoasih	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Titik	31	31	Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020,		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok	0	0	menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan.		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakistaji	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik	0	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedunggaleng	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik	0	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik	0	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung Asem	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik	0	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Kidul	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik	0	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonoasih	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik	0	0			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
10	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kedopok	Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Yang di Fasilitasi	Kelompok/Lembaga	6	6			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Sumber Wetan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW yang di fasilitasi	Kelompok/Lembaga	2	2			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kedopok	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW yang di fasilitasi	Kelompok/Lembaga	4	3			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Jrebeng Lor	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW yang di fasilitasi	Kelompok/Lembaga	2	2			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Jrebeng Wetan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW yang di fasilitasi	Kelompok/Lembaga	4	3			
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kareng Lor	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW yang di fasilitasi	Kelompok/Lembaga	4	2	Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai Proker	Agar lebih mencermati Proker kegiatan yang telah direncanakan	
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Jrebeng Kulon	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW yang di fasilitasi	Kelompok/Lembaga	5	2	Kegiatan tidak dilaksanakan guna menghindari cluster baru		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Wetan	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	0	0			
					Jumlah penerima sarana pemberdayaan masyarakat	Peserta					
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedopok	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	0	0			
					Jumlah penerima sarana pemberdayaan masyarakat	Peserta					
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Lor	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	0	0			
					Jumlah penerima sarana pemberdayaan masyarakat	Peserta					
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Wetan	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	0	0			
					Jumlah penerima sarana pemberdayaan masyarakat	Peserta					



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kareng Lor	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	0	0			
					Jumlah penerima sarana pemberdayaan masyarakat	Peserta					
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kulon	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	5	1	Adanya perubahan target yang disebabkan oleh Refocusing anggaran		
					Jumlah penerima sarana pemberdayaan masyarakat	Peserta					
				Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan Sumber Wetan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik					
				Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan Kedopok	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik					
				Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan Jrebeng Lor	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik					



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan Jrebeng Wetan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik					
				Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan Kareng Lor	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik					
				Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan Jrebeng Kulon	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	0	0			
					Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Titik					
11	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kademangan	Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	80	180.65			
				Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi	kelompok	21	21			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kademangan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi	kelompok	29	29	-Mekanisme pengajuan anggaran belum dapat dipenuhi(syarat pengajuan adalah menggunakan NPWP pokmas, sedangkan pokmas belum memiliki) - Keterbatasan waktu pelaksanaan	- Melaksanakan koordinasi dengan pokmas untuk pelaksanaan tahun berikutnya - Proses pembuatan NPWP Pokmas	
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Pohsangit Kidul	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi	kelompok	15	15	-Kuranginya koordinasi antara kelurahan dan pokmas pelaksana - Keterbatasan waktu pelaksanaan	- pembentukan pokmas pelaksana baru - melaksanakan koordinasi dengan pokmas untuk pelaksanaan tahun berikutnya	
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Triwung Kidul	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi	kelompok	15	15	-Kuranginya koordinasi antara kelurahan dan pokmas pelaksana - Keterbatasan waktu pelaksanaan	melaksanakan koordinasi dengan pokmas untuk pelaksanaan tahun berikutnya	
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Triwung Lor	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi	kelompok	23	0	- kurangnya koordinasi antara kelurahan dan pokmas pelaksana	pembentukan pokmas pelaksana baru	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Ketapang	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi	kelompok	30	30	-Kurangnya koordinasi antara kelurahan dan pokmas pelaksana - Keterbatasan waktu pelaksanaan	melaksanakan koordinasi dengan pokmas untuk pelaksanaan tahun berikutnya	
				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Pilang	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi	kelompok	16	0	- kurangnya koordinasi antara kelurahan dan pokmas pelaksana	pembentukan pokmas pelaksana baru	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kademangan	a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	29	29	- Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan - Beberapa kegiatan tidak sesuai Perwali 173 tahun 2019	mengusulkan kembali kegiatan di tahun berikutnya	
					b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	5	5			
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pohsangit Kidul	a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	15	15	Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan	mengusulkan kembali kegiatan di tahun berikutnya	
					b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	5	5			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Kidul	a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	15	15	Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan - Beberapa kegiatan tidak sesuai Perwali 173 tahun 2019	mengusulkan kembali kegiatan di tahun berikutnya	
					b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	5	5			
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Lor	a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	23	23	Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan	mengusulkan kembali kegiatan di tahun berikutnya	
					b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	5	5			
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketapang	a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	30	30	Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan	mengusulkan kembali kegiatan di tahun berikutnya	
					b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	5	5			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilang	a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	16	16	- Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan	mengusulkan kembali kegiatan di tahun berikutnya	
					b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	5	5			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kademangan	a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	unit	0	0	Karena adanya recofusing anggaran	Dianggarkan kembali di tahun berikutnya	
					b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Unit	0	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pohsangit kidul	a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	Unit	0	0			
					b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Unit	0	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Triwung Kidul	a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	Unit	0	0			
					b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Unit	0	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Triwung lor	a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	Unit	0	0			
					b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Unit	0	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang	a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	Unit	0	0			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Unit	0	0			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pilang	a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	Unit	0	0			
					b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara	Unit	0	0			
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penurunan TFR dan meningkatkan kualitas keluarga Peningkatan cakupan keikutsertaan Peserta KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	78,5	54,98			
					Persentase ketersediaan data mikro keluarga yang tepat waktu	%	100	70			
				Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan	Jumlah Dokumen Data KB/KS per Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	29	29			
					Persentase institusi masyarakat pedesaan yang aktif	%	100	100			
				Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah aseptor KB baru	Aseptor KB	7,220	5,678	Selama pandemi Covid-19 kunjungan masyarakat pada fasilitas kesehatan untuk ber-KB MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) menurun	Memberikan advokasi pilihan KB lain yang tidak memerlukan kunjungan ke fasilitas kesehatan	
					Jumlah alat dan obat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur di Fasilitas Kesehatan yang tersedia	Buah	98.750	95,844			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembinaan Keluarga Sejahtera Dan Pembangunan Keluarga	Jumlah kelompok tribina, kelompok UPPKS dan kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) yang aktif	Jumlah Kelompok	445	370	Kader sulit diperoleh sehingga banyak kader yang merangkap Kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan masih kurang Kegiatan tatap muka tidak dapat diselenggarakan karena pandemi anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan pandemi	Meningkatkan pembinaan kader Meningkatkan Sarpras di kelompok kegiatan Pelaporan data dan hasil kegiatan melalui aplikasi yang ditetapkan BKKBN	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Program Keluarga Berencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana program KB	Unit	8	8			
				Penunjang Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Kader KB Aktif	kader	267	267	Penyerapan anggaran dari Balai Penyuluhan KB kurang maksimal	Memberdayakan Petugas Lini Lapangan KB (PLKB) lebih aktif koordinasi dengan PPTK dan PemDok dalam penyerapan anggaran BOKB	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
13	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Probolinggo	Meningkatnya nilai SAKIP perangkat daerah	PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	84	90			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	%	100	75	Adanya refocusing diawal triwulan 2 menyebabkan rekening honorarium penatausahaan keuangan tidak dapat terserap secara maksimal karena ada beberapa kegiatan yang anggarannya menjadi nol setelah refocusing.	Dengan melakukan penghitungan kembali atas kebutuhan belanja untuk pembayaran honorarium penatausahaan keuangan	
					Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	85	92			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	68	61	- Belanja luran Jaminan Kesehatan Non PNS tidak terealisasi karena pembayarannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan.	Dengan melakukan penghitungan kembali atas kebutuhan belanja BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang lebih tepat.	
					Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	78	95			
Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	82	257		- Penghitungan ulang di rekening Belanja BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional sehingga menyebabkan tidak terserap semuanya.						



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD	
				Pengelolaan Kinerja program Dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	76	60	-	-		
			Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalu lintas angkutan jalan	PENINGKATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal	%	20	7.22				
					Jumlah Angkutan Jalan yang Tersedia	unit	204	204				
					Jumlah Pelanggaran Trayek Angkutan Jalan	unit	41	0				
					Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala	unit	8,742	7,758				
				Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal	%	80	44.5	-	-		
			Peningkatan Pengendalian, Pengawasan, dan Pengamanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Jumlah Angkutan Jalan yang Memiliki Ijin Trayek	unit	163	50	Untuk rekening Belanja Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Operasional Kantor terdapat sisa karena ada Juru Parkir yang pensiun. rekening Makanan dan Minuman Harian & Makanan dan Minuman Kegiatan masih terdapat sisa karena tidak ada kegiatan pengamanan	Dengan melakukan penghitungan kembali atas kebutuhan belanja jasa tenaga pendukung kegiatan operasional kantor tahun berikutnya.			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									(PAM). Selain itu terdapat penghitungan kembali harga satuan untuk mamin harian disesuaikan dengan kondisi masa pandemi.		
				Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Jumlah Pemilik/Sopir/Juru Mudi yang Mengikuti Pembinaan	orang	150	0	Karena kondisi pandemi, acara rapat Forum Lalu lintas tidak bisa dilaksanakan sehingga terdapat sisa anggaran pada rekening honorarium panitia pelaksana kegiatan dan belanja makanan dan minuman rapat.	-	
				Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melakukan Uji Berkala	Kendaraan	9.011	8.093	-	-	
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal Bersumber Dana Khusus	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal bersumber Dana Khusus	%	20	0	-	-	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut Yang Memenuhi Standar Keselamatan	PENGEMBANGAN TRANSPORTASI	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal	%	20	2			
					Persentase Pemenuhan Dokumen Kajian Bidang Perhubungan	%	70	0			
					Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Kapal Di Bawah 7GT	%	2	0			
				Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Elektrikal	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal	%	60	25	Sisa anggaran berasal dari rekening belanja listrik, belanja jasa pegawai pendukung operasional kantor dan belanja makanan minuman harian. Belanja Listrik digunakan untuk pembayaran tagihan listrik PJU diseluruh kota, belanja jasa pegawai untuk pembayaran gaji thl, dan belanja mamin harian karena ada penyesuaian harga satuan untuk mamin resiko tinggi petugas PJU.	Dengan melakukan penghitungan kembali atas kebutuhan belanja listrik, belanja jasa tenaga pendukung kegiatan operasional kantor tahun berikutnya, dan belanja mamin harian.	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Perencanaan Pengembangan Transportasi	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perhubungan	Dokumen	2	0	-	-	
				Pembinaan dan Pengendalian Perhubungan Laut	Jumlah Kapal di Bawah 7GT yang Memiliki Dokumen Kapal	unit	90	0	-	-	
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Elektrikal Bersumber Dana Khusus	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal Bersumber Dana Khusus	%	20	0	-	-	
14	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	88,89	100			
				Pengelolaan administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100			
					Persentase realisasi keuangan kegiatan dengan capaian minimal 80%	%	80	100			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	80	80			
					Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	100	100			
					Persentase Ketatalaksanaan tepat waktu	%	100	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan minimal 80%	%	90	100			
				Program Pengelolaan Komunikasi Publik	Persentase Media Komunikasi Yang Dikelola	%	90	90			
				Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat	Jumlah informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan pada masyarakat	isu	240	823			
					Persentase kegiatan Kepala Daerah yang dipublikasikan	5	80	100			
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	media	4	4			
					Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdokumentasikan	%	70	70			
				Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Kemitraan	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina	KIM	31	31			
					Jumlah Mitra Komunikasi Publik yang difasilitasi	KIM	31	31			
				Program Pengelolaan Informasi Publik	Persentase Permohonan Informasi yang dipenuhi	%	100	100			
				Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Jumlah Konten informasi yang disediakan	Konten Informasi	365	380			
					Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan	750	850	Laporan bersumber dari : 1. Lapor SP4N		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									2. View Probolinggo 3. Call center 112 4. Laporo Rek		
				Pengelolaan Opini Publik	Jumlah Isu Publik yang dikelola	Isu publik	200	200			
				Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi	%	90	90			
				Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Teknologi	Persentase down time infrastruktur jaringan	%	20	19			
				Pengelolaan data elektronik dan integrasi sistem informasi	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	20	20			
				Pengelolaan e-Government	Persentase PD yang menerapkan layanan berbasis elektronik	%	38,5	38,5			
				Pengembangan Aplikasi e-Government	Jumlah Aplikasi yang dikelola	Aplikasi	2	2			
				Pengembangan ekosistem e-Government	Jumlah Fasilitasi Kegiatan di Command Center	Kegiatan	20	20			
				Peningkatan Tata Kelola e-Government	Jumlah dokumen tata kelola SPBE	Dokumen	1	1			
				Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Persentase Informasi kegiatan bidang cukai yang disampaikan	%	100	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah media publikaasi kebijakan media cukai	Media	4	4			
15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DKUPP	Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	80	93			
				PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA KOPERASI	Jumlah SDM pengelola koperasi yang terstandarisasi/kom peten	Orang	100	23			
				PENINGKATAN DAN PERLUASAN AKSES PERMODALAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Dukungan Perkuatan Permodalan	Koperasi	50	18			
				PENERTIBAN DAN PENGAWASAN KOPERASI MELALUI AKUNTABILITAS	Jumlah Koperasi Yang Mempunyai Derajat Kepatuhan Berkoperasi	Koperasi	50	4	- Karena adanya refofusing anggaran kegiatan - Tidak bisa melaksanakan pembinaan karena adanya pembatasan protocol kesehatan	Akan dilaksanakan pada tahun berikutnya	
				PENINGKATAN KAPASITAS DAN DAYA SAING SDM KUMKM	Jumlah SDM pengelola KUMKM yang Kompeten dan Berdaya Saing	Orang	50	48			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Persentase Kenaikan Omzet Usaha Mikro yang Difasilitasi	Persen	15	244	Karena banyaknya masyarakat yang mengajukan bantuan presiden sehingga memunculkan banyaknya usaha-usaha baru		
				PENGUATAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN USAHA MIKRO	Jumlah Pelaku usaha mikro yang menerapkan pengelolaan Manajemen yang terpisah	PUM	125	29	- Karena adanya refofusing anggaran kegiatan -Pembatasan penyerapan anggaran selain untuk penanganan covid	Akan dianggarkan kembali pelaksanaannya pada tahun berikutnya	
				PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITA SPRODUK SERTA FASILITASI PRASARANAPRODUKSI BAGI USAHA MIKRO	Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapatkan Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas produk	PUM	500	183			
				FASILITASI PENGEMBANGAN KERJASAMA PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK USAHAMIKRO	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang mendapatkan fasilitasi Kerkasama, Promosi dan Pemasaran Produk	PUM	174	32			
				PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	81	70			
				PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	Persen	50	22			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				PENGELOLAAN TATA USAHA PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Persen	75	34			
				PENGELOLAAN KINERJA PROGRAM DANKEGIATAN	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	Persen	81	14			
16	Penanaman Modal	DPMPPTSP NAKER	Menjaga Iklim Investasi Daerah	Program Peningkatan Penanaman Modal	Persentase Potensi dan Peluang Investasi Yang Dipromosikan	%	1	2	Pelaksanaan promosi (pameran potensi investasi) tidak bisa dilaksanakan ke luar daerah karena situasi pandemi	Melaksanakan kegiatan promosi melalui media sosial (website, instagram)	
				Kegiatan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas Penanaman Modal	investor	600	2918	Pelaksanaan promosi (pameran potensi investasi) tidak bisa dilaksanakan ke luar daerah karena situasi pandemi	Melaksanakan kegiatan promosi melalui media sosial (website, instagram)	
					Jumlah Promosi yang dilakukan	potensi	1	2			
				Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah Hasil Monitoring, Evaluasi Perizinan yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Penanaman Modal	Pelaku usaha	90	90	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan usahanya dalam aplikasi LKPM secara triwulan	Melaksanakan sosialisasi LKPM online secara terus menerus dan berkala pada pelaku usaha	
					Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti	kali	5	5			
					Jumlah Pengawasan yang Dilaksanakan	Pelaku usaha	10	10			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data Perizinan dan Penanaman Modal yang Terintegrasi	data	32	32			
			Pengembangan Mal Pelayanan Publik yang mendukung kemudahan peizinan, serta mengoptimalkan Sistem OSS (Online Single Submission)	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Izin yang Terbit Tepat Waktu	%	92,5	198,51			
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan	Jumlah Izin Bidang Pembangunan yang Terbit Tepat Waktu	Pemohon	360	789			
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa	Jumlah Izin Bidang Perdagangan dan Jasa yang Terbit Tepat Waktu	%	780	1.474			
				Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur	Persentase Capaian Kinerja Proram	%	100	78,57			
				Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100			
					Persentase Realisasi Keuangan kegiatan dengan capaian minimal 80%	%	100	78,57			
				Kegiatan Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	80	80	Dikarenakan batalnya rencana acara grand launching mpp yang belum mendapatkan rekomendasi dari kemenpan rb sehingga segala persiapannya tidak terserap. Acara launching ukk juga dilaksanakan secara virtual sehingga sebagian besar belanja tidak terserap.	Perencanaan dan penganggaran agar lebih tepat, sesuai dan efisien	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	90	90			
				Kegiatan Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase capaian kinerja kegiatan minimal 80%	%	80	80			
17	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatnya kualitas aktifitas pemuda dan olahraga	PENINGKATAN MUTU KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	Persentase organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina	%	60,50	81			
				Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Jumlah organisasi pemuda aktif yang dibina	Organisasi	10	10			
				Pemberdayaan dan Pengembangan Olah Raga	Jumlah cabang olahraga prestasi dan olahraga rekreasi yang dibina	Cabang Olahraga	26	26			
				PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH	Presentase capaian kinerja program minimal 80%	Persen	80	80			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	75	95			
					Persentase realisasi keuangan dengan capaian minimal 80%	Persen	81	84,89			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Persen	95	95			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Persentase administrasi kepegawaian yang tepat waktu	Persen	94	94			
					Persentase ketatalaksanaan tepat waktu	Persen	94	94			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase capaian kinerja kegiatan minimal 80%	Persen	80	95			
18	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Persentase release data statistik tepat waktu	Persen	75	100			
				Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang diolah	Data	32	34			
					Jumlah data statistik sektoral yang dirilis	Data	32	32			
19	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi	Program Peningkatan Pengelolaan Persandian	Persentase layanan keamanan informasi pemerintah daerah	%	25	25			
				Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Jumlah sistem elektronik yang memanfaatkan sertifikat elektronik	SE	3	3			
20	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengoptimalkan City Branding	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Cakupan budaya lokal yang dilestarikan	%	66.67	66.67			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum	Jumlah Bangunan cagar budaya dalam kondisi lestari / terpelihara	Gedung	2	2	1) Ada rekening belanja yang tidak terserap karena menyesuaikan dengan keadaan pelaksanaan kegiatan dan dikarenakan pebatasan sosial, 2) Ada beberapa perencanaan tidak sesuai harapan dengan pelaksanaan kegiatan terkendala dengan pandemi covid 19	1) Mengevaluasi kebutuhan anggaran yang akan di maksimalkan pada kegiatan berikutnya, supaya dapat di gunakan dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Evaluasi terhadap rancangan penganggaran sub sub kegiatan untuk penganggaran pada tahun selanjutnya	
			Jumlah benda koleksi museum yang terpelihara		Jenis Koleksi	10	10				
				Pembinaan Sejarah dan Tradisi	Jumlah lembaga budaya yang dibina	Lembaga	5	3	1) Ada rekening belanja yang tidak terserap karena menyesuaikan dengan keadaan pelaksanaan kegiatan dan dikarenakan pebatasan sosial, 2) Ada beberapa perencanaan tidak sesuai harapan dengan pelaksanaan kegiatan terkendala dengan pandemi covid 19	1) Mengevaluasi kebutuhan anggaran yang akan di maksimalkan pada kegiatan berikutnya, supaya dapat di gunakan dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Evaluasi terhadap rancangan penganggaran sub sub kegiatan untuk penganggaran pada tahun selanjutnya	
			Jumlah tradisi dan budaya lokal yang ditelusuri dan dilestarikan		Jenis Tradisi dan Budaya	3	2				



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	Jumlah Sanggar Seni yang dibina	Sanggar	5	5	1) Ada rekening belanja yang tidak terserap karena menyesuaikan dengan keadaan pelaksanaan kegiatan dan dikarenakan pebatasan sosial, 2) Ada beberapa perencanaan tidak sesuai harapan dengan pelaksanaan kegiatan terkendala dengan pandemi covid 19	1) Mengevaluasi kebutuhan anggaran yang akan di maksimalkan pada kegiatan berikutnya, supaya dapat di gunakan dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Evaluasi terhadap rancangan penganggaran sub sub kegiatan untuk penganggaran pada tahun selanjutnya	
					Jumlah Pendidikan Seni yang difasilitasi	Mulok	4	4			
				Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya	Jumlah Museum dan Cagar Budaya yang terpelihara dan dikelola	Gedung	1	1	1) Sebagian besar belanja kegiatan untuk kegiatan outdoor, namun dikarenakan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan; 2) perencanaan dan penganggaran awal tidak sesuai dengan Juknis sehingga terjadi 3) Untuk pemeliharaan Gedung Museum terlaksana sesuai	1) Merealisasikan belanja yang diperuntukkan untuk Pengelolaan Museum 2) Evaluasi terhadap rancangan penganggaran sub sub kegiatan untuk penganggaran pada tahun selanjutnya	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									dengan perencanaan		
21	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memasyarakatkan Budaya Baca (Literasi)	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100%	100%			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	%	100%	100%			
					b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan capaian minimal 80%	%	90%	90%			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100			
					b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	%	100	100			
					c. Persentase Ketatalaksanaan tepat waktu	%	100	100			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	90	90			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Program Pengelolaan Perpustakaan	IKM Layanan Perpustakaan	Indeks	76	78,9			
				Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Pustaka	a. Jumlah bahan pustaka yang diolah	eks	2,616	2,488			
					b. Jumlah bahan pustaka yang dilestarikan	eks	50	50			
				Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan yang terlayani	Orang	16.113	14.865	Layanan MPK belum dioperasikan dikarenakan masih dalam kondisi pandemi	Membuka kembali layanan di perpustakaan umum mulai bulan Juli 2020	
				Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Perpustakaan	a. Persentase perpustakaan dan taman bacaan yang dibina	%	87,25	85			
					b. Persentase peningkatan sasaran pemsarakatan perpustakaan	%	75,55	74			
				Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	a. Jumlah perpustakaan yang dibina	Perpustakaan	60	58			
					b. Jumlah taman bacaan yang dibina	taman bacaan	29	29			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemasyarakatan Perpustakaan	Jumlah sasaran pemasyarakatan perpustakaan	orang	250	250	Tidak dilaksanakannya lomba mendongeng dikarenakan pandemi	Mengirim kembali pemenang lomba mendongeng tahun lalu ke tingkat propinsi	
22	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan arsip yang dikelola	%	18.75	15.45			
				Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	berkas	14600	10212	Dikarenakan ada penyusutan arsip sehingga jumlah arsip berkurang	Melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah mengenai pengelolaan arsip	
				Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dikelola	berkas	2025	2777			
				Pembinaan Dan Pemasyarakatan Kearsipan	a. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standart	%	75	73			
					b. Persentase peningkatan sasaran pemasyarakatan kearsipan	%	66.66	65			
				Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan kearsipan sesuai standart	Perangkat Daerah	31	31			
				Pemasyarakatan Kearsipan	Jumlah sasaran pemasyarakatan kearsipan	Orang	100	100	Dikarenakan tidak dilaksanakannya pameran Tempo Doeloe		



3.1.3 PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pilihan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	0.1	0.09	1. Pandemi Covid 19 menjadikan pelaksanaan kegiatan mengalami penyesuaian sehingga harus dilakukan pengaturan dan penyesuaian jam kerja yang berdampak pada melambatnya capaian kinerja SDM Aparatur. 2. Kebijakan Rasionalisasi dan Refocusing Anggaran mengakibatkan beberapa program dan kegiatan yang sudah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Budidaya Perikanan dalam menunjang Program Pengembangan Perikanan Budidaya.	Melakukan penyesuaian jam kerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, dg. mengefektifkan SDM dan adanya efisiensi anggaran, dg. upaya 2., antara lain: 1. Pendataan kolam dan produksi secara online. 2. Sosialisasi teknik budidaya melalui aplikasi meeting streaming facebook. 3. Penerapan Vit. dan obat ikan serta manajemen kualitas air untuk peningkatan produksi benih dan ikan konsumsi. 4. Teknologi pembenihan lele yaitu OODEV untuk peningkatan jumlah benih 5. Sosialisasi dan pelatihan budidaya lele bagi masy. dan Sekolah Lapang bagi santri pondok pesantren untuk menumbuhkan jiwa wira usaha bagi masyarakat.	
				Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya Ikan	Ton	416	365	pandemi covid 19 berpengaruh pd. peningkatan produksi budidaya dengan diterapkannya physical dan social distancing yg. berdampak pd. ekonomi masy.	memberikan pembinaan dan sosialisasi secara on line, mensupport pembudidaya untuk melakukan pemasaran off line dan on line.	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD	
			Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri	Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan	Jumlah Petak Budidaya yang Mendapat Perlakuan	Petak	30	30				
					Jumlah Pembudidaya yang mendapat fasilitasi Uji Laboratorium	Orang	100	100				
					Jumlah jenis pengadaan alat pelindung diri penanganan Covid-19	Jenis	3	3				
					Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan	Persentase Penerapan Teknologi Budidaya Perikanan	%	20	20			
					Pengembangan Usaha Perikanan	Nilai Tambah Produk Perikanan	Rp/Kg	200	204	nilai tambah produk sangat di pengaruhi oleh mutu produk dan jumlah bahan baku produksi dari produk tersebut, pada tahun 2020 bahan baku produksi mengalami penurunan sebagai akibat dampak dari pandemi yang mempengaruhi nilai tambah	melakukan pembinaan secara kontinue serta melakukan temu kemitraan untuk memperluas akses pasar dan aksesibilitas bahan baku	
					Pengembangan dan Promosi Hasil Perikanan	Jumlah Produk yang mendapat fasiliasi Sertifikasi	Produk	5	5	kendala yang dihadapi dalam mewujudkan produk yang memiliki sertifikasi seperti sertifikat keamanan pangan dan sertifikat usaha adalah rendahnya pengetahuan masyarakat akan proses pengolahan serta minimnya pelaku usaha yang memiliki tempat produksi sendiri	Melakukan Pembinaan melalui kunjungan usaha, pendampingan secara kontinue agar menerapkan Standart Operasional Prosedure sesuai dengan kaidah mutu; Serta koordinasi Sama Pihak Propinsi dalam mendukung produk yang tersertifikasi	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD	
			Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah		Jumlah Poklaksar yang mendapat fasilitasi pelatihan	Orang	50	50				
					Pengelolaan UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Layanan dari UPT PMPHP	Orang	175	195			
					Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1	1.74	Target produksi tidak tercapai karena ada beberapa kendala antara lain adanya pandemi yang berkepanjangan menjadi penyebab nelayan mengurangi aktifitas berlayarnya. Disamping itu terdapat beberapa kendala dalam pengurusan dokumen kapal sehingga waktu melaut menjadi mundur.	Percepatan pengurusan dokumen kapal	
					Pengembangan dan Fasilitasi Kenelayanan	Jumlah Produksi Perikanan tangkap	Ton	12542.33	12760			
						Jumlah Nelayan yang Mendapat Fasilitasi	Orang	204	204			
					Pengembangan Sumberdaya Ikan	Jumlah Vegetasi pantai yang ditanam	Pohon	0	150			
						Jumlah Perairan Darat yang Direstocking	Sumber mata air	1	3			
					Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Nelayan	Jumlah KUB yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	KUB	2	2			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Pengelolaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Layanan dari UPT TPI	orang	110	172	terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan, beberapa pelaku usaha menolak membayar retribusi	pengajuan anggaran untuk PAPBD, melakukan pendekatan secara personal kepada pelaku usaha	
				Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pelaku usaha perikanan yang mendapat fasilitas perikanan di bidang perikanan	%	20	20			
				Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Mendapat Fasilitasi Promosi	orang	25	25	Fasilitasi promosi guna mendapatkan akses pasar yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah maupun event Organizer sedikit	Melakukan kegiatan Temu Kemitraan antara pelaku usaha dengan stake holder serta koordinasi dengan pihak propinsi untuk tetap berpartisipasi dalam memfasilitasi kegiatan promosi usaha produk perikanan	
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pengolah dan Pemasar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang Mendapat Fasilitasi Pelatihan Olahan Hasil Perikanan	orang	50	50	Adanya pandemi mengakibatkan keterbatasan ruang akses dari pengolah untuk mendapatkan pelatihan produk perikanan	Melakukan kegiatan jemput bola ke rumah pelaku usaha dan memberikan pelatihan secara berkelompok (5 Orang)	
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mendapat Pelatihan Budidaya Ikan	orang	220	220			
2	Urusan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif dan	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA, INDUSTRI	Perentase Destinasi Wisata Yang Berkembang	%	5%	5%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD	
			Pertumbuhan Wirausaha Baru	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Industri Pariwisata yang Berkembang	%	1%	0.24%				
					Persentase Komunikasi Ekonomi Kreatif Yg Berkembang	%	1%	2.40%				
				Pengelolaan Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Wisata yang Berkembang	destinasi	1	1				
				Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Komunitas Ekonomi Kreatif Pendukung Pariwisata	kelompok	3	5				
				Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	pembinaan	1	1				
				Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata	Jumlah Destinasi wisata yang Memiliki Sarana dan Prasarana Memadai	destinasi	1	1				
				Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan	Jumlah Peserta Pembinaan Ekonomi Kreatif	peserta	120	120				
				PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah pemasaran pariwisata	kali	1	1				
				Pengembangan Promosi Pariwisata	Jumlah kegiatan promosi pariwisata	kegiatan	3	3				



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengembangan Data dan Informasi Kepariwisata	Jumlah pengguna informasi pariwisata	pengguna	400	480			
				Pengembangan Pasar dan Jaringan Kerjasama Pariwisata	Jumlah kerjasama pariwisata	kerjasama	1	0	di karenakan capaian indikator di tahun 2020 menjajaki kerjasama dengan Pemkab Probolinggo, Universitas Jember, BPTD provinsi Jatim dan KAI DAOP 9 sampai saat ini masih proses pendatanganan Bapak Walikota	akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan bagian pemerintahan sebagai leading sektor pembuatan kesepakatan bersama (MOU) antar pemerintah daerah pada tahun 2021	
3	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur	Persentase Capaian Kinerja	%	80	100,00			
					Program Minimal 80%	%					
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	90	100			
					Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	70	92.5			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	80	89.43			
					Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	95	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD	
					Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	80	79.42				
					Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	%	80	100.00				
			Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Peningkatan produktifitas tanaman pangan	Ton	13.5	13.6				
					Peningkatan produktifitas hortikultura	Ton	8	8.68				
					Peningkatan produktifitas perkebunan	Ton	92.5	76.74	Peningkatan Produktivitas perkebunan hanya tercapai 82% karena pada tanaman tebu yang diusahakan adalah tebu ratoon/keprasan	Agar produktivitas meningkat maka harus menanam tebu dari awal atau bukan tebu ratoon/ keprasan		
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	1.8	2				
					Persentase peningkatan produksi hortikultura	%	0.9	1.24				
					Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	1.01	1				
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (Realisasi Pupuk)	%	80	142.56				



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD	
			Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (Pemanfaatan Alsintan)	%	80	61.63	Kurangnya tenaga ahli dalam perawatan alsintan, sehingga banyak alsintan yang rusak dan tidak tertangani sebagai mana mestinya.	Bimtek dan pelatihan alsintan yang memadai sehingga dapat mengatasi akan kerusakan dan tidak pemanfaatan alsintan		
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (Pembangunan Infrastruktur)	%	11.5	11.5				
					Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	1	0.83	Ada beberapa faktor diantaranya ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja dan ketersediaan pasar	Pembinaan dan Fasilitasi	
					Penanganan Pasca Panen dan Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Persentase Penurunan Kehilangan hasil panen Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	%	0.5	1.07			
						Jumlah produk Olahan hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Mendapat Nilai Tambah	Jenis	9	9			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Jumlah produk Olahan hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Mendapat Fasilitas Pemasaran	Jenis	0	0			
			Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Pengembangan Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi ternak sapi potong	%	1.5	1.27			
					Persentase peningkatan produksi ternak sapi perah	%	1	1.01			
					Persentase peningkatan produksi ternak kambing	%	0.5	0.54			
					Persentase peningkatan produksi ternak domba	%	0.5	0.5			
					Persentase peningkatan produksi ternak ayam buras	%	1.5	1.48			
				Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong	Ekor	10928	10934	Jumlah permintaan pelayanan IB tidak sesuai rencana dikarenakan masih tingginya penyakit gangguan reproduksi di peternak karena pola pemeliharaan dan kualitas pakan yang tidak sesuai	Melaksanakan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) untuk memperbaiki pola pemeliharaan ternak, meningkatkan derajat kesehatan ternak, dan mengurangi penyakit gangguan reproduksi	
					Jumlah Populasi Ternak Sapi Perah	Ekor	225	224			
					Jumlah Populasi Ternak Kmbing	Ekor	3106	3226			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Jumlah Populasi Ternak Domba	Ekor	5352	5427			
					Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras	Ekor	84960	85139			
				Peningkatan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pelayanan kesehatan hewan	Ekor	1300	1692	Adanya kelangkaan obat yang menyebabkan harga obat menjadi lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan	Tidak ada alternatif obat lain dengan pagu anggaran yang sama	
					Prosentase produk hewan yang ASUH dan berkualitas yang beredar di Kota Probolinggo	%	0	0			
			Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Prosentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Peternakan	%	10	10			
				Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah produk bahan Pangan dan non Pangan asal hewan yang mendapatkan nilai tambah	Produk	0	0			
					Jumlah produk Hasil Peternakan yang mendapat fasilitasi pemasaran	Produk	2	2			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD	
			Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Pengelolaan Pemotongan Hewan	Jumlah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas yang ASUH	Ekor	78400	83817	Untuk pemotongan ruminansia terutama sapi mengalami penurunan dikarenakan jumlah jagal yang juga berkurang dan adanya penolakan tegas dari RPH untuk pemotongan sapi betina produktif. Untuk pemotongan unggas melebihi dari target kinerja	RPH tetap melakukan pendekatan secara persuasif kepada para jagal untuk memotong sapi jantan dan untuk tidak memotong di luar RPH		
				Pembinaan Lingkungan Sosial	Peningkatan Kelompok Pelaku Usaha Peternakan		kelompok	1	1			
					Peningkatan Produk Olahan Pangan Asal Hewan		produk	1	1			
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga dan Masyarakat melalui Pelatihan Usaha Peternakan Kelompok Tani Ternak	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Peternakan		kelompok	10	10			
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan dan Bimbingan Pengolahan Hasil Ternak	Jumlah Produk Olahan Pangan Asal Hewan	jenis	6	6				



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
4	Perdagangan	DKUPP	Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri	PENGEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN	Nilai Perdagangan						
				PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Peningkatan nilai Perdagangan	Rupiah	51.000.000.000	200.000.000.000	- Perubahan indikator kinerja dari nilai menjadi pengingkatan - Nilai perdagangan antar pulau yang dilakukan oleh perusahaan di kota Probolinggo mengalami peningkatan		
				PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Nilai Ekspor	Rupiah	2.500.000.000.000	65.000.000.000	Karena pandemi covid 19 sehingga tidak bisa melakukan aktifitas ekspor		
				PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEMETROLOGIAN	Persentase Pelaku usaha yang sadar tera dan tera ulang UTPP	Persen	35	7	Karena anggaran kegiatan mengalami refofusing sehingga kinerja tidak maksimal	Melakukan sidak pasar untuk melaksanakan tera ulang secara kontinyu	
				PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PASAR	Prosentase pasar yang terstandarisasi	Persen	1	1			
5	Perindustrian	DKUPP	Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri	PENGEMBANGAN INDUSTRI	Persentase Pengembangan IKM	%	4	17	- Karena adanya refofusing anggaran kegiatan - Tidak bisa melaksanakan pembinaan karena adanya pembatasan protocol kesehatan	Akan dilaksanakan pada tahun berikutnya	
				PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	Jumlah pelaku industry yang meningkat keterampilan usahanya	Orang	100	6			
				PEMBERDAYAAN INDUSTRI	Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitas standarisasi industri	Orang	30	4			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				PENINGKATAN PENGAWASAN, KERJASAMA DAN PROMOSI INVESTASI INDUSTRI	Jumlah Pelaku dan Sentra Industri yang mendapatkan fasilitasi untuk kerjasama dan promosi produk unggulan	Sentra dan Pelaku Industri	27	7			
				PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Embrio industri kecil yang mendapatkan pembinaan	%	75	91			
				PEMBINAAN DAN PELATIHAN KETRAMPILANKERJA BAGI TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT	Jumlah Pelaku Industri Kecil yang mendapatkan pelatihan	Orang	100	91			



3.1.4 PELAKSANAAN UNSUR STAF

Tabel 3. 4 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Unsur Staf Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah melalui Penerapan Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase capaian kinerja program minimal	%	100	100			
				Kegiatan Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Persentase data perencanaan dan palaporan yang terselesaikan	%	100	95			
				Kegiatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	Persentase administrasi penatausahaan keuangan	%	100	100			
				Kegiatan Pengelolaan sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	%	100	90	Penatausahaan BMD yang belum teradministrasi sesuai prosedur	Melakukan rekonsiliasi BMD	
				Pengelolaan Tata Usaha dan Kepegawaian	Prosentase Data Pengelolaan Tata Usaha Dan Kepegawaian	%	100	100			
				Pengelolaan Kerumahtanggaan	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Kerumah Tanggaan	%	100	90			
				Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	%	100	100			
				Program Dukungan Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan yang ditetapkan dibidang Kesejahteraan Masyarakat	%	100	100			
				Fasilitasi Keagamaan	Persentase Jamaah/calon Haji dan Peserta MTQ yang terfasilitasi	%	100	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	Kegiatan Keagamaan	22	22			
				Fasilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan/dilaksanakan	%	100	100			
				Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang dimanfaatkan/dilaksanakan	%	100	100			
				Pengendalian Administrasi Perencanaan, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dimanfaatkan	%	100	90			
				Fasilitas Bina Ekonomi Daerah	Persentase kebijakan Bina Ekonomi Daerah yang dimanfaatkan	%	80	90			
				Fasilitas Bina Usaha Daerah	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%	80	89			
				Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Persentase laporan pembangunan dan Sumber Daya Alam yang tepat waktu	%	80	90			
				Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan bidang cukai ditas 80%	%	80	80			
				Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang Undangan di Bidang Cukai	Jumlah dokumen pelaksanaan dan evaluasi atas pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai Tepat Waktu	%	80	85			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	Program Peningkatan Pelayanan Bidang Hukum	Persentase Produk dan Informasi Hukum yang berkualitas	%	100	100			
						Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	%	100	100		
				Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang dilakukan Harmonisasi	%	100	100	Terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) khususnya di sub bagian Peraturan perundang-undangan sehingga waktu penyelesaian produk hukum daerah masih mengalami kemunduran	memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada, agar pembentukan produk hukum daerah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	
				Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum, dan Hak Asasi Manusia	Persentase Perkara yang diberikan bantuan hukum	%	100	100	1. masih ada beberapa perkara litigasi yang masih dalam proses persidangan, yaitu masih dalam tahapan pembuktian dan Perkara TUN (masih dalam proses jawab-jawab Perkara). 2 perkara non litigasi masih menunggu kesepakatan oleh para pihak	terus melakukan koordinasi dan konsultasi baik secara vertikal maupun dengan OPD terkait agar perkara dapat terselesaikan dengan baik	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah (Perda dan Perwali) yang diinformasikan	%	100	84.90	<p>1. Tidak tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi di bidang IT, yang secara khusus mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Perda dan Perwali) ke dalam website JDIH sering terlambat</p> <p>2. masih ada perwali dalam tahap penyempurnaan menunggu hasil fasilitasi dari Gubernur Propinsi Jawa Timur</p> <p>3. masih ada perwali yang masih dalam proses upload di Website JDIH</p> <p>4. kadang ada kendala dalam jaringan Website JDIH sehingga mempengaruhi update produk hukum daerah</p>	<p>1. melakukan koordinasi dengan Propinsi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo untuk mengatasi permasalahan yang ada agar Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) dapat berjalan dengan baik.</p> <p>2. mengusulkan tenaga IT ke BKPSDM serta memaksimalkan SDM yang sudah ada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.</p>	
			Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap	Program Peningkatan Kapasitas Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	%	100	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD	
			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyelenggaraan Analisis	Persentase OPD yang ditetapkan Analisis Jabatannya	%	25	25				
					Persentase OPD yang ditetapkan Evaluasi Jabatannya	%	25	25				
					Persentase OPD yang ditetapkan Peta Jabatannya	%	25	25				
					Persentase OPD yang ditetapkan Standar Kompetensi Jabatannya	%	25	25				
					Jumlah Kajian dan Evaluasi Kelembagaan	kajian	1	1				
				Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase OPD yang melengkapi Dokumen Akuntabilitas Kinerja	%	100	100				
					Persentase Variabel Penilaian Reformasi Birokrasi	%	100	100				
				Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase OPD yang menyusun dokumen SPP, SOP dan SKM	%	100	100				
				Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase OPD yang menyusun dokumen SPP, SOP dan SKM	%	85	85				
					Persentase OPD yang melaksanakan SKM	%	85	65				
					Persentase OPD yang membentuk KBK	%	85	31				
					Persentase OPD yang memiliki inovasi	%	85	8				



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Jumlah cetak Kartu PNS	kartu	3	2000	PNS tidak mengajukan permohonan perubahan KTP PNS	Bahan yang sudah terbeli digunakan untuk mencetak KTP PNS	
			Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan LPPD	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi data Indikator Kinerja Kunci LPPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku	%	100	100			
				Pengembangan Adminitrasi Kerjasama dan Kewilayahan	Persentase Naskah Kesepakatan Bersama yang diimplementasikan menjadi Perjanjian Kerjasama	%	90	52.63	Kegiatan APEKSI tidak dapat diselenggarakan sesuai rencana awal dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membuat keputusan bersama untuk mencegah wabah agar kegiatan 1. pramuskomwil dilakukan tatap muka terbatas dan menggunakan protokol kesehatan 2. muskonwil dilaksanakan dengan daring	Kegiatan APEKSI pramuskonwil tatap muka terbatas sesuai protokol kesehatan, muskonwil dilaksanakan secara daring	
				Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	75	76.47	Kegiatan lomba kelurahan sebagai acuan nilai kelurahan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi covid-19 namun penilaian kelurahan tetap berjalan lewat aplikasi si jinggo, epdaskel dan mdaskel	Kegiatan penilaian kelurahan tetap ada melalui aplikasi si jinggo, epdaskel, dan mdaskel	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Pelaporan Pemerintahan Daerah	Persentase PD yang mengumpulkan Laporan Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	%	100	100	Kegiatan pengumpulan data sampai pengiriman LPPD terlaksana dengan baik namun dikarenakan pandemi covid-19 ada pembatasan kegiatan koordinasi yang diluar kota serta penilaian EKPPD yang sedianya Timnas akan datang langsung kedaerah namun karena pandemi ini maka dilaksanakan secara virtual sehingga penyerapan anggaran kurang	Kegiatan pengumpulan dan pengiriman LPPD dilakukan secara terbatas, Penilaian EKPPD dilaksanakan secara virtual	
				Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Jumlah pelaksanaan kegiatan	kegiatan	1	1	Kegiatan peringatan dilaksanakan dengan acara tasyakutan dan sepeda santai bersama dengan anggota tasakuran yang dibatasi dan menggunakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19	Kegiatan dilaksanakan dengan peserta kegiatan yang dibatasi dan menggunakan protokol kesehatan	
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintah melalui Penerapan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undang	%	100	100			
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	100	100			
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase peserta yang memahami pengadaan barang dan jasa	%	80	99			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Persentase permasalahan pengadaan barang dan jasa yang terselesaikan	%	100	0	Karena adanya refofusing anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana	Dianggarkan kembali pada tahun berikutnya	
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase layanan pengadaan secara elektronik tepat waktu	%	100	100			
2	Unsur Staf	SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO	Meningkatnya dukungan sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase anggota DPRD yang puas akan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	95			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Prosentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	100	100			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	98			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase capaian kinerja kegiatan minimal 80%	%	100	100			
				Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan, kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase perlengkapan, kebutuhan Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD yang tersedia dan layak pakai	%	100	98	Refocusing anggaran untuk covid 19	mengalokasikan anggaran untuk belanja penanggulangan covid 19	
				Peningkatan Daya Dukung Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase kegiatan Lembaga DPRD yang difasilitasi	%	70	77,39			
				Pengelolaan Perundang-undangan	Jumlah Raperda yang ditelaah dan difasilitasi	Raperda	10	6	Refocusing anggaran untuk covid 19	Fokus pada penanggulangan bencana non alam	
				Pengelolaan Rapat dan Risalah	Jumlah Rapat-rapat dan kunker yang difasilitasi	Raperda	420	400			



3.1.5 PELAKSANAAN UNSUR PENGAWASAN

Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pengawasan	Inspektorat	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penyelenggaraan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Nilai SAKIP						
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase laporan keuang tepat waktu	%	100	100			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu	%	100	100			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase capaian kinerja program kegiatan min 80%	%	80	100			
				PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL							
				Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah obyek pemeriksaan yang telah terbebas dari temuan yang bersifat materiil	opd	28	100			
				Penanganan kasus pengaduan dan Pemeriksaan dengan tujuan Tertentu di lingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	opd	100	100			
				PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	% SKPD yg melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan	%	55	110.39	Dari hasil evaluasi inspektorat tahun 2020 ada 17 OPD yang nilai SAKIPnya sudah mencapai nilai A sehingga realisasi pada indikator tersebut melebihi dari target yang ditetapkan		
				Pemantapan Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemda	Jumlah OPD yang nilai SAKIPnya Minimal BB	opd	29	29			
				PENGUATAN PENGAWASAN							
				Pengendalian Penyelenggaraan Pemda	Jumlah OPD yg melaksanakan maturitas SPIP sesuai aturan atau standart	opd	10	100			
Pemantapan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase permasalahan hukum ASN yg diputuskan antara APIP dan APH	%	100	100							



3.1.6 PELAKSANAAN FUNGSI PENUNJANG

Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Perencanaan	BeppedaLitbang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	80%	100%			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	100%	100%			
					Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	90%	100%			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100%	100%			
					Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	87%	87%			
					Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	87%	85%			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	85%	92%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	%	80%	100%			
				Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah tepat waktu	%	80%	92%			
					Persentase peningkatan kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Daerah dan Non APBD	%	5%	21%			
				Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah program dengan capaian nilai minimal 80%	program	129	110			
				Program Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase PD lingkup bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang menyusun dokumen berkualitas baik	%	100%	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program	52	52			
				Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Program	18	18			
				Program Perencanaan, Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase OPD lingkup bidang Ekonomi yang menyusun dokumen berkualitas baik	%	100%	100%			
				Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Investasi	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Investasi	program	13	13			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Perindustrian Dan Pariwisata	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Perindustrian Dan Pariwisata	program	8	8			
				Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase PD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang menyusun dokumen berkualitas baik	%	100%	100%			
				Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Infrastruktur	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan Infrastruktur	program	27	27			
				Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup	program	27	27			
2	Keuangan	BPPKAD	Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	- <i>Capaian Kinerja Program Minimal 80%</i>		80.00	85.71			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	- <i>Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu</i>	%	100.00	100.00			
					- <i>Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%</i>	%	90.00	100.00			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	- <i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran</i>	%	93	93			
					- <i>Persentase Administrasi Kependidikan yang Tepat Waktu</i>	%	95	95			
					- <i>Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu</i>	%	100	100			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	- <i>Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%</i>		80.00	97.56			
				Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	- <i>Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah</i>	%	(9.09)	(8.88)			
				Pelayanan, Penetapan, Pendataan Dan Penagihan Pajak Daerah	- <i>Jumlah WP yang mendapatkan penetapan tarif</i>		75	77			
					- <i>Jumlah penerbitan NPWPD WP baru</i>		100	102			
					- <i>Persentase peningkatan wajib pajak</i>	%	6	6.1			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					- Jumlah WP yang membayar tepat waktu		1.550	1.600			
				Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan	- <i>Persentase Realisasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan</i>	%	80,00	83,75			
				Peningkatan Penerimaan PBB & BPHTB	- Persentase Peningkatan PBB & BPHTB	%	2,50	3,14			
				Pendataan dan Penilaian PBB & BPHTB	- Jumlah obyek pajak yang dimutakhirkan		800	1.249			
					- <i>Persentase berkas pelayanan PBB dan BPHTB yang diselesaikan</i>	%	100	98			
				Penagihan Dan Pengolah Data PBB & BPHTB	- Jumlah SPPT dan DBHKP PBB yang diterbitkan dan didistribusikan		69.683	71.243			
					- Jumlah data digital dan data spasial yang telah direkonsiliasikan		1.800	2.061			
					- Kesesuaian data penerimaan PBB dan BPHTB		72.650	73.304			
					- Nilai realisasi penerimaan PBB (milyar)		15,3	15,57			
					- Nilai piutang PBB yang terselesaikan		694	740,6			
				Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah	- <i>Persentase pengelolaan BMD</i>	%	85,00	68,97			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Perencanaan Barang Milik Daerah	- <i>Persentase perencanaan BMD yang sesuai kebutuhan</i>	%	82,00	90,00			
				Pengamanan Barang Milik Daerah	- <i>Persentase tanah dan bangunan yang disertifikatkan</i>	%	6	5,98			
					- <i>Persentase tanah dan bangunan yang dimanfaatkan sesuai peruntukannya</i>	%	89	77,42			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	- <i>Persentase BMD yang terinventarisir</i>	%	80,00	78,00			
				Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	- <i>Persentase pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang terkendali</i>	%	100,00	96,38			
				Pengelolaan Kas	- <i>Persentase ketepatan posisi kas harian</i>	%	90	100			
					- <i>Persentase laporan DTH dan RTH tepat waktu</i>	%	60	91			
					- <i>Persentase potensi PAD dari penempatan dana daerah</i>	%	80	123,41			
				Perbendaharaan	- <i>Persentase ketepatan penatausahaan keuangan antara SKPD dan SKPKD</i>	%	75	100			
					- <i>Persentase GNNT di Pemkot Probolinggo</i>	%	75	75,67			
					- <i>Persentase ketepatan penatausahaan keuangan non RKUD</i>	%	75	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					- <i>Persentase ketepatan penerbitan SP2D</i>	%	85	100			
					- <i>Persentase ketepatan penerbitan SP3B</i>	%	75	100			
				Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	- <i>Persentase ketepatan pengelolaan hibah daerah</i>	%	90	94.28			
					- <i>Persentase ketepatan pengelolaan bantuan sosial daerah</i>	%	90	76			
					- <i>Persentase ketepatan pengelolaan penerbitan SP2D Gaji dan Tunjangan ASN</i>	%	100	100			
					- <i>Persentase ketepatan pengelolaan penganggaran gaji dan tunjangan ASN</i>	%	90	96.17			
				Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- <i>Persentase OPD menyelesaikan Laporan Keuangan yang berkualitas</i>	%	90,00	90,00			
				Pengembangan Manajemen Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan	- <i>Jumlah OPD yang menerapkan proses akuntansi pendapatan dan pembiayaan sesuai standar</i>		8,00	8,00			
				Pengembangan Manajemen Akuntansi Belanja	- <i>Jumlah PD yang menerapkan proses akuntansi belanja sesuai standar</i>		28,00	28,00			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan PD dan PPKD yang Akuntabel		8,00	8,00			
				Perencanaan Anggaran Daerah	- Persentase Perencanaan Anggaran OPD yang berkualitas	%	100,00	100,00			
				Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung	- Persentase rincian anggaran pendapatan dan pembiayaan yang telah disinkronisasikan dengan kebijakan terkait		100,00	100,00			
					- Jumlah PD yang menyusun rencana anggaran Belanja Tidak Langsung tepat waktu		35,00	35,00			
				Anggaran Belanja Langsung	- Jumlah PD yang menyusun rencana anggaran Belanja Langsung tepat waktu		35,00	35,00			
				Analisis dan Evaluasi Anggaran	- Jumlah PD yang menyusun RKA sesuai peraturan yang berlaku		35,00	35,00			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
3	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara serta penempatan sesuai kompetensi untuk mendukung profesionalitas aparatur	Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	78,00	50,00	Capaian kinerja program kesekretariatan bergantung pada capaian kinerja program dari bidang - bidang yang ada di BKPSDM	Mendorong bidang - bidang untuk lebih meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan	
				Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00			
					Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	75,00	88,89			
				Kegiatan Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	92,00	88,00			
					Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00			
					Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100,00	100,00			
				Kegiatan Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	98,00	96,00			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Lulus Pengembangan Kompetensi	%	90,00	70,18	Adanya perubahan kebutuhan (ABK) ujian penyesuaian ijazah yang semula 80 orang menjadi 40 orang berdampak pada capaian kinerja program		
									Anggaran Bantuan Biaya Pendidikan untuk Ijin Belajar S3, tidak dapat direalisasikan dikarenakan Perubahan Perwali tentang Ijin Belajar belum dapat diproses lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan capaian anggaran program tidak memenuhi target.		
					Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara	%	10,00	-200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menargetkan penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN pada tahun 2020 sebesar 10%. Sampai dengan akhir tahun 2020 penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN sebesar -200% dengan capaian sebesar -2.000,00% . Hal ini		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan pemahaman atasan langsung terhadap bawahannya yang melanggar disiplin yaitu dengan melaporkan dan memberikan tindakan sebagaimana ketentuan regulasi.		
					Persentase Aparatur Sipil Negara yang Telah Memenuhi Target Kinerja	%	90,00	100,92			
				Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	105	123			
					Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti program ijin belajar, tugas belajar dan ikatan dinas	orang	80	130	Anggaran Bantuan Biaya Pendidikan untuk Ijin Belajar S3, tidak dapat direalisasikan dikarenakan Perubahan Perwali tentang Ijin Belajar belum dapat diproses lebih lanjut.		
					Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Lulus Pengembangan Kompetensi	orang	137	110	Adanya perubahan kebutuhan (ABK) ujian penyesuaian ijazah yang semula 80 orang menjadi 40 orang		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Pegawai	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang paham tentang kedisiplinan	Orang	40	71			
					Jumlah Pejabat wajib LHKPN yang telah melaporkan LHKPN	Orang	41	41			
					Jumlah PNS yang mendapatkan fasilitasi bantuan dan konsultasi hukum	Orang	2	1	Jumlah PNS yang mendapatkan fasilitasi bantuan dan konsultasi hukum tidak dapat diprediksi		
					Jumlah Fasilitasi Kegiatan KORPRI	Kegiatan	1	1			
				Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Telah Divalidasi Tunjangan Kinerjanya	Orang	2.500	2.523			
					Jumlah PNS yang menerima Satyalancana Karya Satya	orang	150	200			
					Persentase Pengurusan Administrasi Kesejahteraan Pegawai yang diselesaikan tepat waktu	%	86,00	99,48			
				Program Pengelolaan Formasi, Informasi dan Mutasi Pegawai	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Ditempatkan sesuai dengan Profil Jabatan	%	86,00	94,62			
					Persentase Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang terpenuhi sesuai ketentuan	%	90,00	96,25			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah Jabatan yang disusun kebutuhannya sesuai dengan Analisis Jabatan	Jabatan	20	19			
					Jumlah usulan formasi Aparatur Sipil Negara	formasi	600	694			
					Persentase formasi Aparatur Sipil Negara yang dipenuhi	%	2,67	2,7			
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Kepegawaian	Jumlah record data Aparatur Sipil Negara yang diupdate / diperbaharui	Record data	10.000	9.230			
					Jumlah Profil Jabatan yang disusun	Dokumen	266	250			
					Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang di kembangkan	aplikasi	1	1			
				Kegiatan Pengelolaan Mutasi Pegawai	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan sesuai dengan Analisis Jabatan	Orang	2.520	2.752			
					Jumlah Dokumen Administrasi Mutasi Kepegawaian Yang terselesaikan	dok	500	565			
					Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai dengan Kategori Minimal Baik	orang	3.493	3.557			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
4	Penelitian dan Pengembangan	BeppedaLitbang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dikembangkan yang menjadi kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah	%	66	83			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Kota Probolinggo	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan yang diimplementasikan	Kajian	8	6	Adanya 2 kajian yang belum ditindaklanjuti oleh OPD terkait yaitu1,. Kajian Peningkatan Kapasitas Puskesmas Wonoasih Menjadi Rumah Sakit Type D (Tidak diimplementasikan karena Adanya RSUD baru di lokasi baru dan sudah masuk dalam RPJMD tahun 2019-2020) 2. Kajian Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Pasar Hewan (Belum dilaksanakan karena belum ada anggaran)		
				Penelitian Pembangunan, Inovasi Dan Teknologi	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial, Ekonomi, Dan Pemerintahan yang diimplementasikan	Kajian	6	5	Ada 1 kajian yang belum diimplementasikan yaitu kajian studi kelayakan pembangunan pasar tradisional kelurahan sumber taman Tahun 2019 (belum diimplementasikan karena DKUPP masih fokus untuk pembangunan pasar wonoasih yang	Tetap mendorong OPD untuk tetap mengimplementasikan Kajian yang sudah dilaksanakan oleh Bappeda Litbang	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									tahun ini akan melakukan DED)		
5	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi vertical terkait dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	95	92	Adanya pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan penghematan anggaran (refocusing) untuk mendukung prioritas pemerintah yaitu penanganan Covid-19 dan pemulih ekonomi masyarakat	Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, telah dilakukan 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020. 1. Refocusing Anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19. 2. Relokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19. Ketiga, penghematan belanja dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19.	-
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	%	83	95			
					Persentase realisasi keuangan kegiatan dengan capaian minimal 80%	%	85	99			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	%	92	90			
					Persentase administrasi kepegawaian yang tepat waktu	%	90	90			
					Persentase ketatalaksanaan tepat waktu	%	90	90			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase capaian kinerja kegiatan minimal 80%	%	90	92			
				Program Pengembangan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Persentase lembaga politik dan organisasi masyarakat yang mendapatkan penguatan	%	83	85			
				Penguatan Lembaga Politik, Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Persentase pemahaman lembaga yang mendapatkan Penguatan Etika dan Budaya Politik	%	85.00	70			
				Penguatan Organisasi Masyarakat	Persentase pemahaman Organisasi Masyarakat yang mendapatkan penguatan	%	80.00	69.60			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Progran Peningkatan Kesatuan Bangsa	Persentase potensi konflik sosial yang tidak menjadi konflik terbuka	%	100.00	100			
				Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya , Agama	Persentase pemahaman tentang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,, Sosial, Budaya, Agama	%	83.00%	78%			
				Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Prosentase potensi konflik yang difasilitasi	%	100.00%	100%			



3.1.7 PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI

Tabel 3. 7 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Koordinasi Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Fungsi Koordinasi	Kecamatan Kanigaran	Peningkatan fasilitas pelayanan publik	Peningkatan Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	97,7	97,0			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu;	%	92	92,0	Terbatasnya pendapatan dana transfer DAU dari pusat untuk Pemerintah Kota Probolinggo antara bulan sampai Oktober 2020 dampak dari covid 19 dimana serapan anggaran diharapkan selektif dan efisien		
					b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%						
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran;	%	100	100			
					b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu;						
					c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu						



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Kinerja Program Dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	100	100			
				Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	%	89	89			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai IKM	%	100	81,96	Adanya larangan pengumpulan massa sehingga kegiatan Bazar Pelayanan tidak dapat dilaksanakan		
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah Kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)	Kelurahan	2	2			
				Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	30	14			
				Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kelurahan	Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu	%	80	80			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Curahgrinting	Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu	%	80	0	Adanya larangan pengumpulan massa sehingga kegiatan Bazar Pelayanan tidak dapat dilaksanakan		
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kanigaran	Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu	%	80	0	Adanya larangan pengumpulan massa sehingga kegiatan Bazar Pelayanan tidak dapat dilaksanakan		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kebonsari Wetan	Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu	%	80	0	Adanya larangan pengumpulan massa sehingga kegiatan Bazar Pelayanan tidak dapat dilaksanakan		
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sukoharjo	Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu	%	80	20	Adanya larangan pengumpulan massa sehingga kegiatan Bazar Pelayanan tidak dapat dilaksanakan		
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kebonsari Kulon	Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu	%	80	0	Adanya larangan pengumpulan massa sehingga kegiatan Bazar Pelayanan tidak dapat dilaksanakan		
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Tisnonegaran	Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu	%	80	0	Adanya larangan pengumpulan massa sehingga kegiatan Bazar Pelayanan tidak dapat dilaksanakan		
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Curahgrinting	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	80	80			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kanigaran	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	80	80			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebonsari Wetan	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	80	80			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukoharjo	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	80	80			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebonsari Kulon	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	80	80			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tisnonegaran	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	80	80	Adanya kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan secara selektif dan efisien sehingga terdapat sisa pada pagu anggaran rutin kantor		
2	Fungsi Koordinasi	Kecamatan Kademangan	Peningkatan fasilitas pelayanan publik	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	100	100	Kurangnya aparatur pengelola keuangan Kecamatan dan kelurahan (honor 1, meskipun pekerjaan lebih dari 1)	Mengusulkan pemenuhan aparatur pengelola keuangan ke BKPSDM	
					Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	97	41,94	1. Adanya kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah pusat keputusan kementerian keuangan RI No. 10/KM.07/2020 sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan	Mengusulkan kembali kegiatan secara efektif dan efisien ditahun berikutnya (2021)	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
									2. Adanya pembatasan kegiatan dengan peserta jumlah banyak karena pandemic covid		
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	100	90,32			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	- Sisa pagu sumberdaya listrik, telp, air - Asuransi kesehatan tenaga PTT dan Kontrak, karena belum ada payung hukumnya		
					Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	90	100			
					Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	90	100			
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%	100	100			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	100	- Bazar pelayanan tidak dapat diserap, berpotensi menimbulkan klaster baru (pandemi Covid 19)	Diusulkan kembali secara efektif dan efisien di tahun berikutnya (2021)	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)	kelurahan	2	6	Asuransi RT RW tidak dapat diserap, belum ada aturan yang mendasari	Diusulkan kembali secara efektif dan efisien di tahun berikutnya (2021)	
				Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase penurunan gangguan keamanan	%	10	17,22			
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan	Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu	%	100	100			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kademangan	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	38	38			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kdul	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	23	23			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	47	47			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Lor	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	44	44	- Tidak dapat melaksanakan kegiatan pembinaan RT RW mulai dari semester II, karena pandemi covid 19 - Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat , Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan	Diusulkan kembali secara efektif dan efisien di tahun berikutnya (2021)	
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Ketapang	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	31	31	- Tidak dapat melaksanakan kegiatan pembinaan RT RW mulai dari semester II, karena pandemi covid 19 - Adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat , Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan		
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pilang	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	25	25			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kademangan	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	100	100	- Bazar pelayanan tidak dapat diserap, berpotensi menimbulkan klaster baru (pandemi Covid 19)	Diusulkan kembali secara efektif dan efisien di tahun berikutnya (2021)	
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pohsangit Kidul	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	100	100	- Bazar pelayanan tidak dapat diserap, berpotensi menimbulkan klaster baru (pandemi Covid 19)		
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Kidul	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	90	100	- Bazar pelayanan tidak dapat diserap, berpotensi menimbulkan klaster baru (pandemi Covid 19)	Diusulkan kembali secara efektif dan efisien di tahun berikutnya (2021)	
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Lor	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	100	100	- Bazar pelayanan tidak dapat diserap, berpotensi menimbulkan klaster baru (pandemi Covid 19)	Diusulkan kembali secara efektif dan efisien di tahun berikutnya (2021)	
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Ketapang	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	95	100	- Bazar pelayanan tidak dapat diserap, berpotensi menimbulkan klaster baru (pandemi Covid 19)		
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pilang	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	100	100	- Bazar pelayanan tidak dapat diserap, berpotensi menimbulkan klaster baru (pandemi Covid 19)		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
3	Fungsi Koordinasi	Kecamatan Mayangan	Peningkatan fasilitas pelayanan publik	PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	100	100			
					b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	100	100			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	Adanya Recofusing Anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 (Penjabaran IV)		
					Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	100	100			
					Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	100			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	100	100			
				PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%	100	100			
Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang tepat waktu	%	100	100							



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah Kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)	kelurahan	1	1			
				Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase penurunan gangguan keamanan	%	45	45			
				PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN	Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu	%	100	100			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Wiroborang	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	80	80			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jati	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	80	80			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sukabumi	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	80	80			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Mangunharjo	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	80	80			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Mayangan	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	80	80			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wiroborang	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	33	33			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jati	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	61	61			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukabumi	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	55	55			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mangunharjo	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	111	111			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mayangan	Jumlah RT RW yang aktif	RT RW	40	40			
4	Fungsi Koordinasi	Kecamatan Kedopok	Peningkatan fasilitas pelayanan publik	PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	80	80			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	100	100			
					Persentase realisasi keuangan kegiatan dengan capaian minimal 80%	%	100	100			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Persentase administrasi kepegawaian yang tepat waktu	%	100	100			
					Persentase ketatalaksanaan yang tepat waktu	%	100	100			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN	Prosentase Pelayanan yang standart pelayanan	%	100	100			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang tepat waktu	berkas	1600	1.486			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah Kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)	skor	235	235			
				Fasilitasi Peningkatan Keamanan Terpadu	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	100	175			
				PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN	Jumlah Kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)	skor	235	235			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sumber Wetan	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	84	84			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kareng Lor	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	84	84			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedopok	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	84	42			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jrebeng Kulon	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	84	84			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jrebeng Wetan	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	84	84			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jrebeng Lor	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	84	42			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sumber Wetan	Persentase Jumlah Lembaga Kelurahan dan RT RW Aktif	%	100	100			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kareng Lor	Persentase Jumlah Lembaga Kelurahan dan RT RW Aktif	%	97	97			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedopok	Persentase Jumlah Lembaga Kelurahan dan RT RW Aktif	%	100	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Kulon	Persentase Jumlah Lembaga Kelurahan dan RT RW Aktif	%	100	100			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Wetan	Persentase Jumlah Lembaga Kelurahan dan RT RW Aktif	%	100	100			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Lor	Persentase Jumlah Lembaga Kelurahan dan RT RW Aktif	%	100	100			
5	Fungsi Koordinasi	Kecamatan Wonoasih	Peningkatan fasilitas pelayanan publik	PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	99.43	75			
				Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	100	100			
					Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	96.59	75.45			
				Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Persentase administrasi kepegawaian yang tepat waktu	%	100	100			
					Persentase ketatalaksanaan yang tepat waktu	%	100	100			
				Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	100	93.55			
				PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN	Persentase Pelayanan yang Standart Pelayanan	%	66.26	66.26			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang tepat waktu	Jumlah	5170	734.00			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah Kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)	Kelurahan	4	4.00			
				Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	34	32.50			
				PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN	Persentase Pelayanan Kelurahan yang tepat waktu	%	85.95	85.95			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Wonoasih	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	84	84.00			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jrebeng Kidul	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	80	80.00			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pakistaji	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	82	82.00			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedunggaleng	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	85	85.00			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedung Asem	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	79	79.00			
				Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sumber Taman	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu	%	99.5	90.00			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonoasih	Jumlah RT/RW Aktif	RT/RW	31	31.00			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Kidul	Jumlah RT/RW Aktif	RT/RW	35	35.00			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pakistaji	Jumlah RT/RW Aktif	RT/RW	37	37.00			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedunggaleng	Jumlah RT/RW Aktif	RT/RW	17	17.00	Adanya kekurangan aparatur pejabat di kelurahan sehingga 1 orang pejabat merangkap 3 PPTK. Pada kel. Kedunggaleng hanya terdapat 1 lurah sebagai KPA, 1 Seklur sebagai PPK dan 1 kasi merangkap 3 PPTK.	Mengusulkan pemenuhan aparatur pada SKPD terkait	
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Asem	Jumlah RT/RW Aktif	RT/RW	25	25.00			
				Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sumber Taman	Jumlah RT/RW Aktif	RT/RW	51	51.00			



3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam table 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
1	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Dasar secara Online	Peraturan Walikota Probolinggo No. 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021	Agar pelaksanaan PPDB dengan sistem Zonasi sesuai dengan asas obyektif, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pengelolaan BOSDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Peraturan Walikota Probolinggo No. 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.	Agar pelaksanaan dan pengelolaan BOSDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
3	Peningkatan kesejahteraan bagi Guru TPQ, Guru Sekolah Minggu di Kota Probolinggo	Peraturan Walikota Probolinggo No. 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al Quran / Taman Pengajian Al - Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo	Pemberian Jasa bagi Guru Ngaji TPQ dan Guru Minggu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
		Peraturan Walikota Probolinggo No. 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al Quran / Taman Pengajian Al - Qur'an dan Guru Minggu Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo	Penambahan BPJS Ketenagakerjaan bagi Guru Ngaji TPQ dan Guru Minggu	
4	Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan corona virus disease di Kota Probolinggo	Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Desease</i> diikuti dengan : Perubahan Pertama : Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2020 Perubahan Kedua : Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Perubahan Ketiga : Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 Perubahan Keempat : Peraturan Walikota Nomor 143 Tahun 2020 Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian	Menurunkan kasus positif covid-19 dan kematian akibat covid-19 serta menyediakan sumber daya untuk penanganan covid-19	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>bagi Tenaga Kesehatan yang menangani <i>Corona Virus Desease 2019</i> diikuti dengan :</p> <p>Perubahan Pertama : Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020</p> <p>Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat berupa Tanggap Darurat dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Desease (Covid-19)</i> di Kota Probolinggo</p> <p>Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i></p> <p>Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Insentif Bulanan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani <i>Corona Virus Disease - 19</i> dengan Menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga</p> <p>Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i></p>		
5	Peningkatan pelayanan di Puskesmas	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Fleksibilitas dalam pengelolaan pegawai pada puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD	
6	Peningkatan cakupan keikutsertaan peserta KB	Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Kampung KB Se-Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020	Pencapaian peserta KB berjalan tertib dan sesuai aturan	
7	Pemberian Bantuan Sosial berupa Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO) kepada warga terdampak COVID-19	<p>Peraturan Walikota No 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota No 15 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat dalam rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Desease 2019</i></p> <p>Peraturan Walikota No 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota No 15 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat dalam rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Desease 2019</i></p>	Meringankan beban masyarakat Kota Probolinggo yang terdampak Covid-19 dalam segi perekonomian	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
8	Pengurangan/ Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah	<p>Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah</p> <p>Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo</p>	Memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak	BPPKAD



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah		
9	Pembetulan/ Pembatalan/ Pengurangan Sanki Admnistrasi	Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Memberikan pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi/ denda yang tercantum dalam STPD Denda	
		Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah		
10	Pengurangan pembayaran PBB bagi WP Badan dan WP Pribadi	Peraturan Walikota No. 175 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo	Memberikan pengurangan pembayaran PBB bagi WP Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, WP Badan berupa RS Swasta, WP Badan Organisasi/Lembaga/Yayasan Kemasayatan bersifat nirlaba dan WP Pribadi	
11	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020-2024	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah pegawai yang memasuki usia pensiun dan program kerja prioritas Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk Pendistribusian dan Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan formasi	BKPSDM
		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;		
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;		
		Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;		
		Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;		
		Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;		
		Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;		
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;		
		Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah		



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 121 tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.		
12	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 136 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	Masalah yang Diselesaikan : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengamanahkan untuk menjamin efisiensi, keterpaduan, dan akurasi data dan informasi kepegawaian, sistem informasi, dan Sumber Daya Manusia dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara sehingga diperlukan : 1. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah sebagai instrumen komunikasi data yang tepat; 2. Perubahan dalam proses administrasi dan manajemen kepegawaian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis aplikasi komputer melalui pengembangan dan pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Maksud dan Tujuan : Maksud : Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian secara lengkap, valid, akurat, real time, up to date, berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Tujuan : Untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akurasi pengambilan keputusan dalam	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;	Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara.	
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;		
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;		
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;		
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;		
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;		
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;		
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;		
		Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;		
		Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;		
		Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;		
		Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;		
		Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;		
		Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 180 Tahun 2019 tentang Kedudukan,		



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo.		
13	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/76/KEP/425.012/2020 tentang Panitia Seleksi Pergeseran Antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020	Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	1. Pembentukan Panitia Seleksi Pergeseran Antar JPTP Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>Peraturan Walikota Nomor 180 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.</p>		
14	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/77/KEP/425.01 2/2020 tentang Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Evaluasi Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah 	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>Peraturan Walikota Nomor 180 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.</p>		
15	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/160/KEP/425.0 12/2020 tentang Panitia Penyelenggara	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang	Dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian serta sebagai upaya pengembangan karier bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Walikota Nomor 180 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo; Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.	Probolinggo yang telah memiliki ijazah Strata 1 (S-1)/ Diploma IV tetapi pangkat/golongan ruang masih dibawah pangkat/golongan ruang awal dari pendidikan tersebut, dilaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah untuk mengisi formasi jabatan pelaksana kelas 7	
16	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/184/KEP/425.0	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan	1. Pembentukan Panitia Seleksi Pergeseran Antar JPTP Di Lingkungan	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	12/2020 tentang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020	Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;	Pemerintah Kota Probolinggo 2. Persiapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;		
		Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;		
		Peraturan Walikota Nomor 180 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo;		
		Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;		
		Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.		
17	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/233/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;	1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	BKPSDM
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;		
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;		
		Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;		
		Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;		
		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012		
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,		



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 376/MENKES/PER/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.		
18	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/234/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai	1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.</p>		
19	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/235/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang	1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter Gigi di Lingkungan	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	<p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya</p> <p>Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah</p>	<p>Pemerintah Kota Probolinggo</p> <p>2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo</p>	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.		
20	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/236/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.		
21	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/237/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Fisioterapis di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 640/MENKES/SK/IV/2005 tentang	1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Fisioterapis di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Fisioterapis di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/12/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 209/MENKES/SKB/III/2004 dan Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.</p>		
22	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/238/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;		
		Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;		
		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;		
		Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;		
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;		
		Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;		
		Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;		
		Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;		
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;		
		Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 209/MENKES/SKB/III/2004 dan Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;		
		Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat		



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.		
23	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/239/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Nutrisionis di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Nutrisionis di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Nutrisionis di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 894/MENKES/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1306/Menkes/SK/XII/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Nutrisionis; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.		
24	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/240/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil	1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.</p>		
25	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/241/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang	1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Lingkungan	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1811/Menkes-Kesos/SKB/XII/2000 dan Nomor 164A Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor : 66/Menkes-Kesos/SK/I/2001 tentang	Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.</p>		
26	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/242/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	<p>Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.</p>		
27	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/243/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	<p>Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.</p>		
28	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/244/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit	<p>Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana</p>	1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Radiografer di Lingkungan	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Radiografer (Kategori Keterampilan) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan	Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Radiografer di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.</p>		
29	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/245/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sanitarian (Tingkat Terampil) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri</p>	<p>1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Sanitarian di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo</p> <p>2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sanitarian di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo</p>	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;</p> <p>Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/ 10/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 19/KEP/M.PAN/11/2000 Tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya</p> <p>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1206/MENKES/SK/X/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, sebagaimana telah</p>		



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.		
30	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/246/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.</p>		
31	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/247/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di Lingkungan	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di 	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	Pemerintah Kota Probolinggo	Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang	Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.</p>		
32	<p>Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/248/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol PP di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol PP di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;		
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;		
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;		
		Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;		
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;		
		Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;		
		Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;		
		Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020		
		Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.		
		Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;		



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.		
33	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/249/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/3/2006 tentang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Lab. Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Lab. Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 413/MENKES/PER/IV/2007 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p>		
34	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/250/KEP/425.0 12/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 	BKPSDM



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;		
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;		
		Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;		
		Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;		
		Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer;		
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;		
		Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> ;		
		Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019;		
		Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;		
		Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020		
		Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pedoman Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.		
		Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Anggaran		



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.		
35	Instruksi Walikota Probolinggo Nomor : 188.55/2/INST/425.012/2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020	Surat Dinas dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/982/Keuda tertanggal 11 Februari 2020	Merupakan dasar pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai tindak lanjut surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri	BKPSDM
36	Surat Edaran Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN dan Non ASN Selama Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Covid - 19) Nomor : 800/2018/425.203/2020 Tanggal 14 Mei 2020	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin PNS di masa pandemi Covid-19	
37	Surat Edaran Penerapan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 840/2659/425.203/2020 Tanggal 7 Juli 2020	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru dan Aman dari Covid - 19 Bagi ASN di Lingkungan Kemdagri dan Pemerintah Daerah	Tujuannya agar Pegawai Aparatur Sipil Negara tetap produktif kerja di tengah pandemi Covid-19 namun tetap memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai sasaran target kinerja Perangkat Daerah serta menjamin kelancaran pelayanan publik.	
38	Surat Edaran Sistem Kerja ASN dan Non ASN dalam Pencegahan Covid - 19 Nomor : 065/5800/425.022/2020 Tanggal 29 Desember 2020	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru	Untuk mengendalikan penyebaran Covid - 19 serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor / instansi pemerintah sejak diberlakukannya tatanan normal baru.	



3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Tabel 3. 9 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
1	<p>Penyajian Data pada LKPJ Walikota Probolinggo Tahun 2020, target Anggaran tidak sesuai dengan data yang tidak ada pada Perda Nomor : 11 tahun 2019 dan Perwali Nomor 161 tahun 2019 dalam mempertajam alokasi Anggaran melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Perekonomian daerah dalam mendukung percepatan target-target kinerja ekonomi tahun 2019, dalam hal ini tidak berbanding lurus antara belanja langsung dan tidak langsung yang mana dalam dokumen LKPJ capaian serapan hanya 65,2%, tidak tercapainya target dari belanja langsung ini mungkin disebabkan adanya program kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang belum selesai.</p> <p>Badan Anggaran DPRD merekomendasikan :</p> <p>Perlu adanya perbaikan penyajian data target Anggaran pada LKPJ sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019 dan Peraturan Walikota Nomor : 161 tahun 2019 tentang penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja TA. 2019 tanggal 16 Oktober 2019, sehingga bisa terlihat capaian target realisasi anggaran 2019.</p>	<p>Berkaitan dengan penyajian data pada LKPJ Kota Probolinggo Tahun 2019, target anggaran tidak sesuai dengan data yang tidak ada pada PERDA Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD dan Perwali Nomor 161 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2019, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran yang disajikan pada LKPJ Kota Probolinggo Tahun 2019 sudah sesuai karena realisasi anggaran pada LKPJ telah mengakomodir perubahan penjabaran setelah adanya perubahan APBD 2019. Sementara untuk PERDA Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD dan Perwali Nomor 161 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2019 belum mengakomodir perubahan penjabaran setelah perubahan APBD.</p> <p>BPPKAD telah menyampaikan Perwali tentang perubahan penjabaran setelah adanya perubahan APBD 2019.</p>	<p>Kesesuaian data yang tersaji dalam LKPJ Kota Probolinggo Tahun 2019 dengan peraturan yang ada.</p>	BPPKAD
	<p>Terkait penyewaan Tanah Aset untuk petani atau masyarakat yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan sewa yang tidak boleh kurang lebih dari 5 tahun dan mengenai besaran kelas yang berbeda. Sangat memberatkan bagi para petani apalagi adanya Wabah Covid-19 pembayaran sewa Tanah Aset mohon kiranya ditunda dan ditinjau ulang karena memberatkan petani, seperti hanya relaksasi yang ada di perbankan karena kehidupan</p>	<p>1. Berdasarkan Amanat Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 155 Ayat (1) bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Sehingga karena Perwali Perubahan tarif retribusi yang diterapkan terbaru pada perwali no. 27 tahun 2019 mengenai kenaikan tarif retribusi daerah, maka tarif belum bisa dilakukan perubahan. Pasal 155 ayat (2) menerangkan bahwa peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan</p>	<p>1. Penyusunan PERWALI 27 tahun 2019 bertujuan untuk penyesuaian harga sewa tanah pertanian aset Pemkot Probolinggo untuk meningkatkan PAD. 2. Penyusunan PERWALI 40 Tahun 2019 bertujuan untuk mengatur tata kelola sewa tanah pertanian asset Pemkot Probolinggo</p>	



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	<p>yang dirasakan agak sulit bagi petani dengan adanya bencana Covid-19.</p> <p>DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Harga sewa tanah bisa diturunkan sesuai dengan clusternya (Perwali Nomor 40 Tahun 2018).2. Bagi penyewa tanah aset dengan kurun waktu 5 Tahun, Pemerintah Daerah agar memberikan kebijakan agar tidak memindah tangankan ke petani yang lain , karena sudah sesuai Azas kepastan dan kepatuhan mengelola 1 iring.	<p>memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Di mana hal tersebut salah satunya memerlukan penilaian dari tim independen.</p> <p>2. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Prosedur Pengelolaan Sewa Tanah Pertanian Aset Pemerintah Kota Probolinggo Bab IV Pasal 10 , bahwa masa sewa tanah pertanian asset paling lama selama 5 tahun dengan ketentuan setiap tahun dilaksanakan evaluasi dan registrasi ulang diantaranya berdasarkan kebijakan Walikota.</p>		
2	<p>Memperhatikan Tabel Belanja Daerah pada LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 pada Belanja Langsung target Rp. 829.435.067.963,53 (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Lima Puluh Tiga Sen) sedangkan realisasi Rp. 610.197.583.469,52 (Enam Ratus Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Puluh Dua Sen) atau (73,57%) tidak tercapai target dari belanja langsung ini salah satunya disebabkan oleh gagalnya pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni ditahun 2019.</p> <p>DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan :</p> <p>Agar pengajuan Program RTLH ini tetap diprioritaskan dengan dilengkapi by name by adres yang tepat.</p>	<p>Sejak tahun 2020 Pengajuan Program RTLH telah menggunakan aplikasi Hibah Bansos (Bantuan Sosial) yang diinput oleh masing-masing Kelurahan dan telah dilengkapi by name by address.</p> <p>Selanjutnya program RTLH akan dilaksanakan setiap tahun dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan</p>	<p>Program RTLH akan dilaksanakan setiap tahun dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan</p>	<p>BAPPEDA LITBANG</p>



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
3	<p>Sehubungan tidak maksimalnya penyerapan Anggaran maupun pelaksanaan dari Program Dana Kelurahan disetiap Kelurahan di Kota Probolinggo, yang dipenuhi oleh keterlambatan proses terbitnya regulasi Daerah/Perwali yang kurang proporsional dalam kewenangan pekerjaan yang boleh dikerjakan/tidak boleh dikerjakan (sesuai kriteria status tanah).</p> <p>DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan :</p> <p>Untuk sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ini dengan menyederhanakan regulasi Kelurahan. Agar dana Kelurahan dapat terlaksana dan dapat terserap dengan maksimal, dengan melibatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.</p>	<p>Terkait regulasi kewenangan pekerjaan yang boleh dikerjakan/tidak boleh dikerjakan (sesuai kriteria status tanah) sudah ditindak lanjuti melalui perwali nomor 177 tahun 2019 tentang Standarisasi Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Sedangkan terkait pelaksanaan Dana Kelurahan untuk kedepan kami akan melaksanakan konsultasi ke Kementerian Dalam negeri terkait mekanisme Dana Kelurahan yang belum maksimal.</p>	<p>Pelaksanaan dana kelurahan sudah ditindaklanjuti sesuai perwali 177 Tahun 2019 dengan menempatkan pada kode rekening yang sesuai peruntukannya dan Terkait status tanah bukan tanah asset terdapat kode rekening kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, untuk tanah asset pada kode rekening belanja modal</p>	<p>Bagian Pemerintahan</p>
4	<p>Untuk lebih memaksimalkan kinerja di setiap OPD, ULP /pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kota Probolinggo.</p> <p>DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan :</p> <p>Kepada setiap OPD melalui BKPSDM untuk menyiapkan tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa yang kompeten teragreditasi sehingga mempercepat pengadaan proses lelang.</p>	<p>Dalam Penerimaan CPNS formasi Tahun 2019, telah dibuka formasi untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama sebanyak 18 orang (dari total kebutuhan sebanyak 21 orang). Dan selanjutnya 18 orang CPNS tersebut sebagai calon pengelola pengadaan barang dan jasa (PPBJ) harus mengikuti diklat teknis fungsionalnya. Selain itu terdapat dua orang ASN yang saat ini masih dalam proses penyesuaian/inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa yang sedang menunggu penetapan formasi dan dari Kementerian PAN dan RB.</p>	<p>Untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa yang kompeten</p>	<p>BKPSDM</p>
	<p>Pemberian honor kepada tenaga PTT dan GTT hendaknya mempertimbangkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pendidikan 2. Masa Kerja 3. Beban Kerja <p>Sehingga akan terciptanya prinsip berkeadilan .</p>	<p>a. Sebagaimana pengertian dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa istilah PTT dan GTT ataupun tenaga honorer adalah merupakan kelompok Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan dan ditugaskan Pemerintah Daerah melalui perjanjian kerja berdasarkan sistem kontrak untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali guna melaksanakan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan diberikan penghasilan yang bersumber dari</p>	<p>Pemberian honor kepada pegawai Non ASN (tenaga PTT) berdasarkan rumpun jabatan, sesuai kebijakan Walikota Perwali Nomor 211 Tahun 2019 tentang Pegawai Non ASN dan Perwali Nomor 212 Tahun 2019 tentang Penghasilan pegawai non ASN</p>	<p>BKPSDM</p>



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Berkaitan dengan pemberian penghasilan/honor bagi tenaga Non ASN ini sudah diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 212 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non ASN terdiri dari : Penghasilan pokok dan penghasilan tambahan. Penghasilan Pegawai Non ASN ini diberikan sesuai dengan rumpun tenaganya sbb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rumpun Teknis2. Rumpun Operasional3. Rumpun Administrasi4. Rumpun Pelayanan5. Teknis Akuntansi6. Teknis Informatika <p>b. Yang besaran penghasilannya sudah menyesuaikan pada tanggung jawab dan beban kerja masing-masing jabatan, sebagaimana dalam aturan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Bab Penggajian dan tunjangan PNS, dasar pemberian honor dengan mengacu pada pendidikan hanya kita berikan spesifikasi untuk tenaga akuntansi dan tenaga informatika, hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan spesifikasi pendidikan sesuai dengan jabatannya. Khusus untuk PTT dan GTT di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian honor/gaji diatur secara terpisah melalui Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD yang disebutkan dalam Bab IV. Belanja BOSDA digunakan untuk membiayai pengeluaran honorarium GTT dan PTT yang memenuhi ketentuan jam kerja PNS. Adapun masukan atau rekomendasi dari Yang terhormat Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo adalah tepat terkait pemberian honorarium harus mengacu pada tiga komponen di atas (Tingkat Pendidikan, Masa Kerja dan Beban Kerja), akan tetapi sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Th 2019 ttg Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dimana unsur tegas peraturan tersebut adalah Pemerintah Daerah dilarang untuk mengangkat Pegawai Non ASN, sehingga secara permaknaan dari Peraturan Pemerintah ini bahwa</p>		



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>Pegawai Non ASN tidak diperkenankan untuk menggunakan atau menamakan istilah yang ada dalam nomenklatur jabatan ASN untuk pegawai ASN sampai dengan kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana disebutkan pada pasal 99, sehingga kita kesulitan untuk mengklasifikasi berdasarkan spesifikasi pendidikan dalam jabatan dengan melihat kondisi riil PTT dan GTT yang ada. Kedepan akan kami pertimbangkan saran dan pendapat Komisi I melalui koordinasi dengan pihak Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyesuaikan regulasi yang mengatur tentang pemberian honorarium bagi PTT dan GTT sambil menyesuaikan arah kebijakan pusat terkait keberadaan Pegawai Non ASN, sehingga prinsip penggajian adil dan layak bisa diwujudkan bagi Pegawai Non ASN tersebut.</p>		
5.	<p>Sebagai bentuk dan tanggung jawab bersama antara Legislatif dan Eksekutif, untuk itu kiranya sangat dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dalam melaksanakan Manajemen Pemerintahan Daerah pada umumnya dan melaksanakan program kerakyatan pada khususnya, maka hal ini sesuai Perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Terkait dalam hal substansi LKPJ pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 2019.</p> <p>DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan :</p> <p>Pembangunan Pasar Baru yang hampir 4 (empat) Tahun pembangunannya yang belum tuntas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pembangunan sektor selatan/Pasar Ikan mohon segera diselesaikan Tahun Anggaran 2020 dengan konsekuensi dilaksanakan pembangunannya dengan secepat mungkin, Manajemen Konstruksi Pasar Baru yang di launching bulan April atau paling lambat awal bulan Mei, karena mengingat Manajemen Konstruksi 	<p>Dengan Legislatif menyampaikan Rekomendasi DPRD Kota Probolinggo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo Tahun Anggaran 2019, maka pihak Eksekutif khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dengan ini menyampaikan tanggapan dari hal tersebut diatas, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Pasar Baru sebagaimana direncanakan Multi Years (Tahun Jamak) Tahun 2020 dengan anggaran Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah), Tahun 2021 dengan anggaran Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) Total Rp. 49.000.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Rupiah) dan Kebutuhan Anggaran untuk Manajemen Konstruksi (MK) Rp. 1.500.000.000,- (Satu Setengah Milyar Rupiah) dimana anggaran ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. <p>Pelimpahan Dokumen Lelang Manajemen Konstruksi (MK) pembangunan pasar baru sudah dilaksanakan pada bulan maret dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi dan diperbaiki, seiring perjalanan waktu tersebut Pemerintah Kota Probolinggo membutuhkan Anggaran yang</p>		<p>DINAS PEKERJAAN UMUM PENATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PEKERJAAN UMUM PENATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</p>



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	<p>akan bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan sehingga pekerjaan fisik maksimal akan bisa dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus, sehingga DPRD mengkhawatirkan putus kontrak seperti Tahun 2019 terjadi lagi, yang pada akhirnya masyarakat luas dan pedagang khususnya dalam Pasar Baru yang dirugikan.</p> <p>2. Untuk rencana pembangunan Pasar Baru sektor utara pedagang klontong, sayur sayuran dan sembako yang diprogram pada Tahun Anggaran 2021.</p>	<p>cukup besar dalam penanganan COVID 19 sehingga Anggaran Pembangunan Pasar Baru perlu diperhitungkan kembali untuk memenuhi keadaan darurat tersebut.</p> <p>2. Merujuk rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) direncanakan Anggaran Revitalisasi Pasar Baru sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Sektor Selatan Pembangunan Kantor UPT, Instalasi IPAL dan Pembangunan Atap Los Terobosan, Los Wedusan dan Finishing Pekerjaan Tahun Anggaran 2019; - Untuk Sektor Utara Pembangunan TPS dan Rehabilitasi Bagian Dalam Pasar (Rincian kegiatan dan jadwal terlampir). <p>Selanjutnya dengan besar Anggaran tersebut kami tidak lagi membutuhkan MK tapi cukup Konsultan Pengawas Lapangan, dimana Proses lelangnya dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelemang penyedia Fisik/Kontraktor.</p>		
	<p>Berkenaan dengan Probolinggo masih banyak ditemui jalan dalam kondisi rusak / berlubang / bergelombang, kondisi jalan yang demikian ini cukup membahayakan bagi para pengguna jalan yang melintas di jalan yg melintas di jalan tersebut. Dengan Anggaran yg begitu besar pemeliharaan ruas jalan sangatlah penting karena juga menyangkut kebutuhan dan keselamatan masyarakat Kota Probolinggo.</p> <p>DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan :</p> <p>Dalam pembangunan dan pemeliharaan tetap mengacu pada aspek keamanan dan keselamatan masyarakat, sehingga perlu dijaga kualitas</p>	<p>Merujuk rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Probolinggo untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Kota Probolinggo tentang jalan dalam kondisi rusak/berlubang/bergelombang, kondisi jalan yang demikian ini cukup membahayakan bagi para pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut, sehingga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Kota Probolinggo akan diusulkan menggunakan Dana Swakelola pada Pos Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kota Probolinggo.</p>		



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	dan pengerjaanya sesuai dengan aturan.			
6	<p>Terjadinya keterlambatan pembangunan di tahun 2019 di sebabkan proses pengerjaannya yang rata-rata dilaksanakan di bulan Agustus, sehingga pengerjaan proyek pembangunan tidak bisa maksimal contoh pengerjaan proyek pasar baru, pasar kronong, alun-alun dan sebagainya Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan : semua DED (perencanaan) di pembangunan bisa dilaksanakan di awal tahun.</p> <p>Pertumbuhan UMKM setiap Tahun sebesar 500 UMKM.</p> <p>DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pertumbuhan jumlah UMKM hendaknya diimbangi dengan kemampuan UMKM dalam Aspek Kesehatan Usaha (produksi, pemasaran) termasuk persaingan usaha antar UMKM.2. Menstimulus kesehatan usaha UMKM dengan memfasilitasi penggunaan produk UMKM di kalangan Pemerintahan, memfasilitasi pemasaran online dan permodalan.3. Perlindungan kelangsungan usaha UMKM terutama menghadapi persaingan dengan peritel modern, antara lain dengan melakukan "Pembatasan Sosial Berskala Besar" terhadap perijinan usaha peritel modern yang baru.4. Perlunya relaksasi angsuran kredit bagi UMKM, tidak hanya kredit yang berhubungan dengan pengkreditan Nasional tapi perlu juga ralaisasi terhadap sumber kredit swasta termasuk koperasi yang justru lebih banyak di masyarakat.	<p>DKUPP akan melaksanakan DED pada tahun sebelum pelaksanaan proyek</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan terhadap UMKM tetap dilakukan secara berkesinambungan termasuk dalam hal keahliannya, kemasan maupun pemasaran sehingga produk-produk UMKM dapat bersaing di pasaran2. Stimulus terhadap pelaku UMKM tetap dilakukan melalui dana bergulir (Dagulir) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk UMKM. Pembinaan terhadap sistem pemasaran online dilakukan sebagai cara atau sistem baru yang sekarang ini juga diminati pasar (publik konsumen)3. Dalam rangka menyikapi perkembangan retail modern maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) menjalin kerjasama agar para peritel modern tersebut menyediakan space atau lokasi atau tempat untuk display produk UMKM dalam rangka menambah promosi produk dan penjualannya.4. Relaksasi angsuran kredit bagi UMKM khususnya yang untuk Dana Bergulir telah dilakukan. <p>Sedangkan untuk koperasi-koperasi yang ada di masyarakat maka telah disampaikan untuk melaksanakan relaksasi kredit dan keputusan pelaksanaannya bergantung pada koperasi bersangkutan.</p>	<p>Agar pelaksanaan pengerjaan proyek bisa maksimal</p>	<p>DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p>



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
7	<p>Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini antara target dan realisasi masih jauh, maka agar target tercapai DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan adanya optimalisasi kegiatan yang sudah direncanakan.</p>	<p>Dapat kami sampaikan dengan hormat, berkenaan dengan rekomendasi DPRD Kota Probolinggo untuk mengoptimalkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2020 sudah menyusun Rencana Aksi dalam rangka memaksimalkan pencapaian sasaran dan target kinerja Program dan Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Selain itu juga memaksimalkan program dan kebijakan antara Kebijakan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta kebijakan dari Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>Peserta didik/siswa PAUD tetap dapat menerima pembelajaran meskipun secara daring/virtual, 2) Agar program dan kegiatan prioritas PAUD tetap terlaksana</p>	<p>DINAS PENDIDIKAN dan OLAH RAGA</p> <p>DINAS PENDIDIKAN dan OLAH RAGA</p>
	<p>Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia dalam mendukung Ujian Nasional berbasis komputer. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar supaya dinas Pendidikan menganggarkan kembali Program Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran (bantuan komputer). Kepada Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta secara merata.</p>	<p>Dapat kami sampaikan dengan hormat, berkenaan dengan rekomendasi DPRD Kota Probolinggo dalam rangka mendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer untuk tahun pelajaran 2019/2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan tetap berupaya memenuhi peralatan pendidikan dan media pembelajaran khususnya untuk UNBK baik untuk Lembaga Negeri maupun Swasta. Untuk Pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2019/2020, terhadap pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SD sampai dengan SMP kami tetap mengacu kepada Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berdasarkan data pemenuhan peralatan pendidikan dan media pembelajaran (Komputer) untuk satuan pendidikan negeri Jenjang SD dan SMP sudah terpenuhi. Namun demikian, dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector pendidikan di Kota Probolinggo akan berupaya tetap mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan salah satunya dengan pengadaan peralatan pendidikan dan media pembelajaran melalui sumber dana baik DAK maupun dari APBD Kota Probolinggo.</p>	<p>Peningkatan mutu Pembelajaran dengan upaya pemenuhan peralatan pendidikan dan media pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar di Kota Probolinggo</p>	



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	Pemberian Honor GTT dan PTT dilingkungkan Dinas Pendidikan pada Tahun 2009 belum bisa dikatakan sebagai batas kesejahteraan. Pendidikan adalah garda terdepan pembangunan bangsa dan negara, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan perlu adanya peningkatan Honor/Kesejahteraan di tahun-tahun kedepan	Dapat kami sampaikan dengan hormat, tanggapan rekomendasi untuk Honor/Kesejahteraan bagi GTT dan PTT di lingkungan Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengupayakan pemenuhan honor /Kesejahteraan GTT dan PTT melalui pemenuhan BOSDA Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP baik swasta maupun negeri berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah.	Peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT pada satuan pendidikan	
	Pembagian Seragam Sekolah kepada Siswa di tingkat SD dan SMP di lingkungan Kota Probolinggo, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar kedepan Pemerintah Kota Probolinggo melalui instansi terkait, dapat benar-benar fokus dan serius dalam melakukan perencanaan dan penyusunan program-program kerja kedepan dengan harapan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kembali lagi, dikemudian hari diharapkan Pemerintah Daerah bisa melakukan perencanaan program untuk menganggarkan pembagian seragam kepada siswa/siswi di Sekolah Swasta.	Dapat kami sampaikan dengan hormat, tanggapan rekomendasi untuk program pemberian seragam kepada siswa/siswi di Sekolah Swasta, kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo tetap merencanakan dan mengupayakan pemenuhan seragam kepada siswa/siswi satuan pendidikan SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta khususnya kepada Peserta Didik Baru pada tahun pelajaran yang berkenaan, untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan langkah – langkah sebagai berikut: 1. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk pemenuhan seragam bagi siswa / peserta didik baru pada P-APBD tahun anggaran 2020. 2. Penguatan kebijakan pelaksanaan program pemenuhan seragam bagi siswa/peserta didik baru berkoordinasi SKPD terkait, sehingga pelaksanaan pemenuhan seragam dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pemenuhan kebijakan Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar di Kota Probolinggo	
8	Dalam memaksimalkan pelayanan RSUD Dr. Moh. Saleh DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan : Agar Rumah Sakit yang ada yaitu RSUD dr. Moh. Saleh dan Puskesmas-Puskesmas diprioritaskan dalam hal memenuhi kualitas sarana dan prasarannya Rumah Sakit yang ada perlu diperhatikan, ditingkatkan kualitasnya yang sudah diprogramkan dilanjutkan sesuai master plan yang sudah dibuat. Jangan terlalu fokus pada pembangunan Rumah Sakit baru yang belum ada, sementara yang sudah ada dibiarkan / dikurangi	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan di Puskesmas merupakan prioritas pembangunan Kesehatan di Dinas Kesehatan , PP dan KB Kota Probolinggo. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan di puskesmas tersebut, Dinas Kesehatan, PP, dan KB sudah melaksanakan dan merencanakan sarana prasarana maupun SDM-nya. Beberapa program kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas Tahun 2020 antara lain : a. Rencana pengadaan alat kesehatan gigi dan mulut, alat Kesehatan kamar Obat, alat Kesehatan kamar Bersalin, Alat Kesehatan Unit	Pemenuhan sarana dan prasarana RS mulai terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi RS saat ini	RSUD dr. MOH. SALEH dan DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	dan pembangunan sarana dan prasarannya.	<p>Gawat Darurat dan Alat Kedokteran umum bersumber anggaran DAK maupun JKN;</p> <p>b. Pemeliharaan rutin berkala sarana bangunan Gedung Puskesmas setiap tahun;</p> <p>c. Penambahan sarana Ambulance untuk Puskesmas Pembantu melalui Program Pelayanan Ambulans Siaga 112;</p> <p>d. Penambahan Akreditasi FKTP bagi semua Puskesmas setiap 3 Tahun sekali dalam rangka mengukur Mutu Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas;</p> <p>e. Pelatihan tenaga fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi petugas pelayanan di Puskesmas</p>		
	Pemerintah Kota Probolinggo untuk segera memperbarui Pengurus (Restruktur) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Probolinggo, agar supaya proses pelayanan PMI baik itu mobilisasi Donor Darah maupun Administrasi dapat segera berjalan dan tidak tersendat dikarenakan matinya SK/habisnya masa kepengurusan PMI yang lama. Untuk dapatnya diperhatikan dengan serius mengingat situasi saat ini kita sedang dilanda Pandemi Covid-19.	<p>PMI Kota Probolinggo sebenarnya sudah merencanakan untuk melaksanakan Musyawarah Kota untuk pemilihan Ketua PMI Kota Probolinggo, namun dengan adanya penepatan Wabah Pandemi oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur Jawa Timur maka pelaksanaan kegiatan tersebut ditunda sampai dengan wabah covid-19 dinyatakan selesai.</p> <p>Selama masa tunggu tersebut dan kegiatan di PMI agar tetap berjalan, Walikota Probolinggo sudah mengajukan usulan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI ke Ketua Harian PMI Jawa Timur melalui Surat Walikota Nomor 443/1181/425.102/2020 tertanggal 2 Maret 2020 dan sudah disetujui oleh PMI Provinsi Jawa Timur dengan dikeluarkannya SK Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 039/KEP/02.06.00/III/2020 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Ketua PMI Kota Probolinggo Masa Bakti Tahun 2020-2025 an. Drg. NINIK IRA WIBAWATI, MQIH.</p> <p>Selanjutnya Plt. Ketua PMI Kota Probolinggo ditugaskan untuk menyiapkan dan melaksanakan Musyawarah Kota PMI Kota Probolinggo segera setelah masa wabah pandemic Covid-19 dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa timur.</p>		
9	Berkaitan dengan Tata Kelola Sampah jenis Sampah Rumah Tangga di Kota Probolinggo yang masih kurang maksimal. Pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota Probolinggo terkait sampah/TPS khusus untuk	Sebagai upaya menangani sampah rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melaksanakan pengelolaan sampah melalui Bidang Penanggulangan (P2S) dan Penanganan Sampah dan UPTD Pengelolaan Sampah (UPTD PS).	Dalam peningkatan kerja dan pelayanan ke masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo hanya mempunyai tenaga 317 orang dalam hal	Dinas Lingkungan Hidup



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	<p>masyarakat sepertinya kurang serius, dalam hal ini dalam penanganannya.</p> <p>Keluh kesah juga datang dari Tukang pemungut sampah, bahwa Gerobak yang mereka bawa cukup berat untuk mengangkut dari rumah ke rumah sampai menuju TPS, bahkan masyarakat juga prihatin kepada tukang pemungut sampah yang sampai saat ini masih menggunakan Gerobak dorong dengan jangkauan TPS yang lumayan jauh. Maka kondisi seperti tersebut yang menyebabkan pemungut sampah tidak dapat mengambil sampah tiap hari sehingga banyak warga yang berinisiatif untuk memusnakan sampah rumah tangga mereka dengan cara dibakar.</p> <p>Kemudian kondisi yang cukup miris ketika dijumpai beberapa waktu di TPS tertentu masih banyak sampah tercecer diluar area TPS, sehingga kondisi seperti ini tidak enak dipandang mata</p> <p>DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar Pemerintah Kota Probolinggo untuk lebih memperhatikan usulan Armada Pemungut Sampah agar segera di ubah.</p>	<p>Bidang P2S telah berupaya maksimal dalam menangani sampah yang ada di Kota Probolinggo melalui pembangunan TPS di semua Kecamatan dan juga melaksanakan pengambilan sampah di semua TPS setiap hari. Bidang P2S juga melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan TPS, akan tetapi pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena anggaran yang ada di alihkan untuk penanganan Covid 19.</p> <p>UPTD PS melaksanakan pengelolaan sampah dengan membentuk Bank-bank sampah di semua kelurahan di Kota Probolinggo, melalui Bank Sampah masyarakat di sosialisasikan ntuk memilah sampah di sumbernya yaitu rumah tangga sehingga akan mengurangi sampa rumah tangga menumpuk di TPS.</p> <p>UPTD Pengelolaan Sampah juga melaksanakan pengambilan sampah yang telah terpillah berupa plastik dll yang masih laku di jual untuk disetor ke Bank Sampah Induk Maspromesra. Apabila masyrakat memilah sampah organik (daun-daunan) dan menyeter, maka UPTD PS akan mengelolan menjadi kompos dan masyarakat akan memperoleh pengembalian sebanyak 70 % dari sampah yang telah di setor</p> <p>Di Kota Probolinggo terdapat warga masyarakat melaksanakan pengambilan sampah di rumah tangga-rumah tangga, ada yang mengambil dengan gerobak dorong dan tossa. Untuk pengambil sampah dengan gerobak dorong dapat membuang sampah di masing-masing TPS di kecamatan masing-masing sehingga tidak terlalu jauh. Sedangkan untuk pengambil sampah dengan tossa bermotor, sampah dapat di buang di TPA Bestari. Dinas Lingkungan Hidup juga telah melaksanakan sosialisasi persampahan kepada masyarakat dan Paguyuban Gerobak Sampah yaitu Paguyuban PGS Ceria diharapkan melalui sosialisasi mereka lebih paham dalam mengelola sampah dai masyarakat.</p> <p>Para penarik gerobak sampah itu biasanya dikoordinir oleh masing-masing RT/RW, dimana masyarakat yang mendapat pelayanan pengambilan sampah membayar iuran pada RT masing-masing. Sejak tahun 2016 pengadaan gerobak sampah telah</p>	<p>penanggulangan sampah dan kebersihan khususnya diwilayah Kota Probolinggo didaerah selatan sangatlah butuh perhatian khusus dalam pemerataan dibidang kebersihan,</p>	



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>sudah dilimpahkan ke kecamatan dan berdasarkan Instruksi Walikota No.188.45/01/425.012/2019 tanggal 21 Pebruari 2019, penanganan sampah di pemukiman menjadi kewenangan Camat, Lurah dan RT/RW setempat,</p> <p>Masalah penangan sampah merupakan masalah yang penting dan menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk itu diperlukan kerjasama antar Dinas yang terkait serta Kecamatan dan Kelurahan serta RT/Rw yang ada. Dan yang tidak kalah penting, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar penanganan sampah di Kota Probolinggo lebih optimal</p>		
10	DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar Pemerintah Kota mengadakan pengawasan lebih ketat dilapangan terkait Kendaraan bertonase besar agar tdak melintas/masuk dalam kota yang mengakibatkan jalan bergelombang/rusak dan membahayakan keselamatan masyarakat.	<p>Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Perhubungan Kota Probolinggo telah mengantisipasi masuknya kendaraan bertonase besar yang melintas.masuk dalam kota dengan melaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemasangan rambu lalu lintas larangan Bus/Truk masuk Kota di traffic light Pilang dab traffic light Randupangger serta Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) di Simpang Tiga Jalan Panglima Sudirman ke Jalan Raden Wijaya (JLU);2. Menempatkan petugas pengelola pengawasan LLAJ (Motoris) di pom pam pilang dan pos pam Randupangger pada pukul 19.00 WIB – 22.00 WIB3. Melaksanakan operasi gabungan terpadu dengan Satlantas Polres Probolinggo Kota dan terkait secara rutin pada setiap bulan (kecuali pada masa pandemi virus covid-19) <p>Berdasarkan hasil evaluasi, tentunya adanya kendaraan bertonase besar melintas/masuk dalam kota adalah didominasi oleh kendaraan pengusaha barang/ekspedisi yang alamat kantor dan/atau usaha pergudangannya erada di dalam wilayah Kota Probolinggo. Sehingga di masa mendatang hal ini perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pemebrian perizinan usaha perdagangan dan/atau usaha jasa ekspedisi pergudangan untuk tidak berada di jalan kota atau tidak berada di dalam wilayah Kota Probolinggo dengan persyaratan tertentu</p>	<p>Terciptanya kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas di Jalan Kota Probolinggo</p> <p>Mengurangi kepadatan lalu lintas dalam kota menyesuaikan kapasitas jalan kota dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga zero accident</p>	Dinas Perhubungan
11	DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan Menyikapi pengaruh Covid-19 terhadap segala sesuatu, khususnya yang	<ol style="list-style-type: none">1. Bahwa dalam menyikapi Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid 19 maka Pemerintah Kota Probolinggo dengan SK Walikota Probolinggo	Tersedia data yang valid untuk program penanganan pandemi covid 19 baik dari aspek	Dispendukapil



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	menyangkut dampak ekonomi dan sosial di masyarakat maka diperlukan up-dating data baik yang berhubungan dengan kependudukan, pendatang baru, angka kemiskinan baru yg berhubungan dengan jejaring sosial serta data perekonomian termasuk UKM terdampak Covid-19 sehingga memudahkan pemetaan penanggulangan secara merata dan tepat sasaran.	<p>tanggal 1 April 2020 Nomor: 188.45/189/KEP/425.012/2020 tentang Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID 19) dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo menjadi anggota dalam gugus tugas perencanaan, data, pakar, dan analisis.</p> <p>2. Updating yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo berbasis pada database kependudukan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan dari OPD teknis yang meminta data.</p> <p>3. Mekanisme pemberian data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.</p>	perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi dan jargng pengaman sosial	
12	<p>Masalah Penurunan Hasil Produksi Perikanan (budidaya dan tangkap) Maka Kota Probolinggo merekomendasikan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan kapasitas Nelayan dalam teknologi dan manajemen produksi perikanan, baik budidaya maupun tangkap, berbasis penelitian yang akurat.2. Perlindungan bertahap terhadap Nelayan lokal dalam menghadapi persaingan dengan pemodal kuat.	<p>Penurunan hasil produksi tangkap sebenarnya bukan semata-mata karena teknologi penangkapan yang kurang berkembang akan tetapi musim dan cuaca yang tidak mendukung kegiatan penangkapan serta sumber daya ikan yang mengalami degradasi penurunan dan pemakaian alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan juga sangat mempengaruhi hasil produksi tangkap. Sedangkan penurunan produksi budidaya perikanan disebabkan beberapa faktor antara lain, adanya peralihan komoditas ikan yang dibudidayakan ke jenis ikan dengan nilai jual lebih tinggi namun memerlukan waktu pemeliharaan yang lebih lama, serta pengaruh harga ikan yang tidak stabil dalam musim tertentu yang menyebabkan pembudidaya harus menunda panen untuk menunggu harga ikan stabil. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo dengan menganggarkan dan melaksanakan Program :</p> <p>Pengembangan Perikanan Tangkap, kegiatan Pengembangan dan Fasilitasi Kenelayan dengan melakukan sosialisasi perundangan yang berhubungan dengan penangkapan</p>		DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN dan PERIKANAN



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>dan pelatihan alat tangkap yang ramah lingkungan</p> <p>Pengembangan Perikanan Budidaya, kegiatan Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya dengan melakukan Sekolah Lapang dan Sosialisasi tentang teknologi budidaya dan penguatan kelembagaan kepada pembudidaya ikan dan masyarakat / pembudidayaan ikan baru</p> <p>Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT), kegiatan Pembinaan dan Pelatihan keterampilan Kerja Bagi tenaga Kerja dan Masyarakat Pembudidaya Ikan dengan sosialisasi teknologi budidaya ikan tawar kepada pembudidaya ikan baru di 5 (lima) kecamatan.</p> <p>Sedangkan untuk perlindungan dari segi modal, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan selama ini memfasilitasi program dari Pusat (Kementerian kelautan dan Perikanan) yaitu melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLULPMUKP) yang melayani pinjam modal bagi pelaku usaha perikanan dengan bunga rendah (3%).</p>		
13	<p>Memperkuat intensitas Penanggulangan Kemiskinan dengan memperluas jangkauan Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan memanfaatkan jejaring antar Pemerintah maupun kemitraan dengan CSR dan atau pihak lain dalam kerangka kerja kolaborasi triple-helix (Pemerintah Daerah-Perguruan Tinggi-Perusahaan) atau penta-helix (Pemerintah Daerah-Perguruan Tinggi-Perusahaan-Masyarakat-Pers/Media).</p>	<p>Melihat pentingnya sinergitas antara Pemerintah Daerah-Perguruan Tinggi-Perusahaan-Masyarakat-Pers/Media untuk memperkuat intensitas penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak berkeinginan untuk membuat forum komunikasi untuk sarana bertukar informasi, dan berdiskusi dalam mengidentifikasi dan memberikan solusi bagi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bagaimana dan seperti apa yang harusnya kita buat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta dengan mengoptimalkan fungsi pelayanan sinergitas jaringan pada ULTPK dan pekerja sosial masyarakat.</p> <p>Kerjasama dan fasilitas terhadap CSR dari perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Probolinggo telah dilakukan dan terus menerus akan dikembangkan pelaksanaannya.</p> <p>Program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Probolinggo telah disampaikan kepada perusahaan, sehingga mereka dapat</p>	<p>Untuk Penanggulangan Kemiskinan</p>	<p>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN BAPPEDA LITBANG</p>



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<p>memilih dan memilah program/kegiatan yang bisa mereka dukung.</p> <p>Salah satu contoh yang telah terlaksana adalah bantuan CSR perusahaan untuk pembangunan jamban keluarga tahun 2019 serta bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus Covid-19 di tahun 2020.</p>		

3.4 PRESTASI YANG TELAH DIRAIH

Tabel 3. 10 Prestasi yang Telah Diraih

NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL	PERANGKAT DAERAH
1	Tanda Penghargaan kepada Kepala Daerah di Wilayah Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Tahun 2020	Nasional (Diberikan oleh Kemenkes)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Tanda Penghargaan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Tahun 2020 kategori Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Posbindu PTM	Nasional (Diberikan oleh Kemenkes)	
3	Pemenang Lomba Pengukuran Kebugaran Jasmani Secara Mandiri dengan Aplikasi "SIPGAR" Kategori Kabupaten / Kota	Nasional (Diberikan oleh Kemenkes)	
4	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 dengan Kategori Pratama	Tingkat Nasional	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	Juara III dalam KUBE Berprestasi Tahun 2020	Tingkat Provinsi	
6	Juara III dalam Pendamping KUBE Berprestasi Tahun 2020	Tingkat Provinsi	
7	Juara III dalam PSM Berprestasi Tahun 2020	Tingkat Provinsi	
8	Harapan II Perempuan Inisiator Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	Tingkat Provinsi	
9	Juara I Lomba Inovasi Pendamping Bidang Pendidikan Tahun 2019	Tingkat Provinsi	
10	Meraih Tingkat Madya Kota Layak Anak Tahun 2019	Tingkat Provinsi	
11	Juara Lomba Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana terbaik Kategori Pratama Tahun 2020	Tingkat Provinsi Jawa Timur	BPBD
12	Adiwiyata Provinsi SDN. Sukabumi IV	Tingkat Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
13	Program Kampung Iklim (Proklam) a. Kel. Pilang (Trophy Proklam Utama) b. Kel. Wiroborang (Sertifikat Proklam Utama) c. Kel. Jrebeng Wetan (Sertifikat Proklam Utama)	Tingkat Nasional	
14	Penghargaan Indonesia Smart Nation Award 2020, kategori Smart Society	Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Badan Publik Menuju Informatif Kab/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Provinsi Jawa Timur	
16	Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Propinsi	Propinsi	Bappeda Litbang
17	Opini BPK atas LKPD TA.2019	Nasional	BPPKAD



NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL	PERANGKAT DAERAH
18	22 Karya Terbaik Penilaian praktek baik Kecamatan dalam penanggulangan Covid-19 Tahun 2020	Tingkat Provinsi	Kecamatan Wonoasih
19	Lomba Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Tahun 2020 (Harapan 1)	Tingkat Provinsi	

3.5 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 menetapkan 8 (delapan) indikator tujuan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 25 (dua puluh lima) indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Target Indikator Kinerja dimaksud ditetapkan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2020. Adapun data awal capaian indikator kinerja Tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 3. 11 Indikator Kinerja Utama Pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024

NO	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan							Sasaran	Indikator Sasaran						
			Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Capaian 2020	Ket	Sumber data		Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Capaian 2020	Ket	Sumber data
I	Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,94	5,99	-3,64	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor memiliki share terbesar terhadap PDRB Kota Probolinggo yakni sebesar 25,71 %, mengalami pertumbuhan negatif 5,74%. Adanya pemberlakuan jam operasional dimasa pandemi COVID19 pada pasar-pasar besar, pusat perbelanjaan, swalayan seperti Alfamart, Indomaret, dan juga toserba lainnya menyebabkan penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan mobil dan kendaraan bermotor secara nasional sepi pembeli, sehingga mengalami penurunan sejak April sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 43,6 % untuk kendaraan bermotor, begitu juga penjualan mobil sebesar 48,3 %.	BPS	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	-12	0,5	0,37	Realisasi investasi pada tahun 2019 mencapai Rp 4.444.684.564.917 dan meningkat menjadi Rp 6.116.025.342.540 pada tahun 2020. Menurut besarnya nilai investasi, sektor industri masih menjadi sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam realisasi investasi di Kota Probolinggo. Dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online dari aplikasi LKPM BKPM RI tercatat realisasi investasi tahun 2020 pada Penanam Modal Asing (PMA) mencapai Rp 5.152.921.394.102,- atau sebesar 84,25% dan Penanam Modal Dalam Negeri mencapai Rp.100.980.482.518,- atau sebesar 1,65%. Menurut jumlahnya, sektor usaha perdagangan merupakan sektor yang terbanyak di Kota Probolinggo. Tercatat ada sebanyak 2572 unit usaha dengan nilai total investasi senilai Rp 26.739.930.000 (0,44%) mendaftarkan izin usaha baru melalui O.S.S di tahun 2020. Dengan aplikasi O.S.S pelaku usaha kecil/mikro dapat menikmati kemudahan untuk mendaftarkan usahanya dan mencetak surat izin usaha secara mandiri. Adanya surat izin usaha sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan stimulus covid-19 dari pemerintah pusat juga turut menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah pendaftar izin usaha perdagangan di tahun 2020. Selain itu, di tahun 2020 Sektor Bidang Usaha Gedung Perumahan dan Ruko juga masih tumbuh dengan kontribusi investasi mencapai Rp.12.350.000.000,- atau sebesar 0,2% dan sektor bidang usaha lain-lain (tower/klinik kecantikan) mencapai Rp.3.480.000.000,- atau sebesar 0,06%. Sisanya sebesar 13,40% ditunjang dari Izin Usaha Industri baru, Bidang Jasa Kontruksi, Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Penginapan, Pergudangan, Jaringan Gas, Pariwisata, Transportasi, Rumah Tinggal, Pertokoan dan Sektor Pendidikan.	DPMP TSP



								beroperasi. Demikian juga dengan PT KAL, ojek online, kebanyakan juga hanya menerima pesan antar makanan. Sehingga, sektor ini mengalami pertumbuhan negative sebesar 5,48 %.									
II	Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	7,2	7,1	7,43	Jumlah penduduk miskin meningkat di Tahun 2020 karena melemahnya daya beli masyarakat secara umum dan secara umum dan secara khusus penduduk yang berada di lapisan terendah ekonominya. Namun apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pemkot maka capaian usaha pemkot dalam mengurangi kemiskinan relatif baik.	BPS	Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,64	3,47	6,7	Mata pencaharian penduduk kota Probolinggo sebagian besar bertumpu pada lapangan usaha non pertanian. Pandemic covid19 berimbas pada perusahaan besar hingga level mikro. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hilangnya mata pencaharian karena dampak covid secara langsung maupun imbas tidak langsung.	BPS
										Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	%	31,17	31,03	35	Dikarenakan pandemi covid-19 sepanjang Tahun 2020 Pemerintah melakukan Perluasan Target Program dan Kegiatan untuk penanganan PMKS. Sepanjang covid ini, terdapat peningkatan yang tajam pada jumlah fakir miskin yang menerima bantuan.	Dinsos
										Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Skor Pola Harapan Pangan	Skor	90,15	91,1	84,2	Belum memenuhi target skor 91,1 karena produksi/ketersediaan pangan berkurang, sehingga menyebabkan pendapatan petani menurun. Ketersediaan yang berkurang menyebabkan kenaikan harga dan penurunan daya beli masyarakat. Daya beli pangan yang turun akan menyebabkan penurunan kualitas konsumsi pangan masyarakat sehingga skor PPH turun. Dari perbandingan skor PPH tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan skor sebesar 2,7, sangat jauh dari angka target 91,1. Penyebab terjadinya penurunan skor PPH tersebut karena terjadi penurunan dari konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta konsumsi buah dan sayur.	Disperta, KP dan Perikanan



		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,53	73,59	73,27	IPM Kota Probolinggo tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yaitu 73,27. Angka ini menunjukkan Kota Probolinggo masuk kategori tinggi dan menempati peringkat ke 13 Jawa Timur. Pembangunan manusia di Kota Probolinggo kontinuu mengalami kemajuan selama periode 2014-2020. Dari 70,49 (2014) meningkat menjadi 73,27 (2020) atau selama periode tersebut tumbuh 3,94 persen. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2014-2020 sebesar 0,64 persen per tahun. Ini menunjukkan upaya pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Pemerintah Kota Probolinggo terus berupaya meningkatkan kinerja pembangunan manusianya, agar tidak terjadi ketimbangan pembangunan manusia antar wilayah di Kota Probolinggo. Ke depan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan IPM agar bisa masuk pada kategori sangat tinggi.	BPS	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0.66	0.69	0.67	Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Selama periode 2014 hingga 2020, harapan lama sekolah di Kota Probolinggo telah meningkat dari 13,29 tahun (2014) menjadi 13,59 tahun (2020) atau naik sebesar 0,3 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 8,44 tahun (2014) menjadi 8,70 tahun (2020) atau naik 0,26 tahun. Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, harapan lama sekolah di Kota Probolinggo telah mencapai 13,16 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1. Pada periode yang sama, rata-rata lama sekolah di Kota Probolinggo tumbuh 0,47 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Probolinggo. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kota Probolinggo tahun 2020 mencapai 8,70 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan kelas VIII (SMP kelas I) hingga kelas IX (SMA kelas I).	BPS
--	--	--	----------------------------	--------	-------	-------	-------	---	-----	--	-------------------	--------	------	------	------	---	-----



										Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0.77	0.77	0.77	Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2014 hingga 2020, Kota Probolinggo telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 69,52 tahun (2014) menjadi 70,29 tahun (2020) atau naik sebesar 0,77 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,16 persen per tahun atau naik 0,11 tahun per tahunnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kota Probolinggo. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan.	BPS
III	Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	Indeks	69.59	71.28	73.64	Penilaian tersebut berdasarkan nilai persentase ketersediaan infrastruktur sebesar 75,16 dan persentase infrastruktur berkualitas baik sebesar 72,12	Bappeda Litbang	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	%	69.21	70.45	75,16	Pencapaian indeks dapat optimal dikarenakan adanya indikator yang memberikan kontribusi dalam penilaian tinggi dari aspek pembangunan / ketersediaan fasilitas pelayanan Kesehatan	Bappeda Litbang
											Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	%	69,96	72,1	72,12	Pencapaian indeks dapat optimal dikarenakan adanya indikator yang memberikan kontribusi dalam penilaian tinggi dari Pembangunan Akses air bersih aman mencapai nilai 100% dan Kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang telah mencapai 94,69	
	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56.61	59.11	64,4	Dari data-data yang diperoleh didapat hasil analisa perhitungan IKLH Kota Probolinggo tahun 2020 sebesar 64,40 masih masuk dalam kategori kurang Dikarenakan Parameter yang melebihi tersebut disebabkan karena kandungan organik tinggi dari kegiatan MCK dan limbah cair domestik serta rata-rata debit sungai di kota Probolinggo yang kecil, - dan semakin sempitnya lahan menjadi permukiman dan industry maka dapat berdampak pula pada berubahnya iklim mikro yang semakin naik suhunya.	DLH	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	50	50.8	50	Realisasi Th 2020 tercapai 98% dengan nilai IKA sebesar 50. Kondisi ketiga sungai di Kota Probolinggo berstatus "Tercemar Ringan". Nilai IKA tidak mengalami kenaikan karena adanya keterbatasan data kualitas air sungai.	DLH	
										Indeks Kualitas Udara	Indeks	84.77	84.9	90.36	Realisasi IKU Tahun 2020 melebihi target yaitu 90,36 atau tergolong kategori "Sangat Baik". Hal tersebut disebabkan pada masa pandemi covid diberlakukan pembatasan aktifitas sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah lalu lintas. Pengukuran kualitas udara juga dipengaruhi oleh cuaca dan arah angin.		
									Indeks Tutupan Lahan	Indeks	40.2	46	41,1	Realisasi Tahun 2020 sebesar 41,1, rendahnya tingkat realisasi diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tiap tahunnya mencapai 1%. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembangunan permukiman yang berimbas pada berkurangnya lahan akibat adanya alih fungsi.			
									Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	148	147	114.16	Terpenuhinya pelaksanaan perbaikan dari item indikator dalam 7 prioritas pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang mampu dibuktikan dengan data / dokumen pendukung.	BPBD	



IV	Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60.71	71	66.81	<p>1. Tingginya capaian indeks RB disebabkan adanya kegiatan peningkatan terhadap 8 area perubahan melalui rencana aksi yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;</p> <p>2. Adapun upaya-upaya peningkatan terhadap 8 area perubahan sebagaimana tersebut di atas juga didukung dengan kegiatan sebagaimana berikut: Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi baik tingkat Kota maupun pada Tingkat Perangkat Daerah; Pada tingkat Perangkat Daerah telah disusun rencana kerja yang telah diselaraskan dengan rencana aksi, sehingga indikator keberhasilan pengungkit indeks RB dapat meningkat dan mendorong ketercapaian indeks RB secara efektif; Pemerintah Kota telah melaksanakan desk terkait pencapaian indeks RB dengan Perangkat Daerah Pengampu 20 Indikator Keberhasilan pengungkit Indeks RB (Inspektorat;Bappeda dan Litbang;</p>	Bag. Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai Sakip	Skor	70,49	80	71	<p>1. Pencapaian Nilai SAKIP disebabkan karena adanya pencapaian indeks di atas 100% pada indeks pembangunan manusia dan indeks reformasi birokrasi yang mendukung SAKIP, sementara itu pada indeks lainnya seperti indeks laju pembangunan gender, laju pertumbuhan ekonomi, indeks infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase penduduk miskin, dan indeks toleransi belum mencapai 100%;</p> <p>2. Adanya anggaran yang memadai dalam mendukung SAKIP menyebabkan peningkatan pelaksanaan SAKIP;</p> <p>3. Proses penyusunan Proses Bisnis di tahun 2019 masih pada tahap pengonsepan dan masih pelaksanaan DESK dengan Perangkat Daerah terkait, sementara pada tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 114 Tahun 2020 tentang peta Proses Bisnis Kota Probolinggo. Selanjutnya, pada tingkat Perangkat Daerah masih dalam bentuk konsep dan belum ditetapkan hingga tahun 2020;</p> <p>4. Keterlibatan Pimpinan secara aktif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan;</p> <p>5. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, dengan melakukan kegiatan Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, melalui Kegiatan Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019-2020; Desk Evaluasi dan Evaluasi Penerapan SAKIP di Kota Probolinggo Tahun 2019-2020;</p> <p>6. Pemanfaatan e-Gov sebagai salah satu media untuk mengukur kinerja perangkat daerah menambahkan modul SAKIP pada aplikasi Sistem Infomasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang bekerjasama dengan BPPT.</p> <p>7. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel maka pada tahun 2020 ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo</p>	Inspektorat
----	--	---	----------------------------	--------	-------	----	-------	---	-----------------	--	-------------	------	-------	----	----	--	-------------



										Nilai LPPD	Skor	N/A	3,25	N/A	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan dan telah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri, namun demikian hasil EKPPD Tahun 2020 belum disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2. Evaluasi LPPD dilaksanakan pada tahun berikutnya, dan hasil nilai LPPD disampaikan pada tahun berikutnya kembali pada saat hari Otonomi daerah di bulan November	Bag. Pemerintahan
										Indeks SPBE	Indeks	2,53	3,2	3,35	Bahwa Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Bahwa Kementerian PANRB akan melakukan Evaluasi SPBE di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Tahun 2019, Pemerintah Kota Probolinggo telah mendapatkan nilai 3,25 (baik), termasuk diatas rata-rata tingkat Provinsi (peringkat 4 se Jatim) dibawah Kota Surabaya, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lamongan. Namun perlu untuk ditingkatkan setiap tahun dikarenakan pencapaian SPBE dimasukkan kedalam target SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang mengacu pada RPJMD 2019 - 2024. Untuk hasil evaluasi SPBE Tahun 2020, Pemerintah Kota Probolinggo telah mendapatkan nilai 3,35 (baik), dengan rincian sebagai berikut : a. Domain Kebijakan 3,59 b. Domain Tata Kelola 3,00 c. Domain Layanan 3,45 Dari hasil tersebut diatas yang perlu ditingkatkan adalah domain Tata Kelola yang masih berada pada angka tingkat kematangan 3,00 (Terstandarisasi) artinya pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis pada level transaksi artinya layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan. Sehingga perlu ditingkatkan nilainya ke nilai 4,00 atau	Diskominfo



															level kolaborasi yaitu layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.						
															Opini BPK Terhadap LKPD	Peringkat	WTP	WTP	N/A	LKPD merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagian hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 189 menyatakan bahwa Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat penulisan isian Form Capaian Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo ini, SKPD hingga batas waktu akhir Pebruari. Dan sebagaimana dalam PP tersebut di pasal 190 juga menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BPPKAD
															Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	62	63	64,25	Realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo Tahun 2020 sebesar 64,25 dengan kategori rendah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Bab V Bobot Penilaian, Perhitungan, dan Kategori Tingkat Profesionalitas, Bagian Ketiga Kategori Tingkat Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pasal 14). Untuk Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 dan Tahun 2020, terdapat 2 mekanisme Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang berbeda dengan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2018, yaitu : 1) Melalui updating data pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara; atau 2) Melalui Penilaian Mandiri.	BKPSDM





BAB 4

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Terkait Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemberian tugas pembantuan pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Probolinggo tidak menerima Tugas Pembantuan baik yang berasal dari Pemerintah maupun Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut diindikasikan karena adanya refocusing anggaran akibat adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya perubahan skema penganggaran untuk Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



BAB 5 **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo Akhir Tahun Anggaran 2020 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo sebagaimana diamanatkan undang-undang.

LKPJ ini disusun dengan lebih memfokuskan pada pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan melalui program dan kegiatan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2020 yang telah dituangkan dalam LKPJ Walikota Probolinggo Akhir Tahun Anggaran 2020 diharapkan menjadi bahan masukan untuk mengarahkan perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut patut disyukuri, mengingat capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dijelaskan dalam LKPJ ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara Pemerintah

Kota Probolinggo, DPRD dan masyarakat berlandaskan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Hal tersebut dilakukan demi mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan pencapaian pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja RKPJ tahun berikutnya yang merupakan penjabaran dari RPJMD periode keempat dari tahapan RPJPD tahun 2005-2025.

Kami memiliki harapan besar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat, serta dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke



depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melanjutkan karya pengabdian membangun kota Probolinggo yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi.

Probolinggo, Maret 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO

HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2021